



LAPORAN
EVALUASI
PELAKSANAAN RKPD DAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NTB
TRIWULAN II TAHUN 2022

BAPPEDA PROVINSI NTB
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB pada Triwulan II tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan II merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan II Tahun 2022. Laporan ini mengacu pada RKPD Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB. Sebanyak 11 indikator atau 29,73% telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2022, sedangkan 7 indikator atau 18,92% belum mencapai target, Sisanya sebanyak 19 indikator atau 51,35% belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Selain itu, capaian terhadap 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2022, dimana sebanyak 22 indikator atau 21,36 persen sudah sesuai target bahkan melampaui, 28 indikator atau 27,18 persen belum memenuhi target dan masih terdapat 53 indikator atau 51,46 persen belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataran, Agustus 2022
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimana pemerintah provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja perangkat daerah Provinsi NTB Tahun 2020 maupun lima tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023 harus mengetahui progres dan tingkat capaian secara berkala dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan II merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan II Tahun 2022. Laporan ini mengacu pada RKPD Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 281 kegiatan dan 861 sub kegiatan. Total program Perangkat Daerah sebanyak 178 dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.976.159.420.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.560.948.808.728,00 atau 26,12 persen.

Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan II tahun 2022 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, rata-rata capaian kinerja sebesar 39,66 persen dengan capaian keuangan sebesar 32,99 persen. Rendahnya capaian kinerja disebabkan karena masih sedikitnya Perangkat Daerah yang menginput capaian kinerja pada form yang telah disediakan. Selain itu, rendahnya realisasi fisik dan serapan anggaran pada Triwulan II ini, disebabkan karena sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan III – IV tahun anggaran 2022.

Terdapat 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB Tahun 2022. Sebanyak 11 indikator atau 29,73% telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2022, sedangkan 7 indikator atau 18,92% belum mencapai target, Sisanya sebanyak 19 indikator atau 51,35% belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Beberapa indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target diantaranya Persentase konektivitas transportasi public; Opini BPK; Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD;

Nilai SAKIP; Persentase Balita Stunting; Persentase Penanganan Sampah; Persentase Pengurangan Sampah; Nilai Realisasi Investasi; Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan; Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi; Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak; Rasio Elektrifikasi; Inflasi; Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum); Tingkat Pengangguran Terbuka; Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah; Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan; Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak.

Terdapat 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2022, dimana sebanyak 22 indikator atau 21,36 persen sudah sesuai target bahkan melampaui, 28 indikator atau 27,18 persen belum memenuhi target dan masih terdapat 53 indikator atau 51,46 persen belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Sasaran	3
1.5 Sistematika Penulisan Laporan	3
BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022.....	4
2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2022	4
2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2022	5
2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2022	6
BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2022	10
BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022 TRIWULAN II	30
4.1 Hasil Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2022	30
4.2 Capaian RPJMD Provinsi NTB 2019-20223 sampai tahun 2022	85
4.2.1 Indikator Kinerja Utama.....	85
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah	91
BAB V : PENUTUP	103
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Rekomendasi	104

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat baik dalam skala nasional maupun regional.

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. RPKD Tahun 2022 merupakan perencanaan tahun keempat penjabaran RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yang diarahkan pada upaya pemulihan sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, peningkatan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, menjaga stabilitas makro ekonomi, serta memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dengan demikian diharapkan seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam mewujudkan dan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan setiap triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 261 disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi untuk mengetahui realisasi antara rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Laporan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah berdasarkan sasaran pembangunan pada Triwulan II Tahun 2022 mengacu pada RKPD Tahun 2022 sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2021. Apabila berdasarkan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya maka BAPPEDA bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan baik pada pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan berikutnya maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan perubahan RKPD provinsi NTB Tahun 2022 dan RKPD Provinsi NTB tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022;

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja sasaran pembangunan dan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2022;
2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;

3. Kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD Tahun 2020 ini adalah untuk mengukur capaian Sasaran Pembangunan dan program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2022.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan laporan;
- Bab II : Prioritas, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2022. Bab ini berisi tentang prioritas sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022;
- Bab III : Rencana Program Prioritas Tahun 2022. Bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2022.
- Bab IV : Capaian Target Kinerja Pembangunan Triwulan II Tahun 2022. Bab ini berisi Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas serta Penyerapan Anggaran Tahun 2022 sampai Triwulan I.
- Bab V : Penutup

BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2022

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2022 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang", Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 -2023 sebagai berikut:

Misi 1 "NTB TANGGUH DAN MANTAP" melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;

Misi 2 "NTB BERSIH DAN MELAYANI" melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;

Misi 3 "NTB SEHAT DAN CERDAS" melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;

Misi 4 "NTB ASRI DAN LESTARI" melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

Misi 5 "NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI" melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;

Misi 6 "NTB ADIL DAN BERKAH" melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Adapun tujuan pembangunan NTB Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana.
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel.
4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing.
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing.
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan.
7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas.
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan.
9. Terwujudnya perindustrian yang unggul.
10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia).

Berdasarkan tujuan pembangunan, maka sasaran pembangunan NTB Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Meningkatnya Profesionalisme ASN.
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
10. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
11. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
12. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
13. Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
14. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas.
15. Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin .
16. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan.
17. Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin.
18. Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok.
19. Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
20. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
21. Meningkatnya Daya Saing Industri.
22. Menurunnya Pengangguran Terbuka.
23. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat.
24. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
25. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
26. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2022 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode ketiga dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Pembangunan NTB yaitu "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang".

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari periode RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi:

1. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19, dengan strategi:

- a. Penguatan sektor Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19
 - b. Jaringan Pengaman Sosial bagi masyarakat miskin
 - c. Penanganan dampak ekonomi Pandemi COVID-19.
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, dengan strategi :
- a. Mengoptimalkan pertanian/agribisnis dan investasi, serta penyerapan tenaga kerja melalui kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta;
 - b. Pemulihan dan pengembangan sektor/aktivitas pariwisata;
 - c. Mengembangkan industri olahan dan alat-mesin berbasis pertanian, kehutanan, pertambangan dengan pola kemitraan;
 - d. Meningkatkan konektivitas wilayah dan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air dan energi, terutama pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
3. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, dengan strategi:
- a. Mendorong Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah.
 - b. Mendorong Pemerataan Pendapatan Antar Kelompok Masyarakat.
 - c. Memperluas Akses terhadap kesempatan kerja dan peluang berusaha; serta
 - d. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2022

Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2021 yaitu **"Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul"**. Adapun Prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD 2022 yaitu :

1. Memperkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana, mendukung Prioritas Nasional 6;
2. Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi, mendukung Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5;
3. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik mendukung Prioritas Nasional 7
4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan SDM, mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Nasional 3;
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan SDM, mendukung Prioritas Nasional 3;
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan, mendukung Prioritas Nasional 6;
7. Memperkuat Integrasi Hulu-Hilir Sistem Agribisnis Dalam Mendukung Investasi, mendukung Prioritas Nasional 1;
8. Mengoptimalkan Pengelolaan Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19, mendukung Prioritas Nasional 1;

9. Industrialisasi Produk Unggulan, mendukung Prioritas Nasional 1;
 10. Penguatan Stabilitas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, mendukung Prioritas Nasional 4.

Target Pembangunan berdasarkan sasaran pembangunan tahun 2022 disajikan dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 2.1. Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	119.41
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.63
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas			Point	79.84
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	85.36
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	52.17
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	86.86				
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	BB
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	36.97
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (76,01 - 80,00)
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.70
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.53
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	72.43
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.08
					Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	30.99
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM	Indeks Pendidikan			Point	62.74
Meningkatnya kualitas dan	Harapan Lama Sekolah			Tahun	13.73		

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022
		yang berdaya saing		jangkauan layanan pendidikan	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.04
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	68.22
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	42.93
					Indeks Kualitas Udara	Point	87.56
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	70.89
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	68.70	
			Neraca pengelolaan sampah		%	85.00	
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%		60.00			
		Persentase Pengurangan Sampah	%	25.00			
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	74.68
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	15,428
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.71
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.70
					Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.91
					Rasio Elektrifikasi	%	99.88
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	65.80
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11,604
				Terwujudnya pariwisata	Pertumbuhan sektor	%	3.00

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022
		yang dapat diandalkan	kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	129.78
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	7.50
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	173.02
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.19
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	14.05
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	20.00
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.72
			Partisipasi politik masyarakat			%	84.57
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.90
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	61.16
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	19.27
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2022

Program pembangunan daerah didasarkan pada program yang mendukung sasaran pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagaimana telah dituangkan dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022. Adapun program pembangunan daerah pada tahun 2022 sebanyak 120 program dari 147 Program perangkat daerah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penanganan Bencana
3. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)
6. Program Pengelolaan Pelayaran
7. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Program Penyelenggaran Pengawasan
10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
11. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
13. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
14. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Program Penataan Organisasi
16. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
17. Program Kepegawaian Daerah
18. Pengembangan Sumber Daya Manusia
19. Program Pendaftaran Penduduk
20. Program Pencatatan Sipil
21. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
22. Program Peningkatan Kerjasama Desa
23. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
24. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
25. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
26. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
27. Program Perencanaan Tenaga Kerja
28. Program Pembinaan Perpustakaan

29. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
30. Program Pelayanan Penghubung
31. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
32. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
33. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
34. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
35. Program Pengelolaan Pendidikan
36. Program Pengembangan Kurikulum
37. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
38. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
39. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
40. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
41. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
42. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
43. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
44. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
45. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
46. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
47. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
48. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
49. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
50. Program Pengelolaan Hutan
51. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
52. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
53. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
54. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
55. Program Pengelolaan Persampahan
56. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
57. Program Promosi Penanaman Modal
58. Program Pelayanan Penanaman Modal
59. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
60. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
61. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
62. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
63. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

64. Program Penyuluhan Pertanian
65. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
66. Program Pengelolaan Hutan
67. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
68. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
69. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
70. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
71. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
72. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
73. Program Rehabilitasi Sosial
74. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
75. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
76. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
77. Program Penanganan Kerawanan Pangan
78. Program Pengawasan Keamanan Pangan
79. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
80. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
81. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
82. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
83. Program Pengembangan Perumahan
84. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
85. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
86. Program Pengembangan Ekspor
87. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
88. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
89. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
90. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
91. Program Pemasaran Pariwisata
92. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
93. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
94. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
95. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
96. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
97. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
98. Program Pengembangan Umkm
99. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
100. Program Penempatan Tenaga Kerja
101. Program Hubungan Industrial

102. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
103. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
104. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
105. Program Kesejahteraan Rakyat
106. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
107. Program Pengembangan Kebudayaan
108. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
109. Program Pembinaan Sejarah
110. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
111. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
112. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
113. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
114. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
115. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
116. Program Perlindungan Perempuan
117. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
118. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
119. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
120. Program Perlindungan Khusus Anak

Pemetaan program Pembangunan Daerah kedalam sasaran pembangunan pada tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Pemetaan Program Pembangunan Daerah Kedalam Sasaran
Pembangunan Pada Tahun 2022**

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah					
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point	119.41		
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.63		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%	32.78	4,749,579,691	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	67.34		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	2,524,923,366	Dinas Sosial
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas	Point	79.84		
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan jalan	%	85.36		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	85.36	424,968,754,650	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	52.17		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	75.37	78,749,039,047	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	86.86		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	80.40	4,694,778,700	Dinas Perhubungan
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	98.59		
	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	35		
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	49.39		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	61.61	764,484,200	Dinas Perhubungan
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi					

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB		
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	739,588,857,260	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100	1,092,593,901	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	70	1,849,401,028	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	85	1,281,660,820	INSPEKTORAT
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	44.44	2,517,297,403	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	6.55	472,000,744	INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	96	1,865,531,280	
Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	36.97		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	36.76	554,780,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	52.03	15,363,280,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (76,01 - 80,00)		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	4,779,893,285	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	12,519,651,738	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkat Nilai Implementasi SAKIP-nya	%	91.11	981,904,708	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	22,22	851,362,983	INSPEKTORAT
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkatkan	%		1,282,219,090	Biro Organisasi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	3,165,190,197	Biro Pemerintahan
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.70		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	16	7,150,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan		80		
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi		88		
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan		132		
	Nilai Aspek Sistem Informasi		16		
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0.09	16,960,960,998	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0.04		
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0.14		
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0.59		
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.53		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per- satunya penduduk	%	98,80	290,696,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
					dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	216,094,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%	100	1,042,092,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkar hutan dan pesisir	%	20	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	70	5,599,748,172	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	55	2,058,351,845	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	25	505,798,581	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	40	493,138,545	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	85	100,214,713	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	1,135,237,618	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	208,116,607	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada	Orang	41,000		Badan Penghubung Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
	Anjungan NTB TMII (orang)				
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah					
Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan kehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan	Point	72.43		
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.08		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kehatan yang terakreditasi	%	85	163,526,294,113	Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kehatan	%	97		
	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kehatan yzng sesuai standar	%	75		
	Persentase pelayanan kehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100		
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%	90		
	Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	97		
	Persentase fasilitas pelayanan kehatan yang menggunakan obat rasional	%	100		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2.5	1,391,035,404	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	90	100,000,000	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	85	54,518,919,382	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	75	10,339,417,902	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	78.00	48,764,835,901	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kehatan dan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting	%	30.99		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita Wasting	%	11.41		Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%	70	1,844,102,816	Dinas Kesehatan
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan	Point	62.74		
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.73		
	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.04		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	99.95	496,806,046,231	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	94.38		
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	97.57		
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70		
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1		
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	1:18		
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	1:12		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	696,067,714	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	69,288,275,305	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	99.58		
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	100		
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	60		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		6		
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	100	65,788,824	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	35	309,938,698	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	3,711,881,596	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pembinaan Atlet Berprestasi	%	100	10,438,816,493	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan					
Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	68.22		
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	42.93		
	Indeks Kualitas Udara	Point	87.56		
	Indeks Kualitas Air Laut	Point	70.89		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	24.24	337,210,648	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	932,857,745	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi	1	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit	210	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/ kegiatan	25	199,138,369	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%	10	208,086,986	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok	0	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	20	211,009,847	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	68.70		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	83	20,303,985,721	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30,503	935,494,875	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	17.70	699,241,612	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	4.00	4,703,740,157	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	89.69	892,236,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Neraca pengelolaan sampah (%)	%	85.00		
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	60.00		
	Persentase Pengurangan Sampah	%	25.00		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	85	5,299,032,825	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi					
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli (Point)	%	74.68		
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	15,428		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perentase Peningkatan Minat Investasi	Persen	5	596,026,769	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen	100.00	863,871,915	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
					Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	90	641,960,427	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah MODAL	Persen	55	888,212,883	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen	100	140,706,575	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.71		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%	9.5	44,798,298,458	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%	100	564,947,181	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS	%	< 1	2,799,889,261	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	100	423,050,759	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Sarana Pertanian	%	1.99	19,956,291,589	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	%	65.56	79,975,449,202	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	2		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96	434,192,818	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	70	6,731,344,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	8.74	4,909,615,839	Dinas Kelautan dan Perikanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	249,099	8,708,211,521	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1,219,005	3,795,727,604	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	99.92	1,962,524,606	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	214373	1,352,738,477	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%	100		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	788,655,091	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	3.5	17,873,444,354	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	12,479,741,066	Dinas Sosial
Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.70		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%	79.62	300,963,367	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100	3,778,523,930	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	5.77	358,435,000	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	85.00	679,047,614	Dinas Ketahanan Pangan
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	78.45		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	78.45	3,337,898,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.91		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	97.00		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	84,488	163,032,669,005	Dinas Perumahan dan Permukiman
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Rasio Elektrifikasi	%	99.88		
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	5.64	643,295,009	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99.88	1,791,333,986	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	65.80		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	2,526,185,090	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Rumah tangga menempati hunian layak	%	98.86		
Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%	70	289,831,387	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	1,716,733,208	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	5	1,349,224,006	Dinas Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	85	1,297,512,601	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	12,446,324,087	Dinas Perdagangan
Sasaran 7: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp.000	11,604		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	490,000,000	Dinas Perdagangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%	3.00		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	129.78		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	85.85	5,503,206,408	Dinas Pariwisata
	Persentase Geosite yang tertata	%	50		
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang		2,446,751,761	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%		209,889,754	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%		1,160,576,170	Dinas Pariwisata
Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri (%)	%	7.50		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	173.02		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	35,280,281,729	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%	3.14	1,040,710,958	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	704,426,525	Dinas Perindustrian
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	6.35	1,597,038,675	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	53.53	2,647,148,104	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	3,711,881,596	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.19		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	17	1,232,588,784	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	51.09	1,115,004,981	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	22	337,215,751	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	22	1,139,740,311	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan					
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas	Point	14.05		
Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	20.00		
PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	506,635,309	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	10.53	3,685,524,366	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	97,655,935,112	Biro Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Adat Aktif	%	65	8,086,485,113	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Bumdes Berprestasi	%	27		
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%	80		
	Persentase Posyantek yang aktif	%	56.41		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	72.73	2,173,198,075	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	508,873,145	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%	100	272,477,237	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.72		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100.00	3,932,903,666	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100.00		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	68.96	808,702,907	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	1,911,317,467	Biro Hukum
	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi	%	100		
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%	100		
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100		
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100		
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%	84.57		
Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.90		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	90	5,153,432,345	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	%	81.35	541,317,956	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	61.16		
Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	19.27		
	Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	80		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	52.17	2,021,592,521	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	75.52	920,503,730	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	5	434,995,741	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender		1	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80.00	512,037,084	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		727,588,084	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	%			

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022 TRIWULAN II

4.1 Hasil Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2022

Laporan evaluasi RKPD Triwulan II merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan II Tahun 2022. Evaluasi ini mengacu pada RKPD Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 281 kegiatan dan 861 sub kegiatan. Total program Perangkat Daerah sebanyak 178 dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.976.159.420.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.560.948.808.728,00 atau 26,12 persen.

Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan II tahun 2022 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, rata-rata capaian kinerja sebesar 39,66 persen dengan capaian keuangan sebesar 32,99 persen. Rendahnya capaian kinerja disebabkan karena masih sedikitnya Perangkat Daerah yang menginput capaian kinerja pada form yang telah disediakan. Selain itu, rendahnya realisasi fisik dan serapan anggaran pada Triwulan II ini, disebabkan karena sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan III – IV tahun anggaran 2022.

Adapun rekapitulasi hasil capaian kinerja dan keuangan menurut pemetaan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. **Sasaran Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana** dengan indikator kinerja Indeks Kapasitas Daerah dengan target kinerja 0,63. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai Triwulan II Tahun 2022. Sasaran ini dilaksanakan melalui:
 - a. Program Penanggulangan Bencana pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB dan Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna. Target masing-masing indikator secara

berturut-turut sebesar 32,78% dan 67,34%. Dalam pelaksanaan indikator terbentuknya DESTANA dan SMAB, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana telah merealisasikan dana sebesar Rp. 1,177,017,848,- dari target Rp. 2,947,557,900,- sehingga persentase serapan anggaran yang telah digunakan untuk menjalankan program ini sudah mencapai 39,93 persen sampai triwulan ini.

Guna mendukung pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana, dilakukan sejumlah kegiatan meliputi Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana telah terealisasi sebanyak 50 dokumen perencanaan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang ditanggulangi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Penanganan Pascabencana Provinsi, dan Penyusunan Rencana Kontijensi. Kegiatan kedua yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan realisasi 38 persen kejadian bencana yang telah tertangani. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana; Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana; dan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Sedangkan Realisasi untuk Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana belum dapat dihitung sampai triwulan II.

- b. Program Penanganan Bencana pada Pelaksana Dinas Sosial Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi. Realisasi untuk program ini sebesar 53,05 persen dari target 100%. Dalam melaksanakan program ini, Dinas Sosial telah merealisasikan dana sebesar Rp. 251,130,000,- dari target Rp. 810,100,000,- sehingga persentase serapan anggaran yang telah digunakan hingga triwulan ini sebesar 31 persen.

Guna mendukung pelaksanaan Program Penanganan Bencana, Dinas Sosial membentuk kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, dan Pelayanan Dukungan Psikososial.

2. **Sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar** dengan indikator kinerja Persentase Kemantapan jalan. Sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang melalui Program Penyelenggaraan Jalan. Target jalan mantap tahun 2022 sebesar 85,36 persen, namun belum ada laporan realisasi dari Dinas PUPR hingga triwulan ini. Meski begitu, anggaran yang sudah terserap untuk pelaksanaan program tersebut cukup banyak mencapai Rp. 167,786,454,459,- dari target Rp, 259,149,407,251,- atau sebesar 64,75 persen APBD tahun 2022. Guna mendukung pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan, Dinas PUPR melakukan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan target sepanjang 541 Km jalan provinsi

di provinsi NT harus ditingkatkan dan dipelihara sepanjang tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan, Pengelolaan Leger Jalan, Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan, Pelebaran Jalan Menambah Lajur, Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Penggantian Jembatan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jembatan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, serta Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.

3. **Sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar** dengan indikator kinerja Persentase Kemantapan Sistem Irigasi dengan target 52,17%. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai Triwulan II Tahun 2022. Sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Indikator untuk program ini yaitu Cakupan Pelayanan Areal Irigasi dengan target tahun 2022 sebesar 75.37 persen, namun belum ada laporan realisasi dari Dinas PUPR hingga triwulan ini. Meski begitu, anggaran yang sudah terserap untuk pelaksanaan program tersebut cukup besar mencapai Rp. 49,861,212,327,- dari target Rp, 133,470,449,350,- atau sebesar 37,36 persen. Guna mendukung pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Dinas PUPR melakukan dua kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan Target sebanyak 10 Bangunan SDA yang dikelola. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi, Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya, Pembangunan sumur air tanah untuk air baku, Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya, Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi, Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi, Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing, Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya, Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai.

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan target 1.006 Ha dengan realisasi 1.000 Ha (99,39 persen). Sub Kegiatan untuk mendukung kegiatan ini yaitu Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rehabilitasi Bendung

Irigasi, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi, Operasional Unit Pengelola Irigasi.

4. **Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah** dengan indikator kinerja Persentase konektivitas transportasi publik dengan target kinerja sebesar 86,86%. Realisasi untuk sasaran ini sudah melampaui target kinerja sebesar 88,57 persen atau tingkat capaian 101,97 persen. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik (target kinerja 80,40% dengan realisasi 0,15% sehingga tingkat capaiannya 0,19%), Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (target kinerja 98,59% dengan realisasi 97,5% sehingga tingkat capaiannya 98,89%), Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik (target kinerja 35%), Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik (target kinerja 49,39% dengan realisasi 48,84% sehingga tingkat capaiannya 98,89%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (sub kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan) Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B; Pembangunan Gedung Terminal; Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)), Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (Sub Kegiatan : Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi dan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas kebijakan jalan provinsi), Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (Sub Kegiatan : Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal), Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi; Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Provinsi), Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi; Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan :

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi), Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi).

Hingga triwulan II tahun 2022 ini, Trayek angkutan subsidi sudah terealisasi sebanyak 2 trayek dan Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum sudah terealisasi sebanyak 195 unit. Namun, untuk angkutan umum yang layak jalan (KPS) hanya tersedia sebanyak 3 unit. Angkutan layak jalan ini masih jauh berada di bawah target tahun 2022 sebanyak 156 unit.

- b. Program Pengelolaan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB dengan indikator kinerja Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik (target kinerja 61,61%). Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi), Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi), Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas (sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas), Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan

Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan "Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/ Kota"), Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional), Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional (sub kegiatan : Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional, Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional).

Angkutan laut pelayaran yang diawasi sudah terealisasi sebanyak 8 unit dari 21 unit angkutan yang ditargetkan sepanjang tahun 2022. Selain itu, armada ASDP sudah dievaluasi sebanyak 226 unit dari target 26 unit armada.

5. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dengan indikator kinerja Opini BPK dengan target status WTP. Tahun 2022 ini, Pemerintah Provinsi NTB kembali meraih opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP ini sudah diraih NTB selama 11 tahun beruntun atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun sebelumnya. Keberhasilan mempertahankan status WTP ini tidak terlepas dari sinergi Perangkat Daerah Provinsi NTB dalam menjalankan program kegiatan yang sudah tertuang di dalam dokumen perencanaan pembangunan NTB. Adapun program kegiatan yang dilakukan dalam mempertahankan status WTP ini antara lain:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi (target kinerja 100 %); dan Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota (target kinerja 100 %). Dalam pelaksanaan program ini, BPKAD telah merealisasikan anggaran sebesar 35,84% atau Rp. 317,114,499,190,- dari target Rp. 884,754,776,404,-. Realisasi terkait ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi sampai triwulan II tahun 2022 sudah mencapai 50 persen dari target 100 persen. Guna mendukung program Pengelolaan Keuangan Daerah, BPKAD melakukan sejumlah kegiatan meliputi: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Pengolahan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

Sepanjang tahun 2022, dokumen rencana Anggaran Daerah sudah tersusun sebanyak 6 dokumen sedangkan dokumen evaluasi pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota sudah tersusun sebanyak 15 dokumen.

LKPD dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu sudah tersusun sebanyak 2 dokumen, serta laporan Dana Bagi Hasil Dana Bantuan dan Keuangan sudah terealisasi sebanyak 4 dokumen.

- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB dengan indikator kinerja Persentase pengelolaan BMD pada Perangkat Daerah yang akurat dan akuntabel. Target kinerja program ini sebesar 70 persen dan sudah terealisasi sebanyak 40 persen sehingga tingkat capainnya 57,14 persen. Program ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Jumlah laporan BMD Perangkat Daerah sudah diterima sebanyak 25 laporan dari target 31 laporan.
 - c. Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Inspektorat Provinsi NTB dengan indikator kinerja yaitu Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD (target 85% dan realisasi 73,96% sehingga tingkat capainnya 87,01%) dan Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah (target 44,44%). Guna mendukung program ini, Inspektorat melaksanakan 2 kegiatan yaitu kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Keuangan, Kerjasama Pengawasan Internal, dan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. Kegiatan kedua terealisasi sebanyak 20 dokumen Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan didukung oleh sub kegiatan Penanganan Penyelesaian, dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
 - d. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan 2 indikator kinerja yaitu persentase peningkatan nilai unsur pembentuk SPIP dengan target 6,55 persen dan indikator Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat tepat waktu dengan target 96 persen. Aduan masyarakat yang sudah diselesaikan sampai triwulan II tahun 2022 sudah 100 persen. Hal ini berarti seluruh aduan masyarakat sudah selesai ditangani dan melampaui target tahun 2022. Program ini didukung dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan (sub kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan) serta kegiatan Pendampingan dan Asistensi (Sub kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi).
6. **Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD. Sasaran ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan realisasi sebesar 41,55 persen dari target 36,97

persen. Artinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah memberikan kontribusi melebihi target tahun 2022 dengan tingkat capaian 112,39 persen. Sasaran ini dilaksanakan melalui 2 program yaitu:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja Derajat Desentralisasi Fiskal. Target kinerja untuk program ini sebesar 36,76 persen dengan realisasi sebesar 41,55 persen. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan didukung oleh sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan dengan realisasi sejumlah Rp. 986,97,- Milyar pendapatan Asli daerah (PAD) dari target Rp. 2571,64 Milyar.

Kegiatan kedua yaitu Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dengan realisasi Rp. 1.358,43 Milyar dari target Rp. 2819,43 persen. Realisasi tersebut merupakan jumlah penerimaan pendapatan transfer termasuk di dalamnya dana perimbangan.

- b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK). Target kinerja program ini adalah 52,03 persen dengan realisasi sebesar 50,41 persen. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan realisasi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebesar 50,41 persen. Sub kegiatan yang dilakukan guna mendukung kegiatan ini yaitu Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; Penetapan Wajib Pajak Daerah; Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; Penagihan Pajak Daerah; Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Pendapatan pajak daerah yang ditetapkan sudah mencapai Rp. 731,71 Milyar dari target Rp. 1.726,24 Milyar (42,39 persen). Tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan di NTB sudah mencapai 44,96 persen dari target 63,64 persen pada triwulan ini. Selain itu sejumlah 2 MoU telah dikembangkan sebagai bentuk perjanjian Kerjasama (PKS) pengembangan layanan kesamsatan yang ditindaklanjuti.

7. **Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dengan indikator kinerja Nilai SAKIP dengan target kinerja BB. Dari tahun ke tahun, nilai SAKIP Provinsi NTB dan kabupaten/kota terus mengalami peningkatan. Untuk meraih kategori BB sebagaimana target tahun ini tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu sinergi untuk merancang program kerja yang baik, terarah dan berdampak bagi masyarakat. Guna

mencapai target Nilai SAKIP BB, Pemerintah Provinsi NTB telah menyusun sejumlah program Kegiatan beserta sub kegiatan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Biro Organisasi, dan Biro Pemerintahan sebagai lokomotif utama pencapaian sasaran ini. Program dimaksud yaitu:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator kinerja Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan. Target kinerja untuk program ini sebesar 100%. Bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 3 kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang sudah tersusun sebanyak 6 dokumen hasil evaluasi yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan. Sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini yaitu Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah; Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya; Pelaksanaan Konsultasi Publik; Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD; Pelaksanaan Musrenbang Provinsi; dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

Kegiatan kedua yaitu Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi 2 Dokumen Analisis Hasil Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan. Sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini yaitu Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD; dan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota). Sebanyak 20 orang sudah dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi serta sebanyak 180 orang Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota sudah Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan ketiga yaitu Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sudah terbentuk 8 dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Guna mendukung kegiatan ini dilakukan sejumlah sub kegiatan meliputi Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi; Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah; Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Sebanyak 6 laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah sudah terealisasi, serta 1 laporan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

- b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD. Target kinerja untuk program ini adalah 100% dan sudah terealisasi separuhnya

(50%). Bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 3 kegiatan meliputi Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sudah terealisasi sebanyak 1 dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia), dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Sejumlah laporan sudah tersusun dalam pelaksanaan sub kegiatan ini meliputi 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), 1 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, 1 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, 2 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD), 2 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dan 2 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) sudah terealisasi sebanyak 1 Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). Sub kegiatan dalam mendukung kegiatan ini yaitu Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

(RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA).

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah dengan realisasi sejumlah 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ini, dilakukan sejumlah sub kegiatan meliputi Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah)

- c. Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Inspektorat dengan indikator kinerja Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya. Target untuk program ini sebesar 91,11 persen dengan didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, dan Pengawasan Umum dan teknis Kabupaten/Kota.
- d. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi pada Inspektorat dengan indikator kinerja Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM dengan target kinerja sebesar 22,22%. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan indikator kinerja jumlah dokumen laporan hasil pendampingan dan asistensi. Sub kegiatan untuk kegiatan ini adalah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi; dan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
- e. Program Penataan Organisasi pada Biro Organisasi dengan indikator kinerja Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkatkan. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program ini sebanyak 2 kegiatan dengan 2 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang telah menindaklanjuti hasil penyederhanaan struktur Organisasi dan Persentase PD yang telah menindaklanjuti hasil evaluasi Analisis Jabatan dan Beban Kerja. Realisasi kegiatan ini adalah 100%

- dengan didukung oleh sub kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi, Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota, dan Penataan Analisis Jabatan. Kegiatan kedua yaitu Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang dibina Pelaksanaan PMPRB dan Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan di fasilitasi pelaksanaan PMPRB. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja; Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan; dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik.
- f. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan indikator kinerja Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah dengan realisasi 100% sebagaimana yang ditargetkan. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari 3 kegiatan dengan 9 sub kegiatan meliputi : Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dengan realisasi 3 dokumen laporan pelaksanaan tugas pemerintahan. Sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini yaitu Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan, Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum, dan Fasilitasi Penataan Wilayah. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan realisasi 4 dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah. Sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini yaitu Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan, dan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan. Kegiatan terakhir yaitu Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan realisasi 1 dokumen laporan fasilitasi kerjasama daerah. Sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini yaitu Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah, Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta, dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

8. **Sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN** dengan Indikator Kinerja Indeks Profesionalisme ASN dengan target kinerja 0,70 poin. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai Triwulan II Tahun 2022. Sasaran ini dilaksanakan melalui :
- a. Program Kepegawaian Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah dengan indikator kinerja yaitu Nilai Nilai Penerapan Sistem Merit dengan realisasi 287 poin dari target 347,5 point (82,59 persen). Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini terdiri dari 4 kegiatan, meliputi Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN; Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN; serta Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN didukung oleh sub kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN; Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN; Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK; Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN; Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN; Koordinasi Pelaksanaan

Administrasi Pemberhentian; Evaluasi Pemberhentian ASN; Fasilitasi Lembaga Profesi ASN; Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN; Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; Pengelolaan Data Kepegawaian; dan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian.

Sampai dengan triwulan II Tahun 2022, Jumlah ASN yang sudah tersedia datanya pada aplikasi SIMPEG/SIMADU sebanyak 4000 orang dari target 14.143 orang. Namun, di sisi lain Pemerintah Provinsi NTB juga telah mengeluarkan 200 Surat Keputusan (SK) terkait pemberhentian PNS dan PTT.

Kegiatan kedua yaitu Mutasi dan Promosi ASN telah terealisasi sebanyak 20 point Nilai Aspek Promosi dan Mutasi. Kegiatan ini didukung oleh Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN, Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, dan Pengelolaan Promosi ASN. Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT sampai triwulan II tahun 2022 sebanyak 120 SK, Jumlah keputusan kenaikan pangkat / gaji berkala sebanyak 1500 SK, dan Jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam Jabatan Struktural sebanyak 230 SK. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN didukung oleh sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, Pengelolaan Assessment Center, Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN, Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat, Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN, Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN, Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional, Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN, Pembinaan Jabatan Fungsional ASN, Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional, dan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional. Jumlah SPT, Surat Rekomendasi, Surat Ijin Mengikuti Diklat dan Sertifikasi sudah terealisasi untuk 413 pegawai selain itu, Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan / pemberhentian dalam Jabatan Fungsional sudah terealisasi sebanyak 230 Surat Keputusan.

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur didukung oleh sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai; Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai; Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur; Pembinaan Disiplin ASN; Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN; Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai; dan Evaluasi Disiplin ASN. Terdapat 12 pegawai negeri sipil yang diberikan penghargaan sebagai pegawai teladan dan 32 Perangkat Daerah telah menerima pembinaan disiplin ASN.

- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator kinerja Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial (target kinerja: 0,09%); Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional (target kinerja 0,04); Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis (target kinerja 0,14%); dan Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi (target kinerja 0,59%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 2 kegiatan dan 12 sub kegiatan meliputi : Kegiatan

Pengembangan Kompetensi Tekhnis (sub kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum; dan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum) dan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (sub kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional; Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi; Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga; Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan; dan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan).

- 9. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat** dengan Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik dengan target 4,53 poin. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai Triwulan II Tahun 2022. Sasaran ini dilaksanakan melalui :
- a. Program Pendaftaran Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk dengan target 98,8%. Bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah

- Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk dengan realisasi 214 kg berat dokumen/barang yang dikirim.
- b. Program Pencatatan Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil. Kegiatan untuk mendukung program ini yaitu Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota.
 - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota dengan target 100%. Kegiatan yang dilakukan sebanyak 2 kegiatan dengan 6 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi dengan indikator kinerja yaitu Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi. Kegiatan selanjutnya yaitu Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan. Kegiatan ini diselenggarakan melalui Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.
 - d. Program Peningkatan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan lingkaran hutan dan pesisir. Target untuk Program ini sebesar 20 persen dengan realisasi 0,17 persen. Kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi dengan realisasi sebanyak 1 kali. Kegiatan ini didukung melalui Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota, Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga, dan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
 - e. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik dengan target 70%. Kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator kinerja persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik yang tersedia. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik; Pengelolaan Media Komunikasi Publik; Pelayanan Informasi Publik; Layanan Hubungan Manusia; Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah; Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas; dan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi

Publik Pemerintah Daerah Provinsi. Jumlah informasi yang diproduksi dan disebar melalui media sebanyak 540 informasi, jumlah sengketa informasi yang terselesaikan sebanyak 9 kasus.

Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pusat Data sudah sebanyak 43 Perangkat daerah. Artinya, belum semua Perangkat Daerah di provinsi NT yang menggunakan layanan ini. Sedangkan jumlah simpul jaringan perangkat Daerah yang terkoneksi sebanyak 18 Perangkat Daerah.

- f. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Persentase Layanan Berbasis TIK dengan target 50%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan meliputi Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi; Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah; dan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- g. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi dengan target 25%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dengan sub kegiatan meliputi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Dieminasi Data Statistik Sektoral; Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi; Membangun Metadata Statistik Sektoral; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral; dan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah).
- h. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah dengan target 40%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi; Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi; Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik; dan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi); dan Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi).
- i. Program Perencanaan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator kinerja Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja dengan target 85%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.

- j. Program Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Pengembangan Minat dan Budaya Baca dengan target kinerja 100%. Realisasi untuk pengembangan minat dan budaya baca sudah mencapai 50 persen sampai triwulan II ini. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan realisasi 35 perpustakaan sudah dibina dan dikembangkan dan kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi dengan realisasi 4 kegiatan pengembangan minat dan budaya baca sudah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Sub kegiatan untuk kegiatan pertama yaitu Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik; Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi; Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan; Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka; dan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi. Sedangkan sub kegiatan untuk kegiatan kedua yaitu Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat; Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi; dan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial.

- k. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR Dan Naskah Kuno Milik Daerah. Target untuk program ini sebesar 100% dengan 50%. Bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 3 kegiatan dengan 6 sub kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi dengan indikator kinerja jumlah pengelolaan karya cetak karya rekam. Realisasi untuk kegiatan ini sudah sebanyak 250 judul koleksi deposit sudah tersedia. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Kegiatan kedua yaitu Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi. Realisasi untuk kegiatan ini sebesar 350 eksemplar. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah; dan Penerbitan Bibliografi Daerah. Kegiatan ketiga yaitu Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi dengan sub kegiatan : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno; dan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan.

- l. Program pelayanan Penghubung pada Badan Penghubung Daerah dengan indikator kinerja angka kunjungan wisatawan pada anjungan NTB TMII. Target untuk program ini sebesar 41.000 orang dengan realisasi sampai triwulan II sebanyak 3.711 orang wisatawan yang berkunjung. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Kegiatan Fasilitas

Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.

10. **Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat** dengan Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup dengan target sebesar 67,08 Tahun. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai Triwulan II Tahun 2022. Sasaran ini dilaksanakan melalui:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi (target 85%), Persentase balita Wasting (target 11,41% dengan realisasi 6,78%), Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar (target 75% dengan realisasi 62,7%), Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB (target 100% dan realisasi 100%), Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80% (target 90% dan realisasi 100%), Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional, Persentase Penyelesaian Data dan Informasi Kesehatan Daerah (target 100% dan realisasi 100%), Persentase Puskesmas Yang di Bina Mampu melaksanakan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Keluarga (KIA, PKPR, PKRET, Lansia) sesuai Standar (target 80% dan realisasi 40%), Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga (target 65% dan realisasi 70%), Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana (target 100%), Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB (target 100%).

Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya); Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya; dan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya); Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga; Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus; Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; Pengelolaan Surveilans Kesehatan; Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota; Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan; Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas; Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota; Operasional Pelayanan Rumah Sakit; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik; Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional; Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan); Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi; Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan; dan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet); Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit); Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) dan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan) ; Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan).

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target sebesar 2,5% dan realisasi 0,27%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi. Realisasi untuk kegiatan ini sebanyak 11 dokumen dengan didukung oleh sub kegiatan pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kegiatan selanjutnya yaitu Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi. Kegiatan ini sudah terealisasi sebanyak 104 Sumber Daya Manusia (SDN) yang ditingkatkan kompetensinya. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat dengan target capaian sebesar 90%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) (sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK); dan Kegiatan

- Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional).
- d. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB dengan target kinerja sebesar 85%.
 - e. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target. Target untuk program ini sebesar 75% dengan capaian 77,27%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari tiga kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Sebanyak 24,14% fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan sudah tersedia. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. Kegiatan ini sudah terealisasi sebesar 74,53% masyarakat yang terlayani. Kegiatan ketiga yaitu Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan didukung oleh sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.
 - f. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target. Target untuk program ini sebesar 78%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 2 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Sub kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit; Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit; Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan; Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit; dan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya). Kegiatan kedua yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Sub kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus; dan Operasional Pelayanan Rumah Sakit. Kegiatan ketiga yaitu Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan).
 - g. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir dengan indikator Kinerja Persentase SPM yang mencapai target (target capaian: 78%). Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan); dan Penyediaan Layanan

Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit).

Jumlah alat kesehatan/kedokteran yang tersedia di Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir sebanyak 42 unit, Jumlah jenis obat dan BMHP yang tersedia sebanyak 12 jenis, dan Jumlah gedung yang terpelihara sebanyak 2 unit.

11. **Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat** dengan Indikator Kinerja Persentase Balita Stunting dengan target kinerja sebesar 30,99%. Realisasi untuk sasaran ini mencapai 22,03%, sehingga tingkat capainnya menjadi 128,04%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase balita Wasting. Target balita wasting di NTB sebesar 11,41% dengan realisasi 6,78%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak; dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas dengan target capaian sebesar 70%. Program ini didukung melalui 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah kab/kota yang memiliki kebijakan germas. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi. Kegiatan kedua yaitu Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja Jumlah Saluran Media yang digunakan dalam penyebarluasan informasi Kesehatan.

12. **Sasaran Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan** dengan Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah (Target sebesar 13,73 Tahun) ; dan Rata rata Lama Sekolah (Target sebesar 7,04 Tahun). Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai Triwulan II Tahun 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (Target kinerja : 99,95%); Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (Target kinerja : 94,38%); Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah (Target kinerja : 97,57%); Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB (Target kinerja : 70%); Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah (Target kinerja : 1%); Ratio Guru terhadap Murid

Pendidikan Menengah (Target kinerja : 1:18); dan Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB (Target kinerja : 1:12). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (sub kegiatan : Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru); Penambahan Ruang Kelas Baru; Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah; Rehabilitasi Asrama Sekolah; Pengadaan Mebel Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas); Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (sub kegiatan : Penambahan Ruang Kelas Sekolah; Pembangunan Ruang Praktik Siswa; Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah; Pengadaan Mebel Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Sekolah; Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa; Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan); Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus (sub kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik; Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus; Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus; dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus).

- b. Program Pengembangan Kurikulum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kurikulum (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dengan Sub kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah; dan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah.
- c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV dengan target 100%; Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV (Target kinerja : 99.58%); Persentase Kepala Sekolah bersertifikat (Target kinerja :

- 100%); Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat (Target kinerja : 60%); Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) (Target kinerja : 6%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi. Ketersediaan data hasil pemetaan pendidik sudah mencapai 50% sam[ai triwulan II Tahun 2022 ini. Sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini yaitu Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan (Target kinerja : 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (sub kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat); Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (sub kegiatan : Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat).
- e. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan. Target program ini sebesar 35% . Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi.
- f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator kinerja Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi (Target kinerja : 100% dan realisasi 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dengan indikator Pelatihan kecakapan pemuda yang sudah dilaksanakan untuk 160 orang. Sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini yaitu Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi; Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera; Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi; Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi; dan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.

Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional sudah dilaksanakan untuk 48 orang, Jumlah Organisasi Kepemudaaan yang difasilitasi sebanyak 29 orang, dan Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Kepemimpinan, Kepoloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda sudah dilaksanakan untuk 20 orang.

- g. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan indikator kinerja Presentase Pembinaan Altlet Berprestasi (Target kinerja 100% dan realisasi 100%). Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini sebanyak 4 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi). Sarana prasarana untuk kegiatan olahraga yang terstandar sudah terealisasi sebanyak 33%. Kegiatan kedua yaitu Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga (sub kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi; dan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan SingleEvent). Jumlah medali yang diperoleh oleh Provinsi NTB sudah mencapai 33 medali. Kegiatan ketiga yaitu Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional (sub kegiatan : Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)). Cabang olahraga yang dibina oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 3 Cabang. Kegiatan Keempat yaitu Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan (sub kegiatan : Pengembangan Organisasi Keolahragaan).

13. Sasaran Meningkatkan Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air ,Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Laut. Target masing-masing indikator tersebut adalah sebesar 42,93 poin; 87,56 poin; dan 87,63 poin. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai Triwulan II Tahun 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan. Target dan realisasi untuk program ini sudah mencapai 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dengan realisasi 2 Dokumen RPPLH, IKPLHD, dan IKLH yang disusun. Sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini yaitu Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi; dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi. Kegiatan selanjutnya yaitu Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi dengan realisasi 7 dokumen KLHS yang

- disusun dan divalidasi. Sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini yaitu Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang; dan Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD; dan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup).
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase usaha/kegiatan yang melakukan pengendalian pencemaran dengan target 100% dan Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya dengan Target kinerja sebesar 10 lokasi. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang sudah terealisasi sebesar 120 titik sampe yang sudah dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup. Sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini yaitu Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Pembuatan dengan (sub kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat).
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase taman kehati yang terkelola dengan target kinerja 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase Unit Usaha Penghasil Limbah B3 yang tertib aturan. Target untuk program ini sebesar 90%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengumpulan Limbah B Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil pengawasan ketaatan ijin lingkungan dengan target dan realisasi kinerja 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan realisasi 3 unit usaha pemegang izin lingkungan yang dibina dan diawasi. Sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini yaitu Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban

- Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwijaya tingkat nasional. Target program ini sebesar 10%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.
 - g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase pengaduan yang terselesaikan dengan target sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.

14. Sasaran Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan target 68,7 poin.

Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai Triwulan II Tahun 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui:

- a. Program Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi (Target dan realisasi kinerja sebesar 41%) dan Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola (Target kinerja sebesar 10% dengan realisasi 8,94%). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dengan realisasi 70% dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan realisasi 1 data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung; dan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan) ; Pelaksanaan

Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan realisasi 41 % luasan kawasan hutan yang terlindungi (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL); Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara; Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara; dan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dengan realisasi 12 unit pengolahan HHBK (sub kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan; dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun dengan realisasi 4 industri HHBK yang dibina dan diawasi (sub kegiatan : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun); Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara dengan realisasi 2.869 Ha luas lahan kritis yang direhabilitasi (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL), Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara, Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara, Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan).

- b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi (Target kinerja dan realisasi sebesar 30503.3 Ha). Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi dengan realisasi 1 unit taman hutan raya yang dikelola (sub kegiatan : Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi; Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi; Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi; Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi; Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi; dan Perencanaan Pengelolaan TAHURA); Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi dengan realisasi 24 penangkar TSL non appendix yang tertib aturan (sub kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES); Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dengan realisasi 8 kelompok cagar biosfer dan geopark yang terkelola (sub Kegiatan: Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi; dan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi).

- c. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase KTH yang meningkat kelasnya dengan target kinerja sebesar 5,49%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan; Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan; dan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial.
- d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas dengan target kinerja sebanyak 32 DAS. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS; Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS; dan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS.
- e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Target kinerja 18,18%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (sub Kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota); Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dan Sistem Informasi Penataan Ruang); Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang).

15. **Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan** dengan Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sampah dan Persentase Pengurangan Sampah. Target kinerja masing-masing indikator sebesar 60% dan 25% dengan realisasi 60% dan 9,34%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

Program Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Persentase pengelolaan sampah dengan Target dan realisasi sebesar 85%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional dengan target sebesar 60%. Realisasi untuk kegiatan ini sebesar 39,68% dengan sub kegiatan Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional; Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus; Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional; dan Kerjasama

Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional. Kegiatan kedua yaitu Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional dengan target dan realisasi sebesar 60%. Sub kegiatan untuk kegiatan ini yaitu Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus.

16. Sasaran Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan dengan Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi dengan target kinerja sebesar 15.428 Milyar Rupiah. Realisasi untuk sasaran ini sebesar Rp. 4.985 Milyar Rupiah dengan tingkat capaian sebesar 32,31 persen. Sasaran ini dilaksanakan melalui:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investor dengan target sebesar 5%. Untuk mendukung program ini dilakukan 2 kegiatan dengan 4 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman. Kegiatan kedua yaitu Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi, Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi dan sub kegiatan Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi.
- b. Program Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal. Target kinerja untuk program ini sebesar 100%. Program ini didukung dengan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi; dan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi.
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan (Target kinerja : 90 % dengan realisasi 89%). Adapun kegiatan yang dilakukan sebanyak 2 kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 4 poin. Kegiatan pertama yaitu Penanaman modal yang ruang lingkungannya lintas kabupaten/ kota. Sudah sebanyak 4 izin kewenangan Provinsi lintas Kab/Kota yang terealisasi dengan didukung oleh Sub kegiatan Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kegiatan kedua yaitu Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, Pemantauan

pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal, dan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah (Target kinerja: 55 % dengan realisasi 13%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan didukung 3 sub kegiatan, yaitu Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal, Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Adapun jumlah perusahaan yang menyampaikn LKPM sudah terealisasi sebanyak 13 perusahaan.
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Cakupan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi (Target kinerja : 100 %). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Urusan pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

17. Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas dengan Indikator Kinerja Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan dengan target sebesar 23,71%. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai Triwulan II Tahun 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Pertumbuhan Populasi Ternak dengan target kinerja 9,5%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor dengan realisasi 10 toko/depo distributor obat hewan yang diawasi (sub kegiatan : Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan; dan Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan); Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (sub kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain; dan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain); Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan

Kewenangan Provinsi; dan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi); Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak; Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan; dan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak); Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan).

- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan dengan target kinerja sebesar 9,5%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penataan Prasarana Pertanian (sub kegiatan : Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan; dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya); Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak; dan Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak).
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS dengan target kinerja <1%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan realisasi 5 PHMS yang dikendalikan (sub kegiatan : Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis; Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; dan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular); Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi dengan realisasi 73 unit usaha produk peternakan/RPH/RPU/TPH diawasi (sub kegiatan : Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan; Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan; dan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi); Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan dengan realisasi 5 RPH dan kelompok pengolah hasil peternakan yang tersertifikasi (sub kegiatan : Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit; Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan; dan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan

- dan Kesehatan Masyarakat Veteriner); Kesejahteraan Hewan (sub kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya).
- d. Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian); dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan (sub kegiatan : Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna; Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani; Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani; dan Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani).
- e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitas Sarana Pertanian dengan target kinerja sebesar 1,99%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (sub kegiatan : Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian); dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman (sub kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih; dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura; Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan; dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan).
- f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian dengan target kinerja sebesar 65,56% serta indikator dan Pengembangan Fasilitas Industrialisasi Pertanian dengan target dan capaian 2 unit/paket. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penataan Prasarana Pertanian dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya; dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya.
- g. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI dengan target kinerja sebesar 96%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsid dengan sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
- h. Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase kelompok tani yang

meningkat skor kelas kelompok dengan target kinerja sebesar 70%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN; dan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta); dan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani).

- i. Program Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Peningkatan presentase kawasan hutan yang dikelola dengan target kinerja sebesar 10%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung; dan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan); Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL); Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara; Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara; dan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan); Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (sub kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan; dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (sub kegiatan : Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati; dan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun (sub kegiatan : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun).
- j. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Cakupan wilayah laut, pesisir dan PPK yang terkelola secara berkelanjutan dengan target dan capaian kinerja sebesar 4,51%.

Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi dengan realisasi 126.311 Ha luas ruang laut dan pesisir yang terkelola (sub kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat; Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil); Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi; dan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi).

- k. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi Perikanan Tangkap dengan target kinerja sebesar 249.099 Ton dan realisasi sebesar 234.423 Ton produksi perikanan tangkap. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan Mil (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan; Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap; Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap); Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas GT Sampai Dengan GT (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT; Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT; Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT); Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil; dan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh nelayan kecil); Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT; dan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT); Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (sub kegiatan : Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan; Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan); Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas GT sampai dengan GT (sub kegiatan : Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT); Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas GT Sampai Dengan GT (sub kegiatan :

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas GT Sampai Dengan GT; Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT; Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan GT).

- i. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi Perikanan Budidaya dengan target kinerja sebesar 1.219.005 Ton. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan); Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (sub kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di laut; Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut; Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi).
- m. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan (Target kinerja : 99,92%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan Mil dengan sub kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan Mil; Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan Mil; Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 mil)
- n. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi olahan hasil perikanan dengan target kinerja sebesar 214.373 Ton. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam (satu) daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (sub kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya

Saing); Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi; dan Pemberian insentif bagi pelaku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah).

18.Sasaran Meningkatkan jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin

dengan Indikator Kinerja Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan dengan target dan realisasi kinerja sebesar 100%. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai Triwulan II Tahun 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Target capaian untuk indikator ini sebesar 85%. Program ini didukung melalui 5 kegiatan dan 14 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit, Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan, Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan, dan Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan. Kegiatan kedua yaitu penyediaan layana kesehatan untuk KP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga; Pengeloaan Kesehatan Lingkungan; Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK); Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA; Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus; Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; Pengelolaan Surveilans Kesehatan; Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota, Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan; Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas;

Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten / Kota; operasional Pelayanan Rumah Sakit; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik; Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional; dan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan. Kegiatan ketiga yaitu Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan; dan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet. Kegiatan ketiga yaitu Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator kinerja jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.

- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani (Target kinerja 100% dan realisasi 45%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal. Sejumlah 179 PMB, KPO dan KTK yang sudah dipulangkan ke daerah asal. Sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini yaitu melalui Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.
- c. Program Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani (Target kinerja 3,5% dengan realisasi 0,13%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti dengan realisasi 400 penyandang disabilitas terlantar yang ditangani (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Alat Bantu; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar); Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti dengan realisasi 1 orang (sub kegiatan : Pengasuhan; Penyediaan Makanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial; Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar; Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar ; Anak Terlantar di dalam Panti); Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama yang mudah Diakses; Penyediaan Alat

Bantu; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga; Pemulasaraan); Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar; Pemulangan ke Daerah Asal; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti); Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti (sub kegiatan : Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang; Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses; Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti; Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial; Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari; emberian Bimbingan Keterampilan Dasar; Pemulangan ke Daerah Asal; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA).

- d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial dengan indikator Kinerja Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (Target kinerja 100% dan realisasi 45%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (Su kegiatan : Pengangkatan Anak antar WNI, Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal); dan Kegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat).

Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang tertangani melalui bantuan sosial kelompok sebanyak 575 KK.

19.Sasaran Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan dengan Indikator Kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dengan target kinerja sebesar 86,70 poin dengan realisasi 90,40%. Sasaran ini dilaksanakan melalui:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan dengan target dan realisasi kinerja sebesar 79,62%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan; Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur; dan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.

- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis dengan target dan realisasi kinerja sebesar 100%. Program ini didukung dengan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Indikator kinerja untuk program ini adalah Tingkat akurasi data laporan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan dengan realisasi 100%. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan, dan Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan. Kegiatan kedua yaitu Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi dengan indikator kinerja kadar air maksimal cadangan pangan pemerintah. Realisasi untuk kegiatan ini sebesar 14% dengan didukung oleh su kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Kegiatan ketiga yaitu Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi. Indikator kinerja untuk program ini adalah Rasio konsumsi sayur dan buah terhadap konsumsi ideal dengan realisasi 96,9%. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BSA).
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) dengan target kinerja sebesar 5,77% dan realisasi 2,97%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi dengan realisasi 10% daerah rentan rawan pangan yang difasilitasi. Kegiatan ini didukung oleh Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi; dan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi.
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan indikator Kinerja Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan dengan target kinerja sebesar 85% dan realisasi 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (realisasi 100% tingkat akurasi informasi pangan segar berbasis data pengawasan) dengan sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi. Kegiatan kedua yaitu Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (realisasi 80% tingkat akurasi pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dengan indikator kinerja Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ketiga yaitu Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (realisasi 80% tingkat akurasi pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dengan realisasi 80%) dengan sub kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan).

20. Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Cakupan Air Minum dengan target kinerja sebesar 78,45% . Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai Triwulan II Tahun 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator Kinerja Cakupan air minum dengan target kinerja sebesar 78,45%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; dan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan.

21. Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak dengan target kinerja sebesar 80,91%. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai Triwulan II Tahun 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar dan target sebesar 97%. Kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
- b. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) pada Dinas Perumahan dan Permukiman dengan indikator Kinerja Luas kawasan permukiman yang berkualitas dan target 84.488 Ha. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman; dan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.

22. Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi dengan target dan realisasi kinerja sebesar 99,88%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengelolaan Energi Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator Kinerja Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik

dengan target kinerja sebesar 5,64%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun; Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun); Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi (sub kegiatan : Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi; Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi ; Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi).

- b.** Program Pengelolaan Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dengan target kinerja sebesar 99,88%. Indikator kedua yaitu Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga) dengan indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi; dan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi); Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi; dan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi); Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Pedesaan (sub kegiatan : Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu; dan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan).

23.Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) dengan target kinerja sebesar 65,80%. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai Triwulan II Tahun 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

Program Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman dengan 2 indikator Kinerja yaitu Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi; dan Rumah tangga yang menempati hunian layak. Target masing-masing indikator yaitu 100% dan 98,86%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana; Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi); Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana; dan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP); dan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (sub kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana).

- 24.Sasaran Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok** dengan Indikator Kinerja Inflasi dengan target kinerja sebesar 3-4%. Realisasi untuk sasaran ini sebesar 5,04 persen sehingga tingkat capaiannya sebesar 32 persen. Sasaran ini dilaksanakan melalui:
- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting dengan target kinerja sebesar 70%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor (sub kegiatan : Fasilitasi pemenuhan komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik); Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi. Sebanyak 4 Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-Bahan Berbahaya (B2) sudah diterbitkan Bagi Distributor. Sub kegiatan untuk kegiatan ini yaitu Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kegiatan kedua yaitu Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar dengan realisasi 6 usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar sudah dikendalikan. Sub kegiatan untuk kegiatan ini yaitu Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya; dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya. Kegiatan ketiga yaitu Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal

Importir (API) dengan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA).

- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dengan target kinerja sebesar 4% dan realisasi 4,46%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi dengan realisasi 32 komoditi Bapokting yang Terjamin Ketersediaan Stock dan Harganya di Tingkat Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor); Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan. Realisasi untuk kegiatan ini sebanyak 32 komoditi sudah terkendali stock dan harganya di Kabupaten/kota melalui sistem informasi (sub kegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota; dan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi); Pengawasan Pupuk Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan penggunaan Pupuk Berbersubsidi di Wilayah Kerjanya dalam sistem informasi perdagangan (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pesticida; Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi; Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pesticida Tingkat Daerah Provinsi; dan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi).
- c. Program Pengembangan Ekspor pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang dengan target kinerja sebesar 5% dan realisasi -39%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada (satu) daerah kabupaten/kota. Sejumlah 3 UKM berorientasi ekspor unggulan terpromosi dagang. Sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini yaitu Pameran Dagang Internasional/ Nasional; Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor ; Misi Dagang Bagi Pelaku Ekspor Unggulan ; Pameran Dagang Lokal; Peningkatan Citra Produk Ekspor.
- d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Penyelesaian Sengketa dengan target kinerja sebesar 85% dan realisasi 90%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota. Dengan realisasi 2 kasus sengketa konsumen yang ditangani (sub kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen; Pemberdayaan konsumen dan kelembagaan

perlindungan konsumen;Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen); Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Fasilitasi penganganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen; Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan dan/jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen_; dan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Verifikasi Mutu Produk; Pengembangan Layanan Pengujian; Pengembangan Layanan Sertifikasi; Pengembangan Layanan Kalibrasi).

- e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja persentase fasilitasi peningkatan kapasitas pemasaran kelompok UKM dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasi 20%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri dengan realisasi 40 produk dalam negeri yang terpromosi (sub kegiatan : Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi); Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan realisasi 12 jenis produk dalam negeri terpasarkan (sub kegiatan : Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi); dan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (sub kegiatan : Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; dan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan).

25.Sasaran Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

hidup dengan Indikator Kinerja Pengeluaran per Kapita dengan target kinerja sebesar 11.604 ribu rupiah. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai Triwulan II Tahun 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perdagangan dengan indikator Kinerja Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan target kinerja sebesar 100%. Program ini baru terealisasi seanyak 10% dengan didukung oleh kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas. Seluruh Kabupaten/Kota sudah menyediakan sarana prasarana distribusi perdagangan. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi; Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi; dan Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.

26.Sasaran Meningkatnya daya saing pariwisata dengan Indikator Kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum) (Rp. Miliar) dengan target kinerja sebesar 129,78 Milyar Rupiah. Realisasi untuk sasaran ini masih sedikit sejumlah Rp. 9 Milyar. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dengan indikator Kinerja Persentase desa wisata yang dikembangkan (target 85,85% dengan realisasi 67,68%) dan persentase geosite yang tertata (target 50%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Kawasan Strategis pariwisata Provinsi dengan realisasi 2 kawasan pariwisata yang dikembangkan (sub kegiatan : Pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi); Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan destinasi pariwisata provinsi); Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan realisasi 2 daya tarik destinasi pariwisata yang minimal berkembang (sub kegiatan : Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata).
- b. Program Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dengan indikator Kinerja efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan dengan target 2.000.000 orang dan realisasi 473.463 orang wisatawan sudah berkunjung ke NTB. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendorong kunjungan wisatawan adalah melalui Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi. Peningkatan kunjungan wisatawan mengalami penurunan dibanding tahun lalu sebesar -0,5%. Sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini yaitu Penguatan promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri; Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri; Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Dinas Pariwisata dengan indikator Persentase peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif dengan target sebesar 10%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif dengan realisasi 7,33% jumlah pelaku ekonomi kreatif mengalami peningkatan. Sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini adalah melalui Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif; Perluasan pasar produk kreatif baik di pasar ekspor maupun pasar domestik ; Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif; dan Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula.
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dengan indikator Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang dilatih dengan target kinerja sebesar 70%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Daya Manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan dengan sub kegiatan Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan; Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengembangan kamitraan pariwisata; Pelatihan berbasis kompetensi bidnag homestay dan pemandu wisata (tour guide) tingkat lanjutan.

- 27. Sasaran Meningkatnya daya saing industri** dengan Indikator Kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar) dengan target kinerja sebesar 173,02 Milyar Rupiah. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai Triwulan II Tahun 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :
- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi (Target kinerja 100% dan realisasi 10,74%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dengan realisasi 20 IKM yang sudah mendapatkan pembinaan. Sub kegiatan untuk mendorong kegiatan ini yaitu melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri. Kegiatan kedua yaitu Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dengan realisasi 20 IKM yang sudah mendapatkan pembinaan. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
 - b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah (Target kinerja : 140% dengan realisasi 1,42%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi. Realisasi untuk kegiatan ini yaitu sejumlah 20 perizinan dan perluasan usaha NTB yang terfasilitasi. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi.
 - c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional (Target kinerja 1% dengan realisasi 0,11%). Adapun kegiatan yang

dilakukan yaitu Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan realisasi 11,23% database IKM se-NTB sudah tercakup di dalam Sistem Informasi Industri Nasional. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas; Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas.

- d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator Kinerja Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha (Target kinerja : 6,35%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan dengan sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan.
- e. Program Pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator Kinerja Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya (Target kinerja : 53,53%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dengan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.
- f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan 2 indikator Kinerja yaitu Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi (Target kinerja 100% dan realisasi 100%); dan Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat (Target kinerja 100% dan realisasi 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi; Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera; Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi; Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi; Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.

28.Sasaran Menurunnya pengangguran terbuka dengan Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target kinerja sebesar 3,19%. Realisasi untuk sasaran ini

sebesar 3,92 persen sehingga tingkat capaiannya sebesar 77,12 persen. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi dengan target kinerja sebesar 17% dan realisasi 7,27%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dengan realisasi 32 orang Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi (sub kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi); Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan realisasi 30 LPK yang sudah disurvei dan dinilai (sub kegiatan : Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja); Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (sub kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (DBHCHT)); Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja).
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan dengan target kinerja sebesar 51,09% dengan realisasi 7,27%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota (sub kegiatan : Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal)); Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (sub kegiatan : Job Fair / Bursa Kerja); Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi dengan realisasi 470 orang PMI/Pencari kerja yang ditempatkan (sub kegiatan : Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia; Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran; Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan); Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi dengan realisasi 60 perpanjangan IMTA yang diterbitkan (sub kegiatan : Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi).
- c. Program Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perusahaan dengan target kinerja sebesar 22% dengan realisasi 12%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di (Satu) Daerah Provinsi dengan realisasi 38 perusahaan dan pekerja yang dibina (sub kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I

(Satu) Daerah Provinsi; Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi); Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten /Kota (UMSK) dengan realisasi 6 dokumen UMP/UMK sudah disahkan (sub kegiatan : Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan UMK).

- d. Program Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Kinerja Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3 dengan target kinerja sebesar 22% dan realisasi 18,58%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan realisasi 444 perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan. Sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini yaitu Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan; Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan; Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan.

29. Sasaran Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat dengan

Indikator Kinerja Persentase penurunan konflik social dengan target kinerja sebesar 20%. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai Triwulan II Tahun 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik dengan target kinerja sebesar 10%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan ; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
- b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik dengan target kinerja sebesar 10,53%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Pelaksanaan Kebijakan berupa hibah kepada Lembaga yang difasilitasi, Honorarium Jejaring Deteksi Dini dan Cegah Dini Gangguan Keamanan; Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Pelaksanaan kegiatan berupa Rapat Koordinasi FKDM, Rapat Koordinasi Tim Terpadu PKS, Rapat Tim Pengawasan Orang Asing dan Bimtek Dasar Intelejen; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Output kegiatan berupa Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah.; Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi. Pelaksanaan Kegiatan berupa Honorarium Forkopimda, Honorarium Tim Koordinasi Pembinaan dan Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

- c. Program Kesejahteraan Rakyat pada Biro Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Kinerja Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual (Kali) (sub kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual (Kali); dan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spritual (Lembaga)); Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (Dokumen) (sub kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen); Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen); Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Pada capaian kinerjanya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)); Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (Dokumen) (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dokumen); Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen); Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)).
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Kinerja Persentase Lembaga Adat Aktif (target kinerja sebesar 65%); Persentase Bumdes Berprestasi (target kinerja sebesar 27% dengan realisasi 53,44%); Persentase Pokja Posyandu aktif (target kinerja sebesar 80%); Persentase Posyantek yang aktif (target kinerja sebesar 56,41%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

- e. Program Pengembangan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan (Target kinerja : 72,73%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan); Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya); Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat; Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat).
- f. Program Pengembangan Kesenian Tradisional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator Kinerja Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional. Target program ini sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional.
- g. Program Pembinaan Sejarah dengan indikator Kinerja Cakupan pembinaan sejarah dan Target kinerja 100%. Sub kegiatan yang dilakukan yaitu Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi; dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah.

30. Sasaran Meningkatkan Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah dengan target kinerja sebesar 5,72% dengan realisasi 55%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Kinerja Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (target dan realisasi kinerja sebesar 100%); dan Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (target dan realisasi kinerja sebesar 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan realisasi 3 kasus Pelanggaran Trantibum yang ditangani (sub kegiatan : Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan; Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah); Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan realisasi 3 kasus pelanggaran produk hukum daerah yang ditangani (sub kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur); Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS; dan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS); Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan realisasi 3 kasus pelanggaran Trantibum yang ditangani (sub kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan; Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa; Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi); Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan realisasi 3 pelanggaran produk hukum daerah yang ditangani (sub kegiatan : Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur)
- b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba) dengan target kinerja sebesar 68,96%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan

Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

- c. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum pada Biro Hukum dengan indikator Kinerja Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi yang berkualitas (target 100% dan realisasi 100%); Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang berkualitas (target 100% dan realisasi 100%); Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Pertama (target 100% dan realisasi 6%); Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Banding (target 100% dan realisasi 1%); Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Kasasi (target 100% dan realisasi 3%); Persentase Perkara Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan melalui mediasi (target 100% dan realisasi 1 %); Persentase Produk Hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat di JDIIH, Media Sosial yang berkualitas (target 100% dan realisasi 48%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi dan evaluasi Produk Hukum Daerah, MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan realisasi 100% produk Hukum Daerah, MoU dan Perjanjian Kerjasama sudah difasilitasi dan dievaluasi. Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan; Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan; pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya; Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota. Kegiatan kedua yaitu Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM dengan indikator kinerja persentase kasus-kasus hukum yang terfasilitasi. Realisasi kinerja untuk kegiatan ini sebesar 60% dengan didukung oleh sub kegiatan Sub kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum; dan Sub kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Non Litigasi dan HAM.

31. Sasaran Meningkatnya kesadaran politik masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik dengan target kinerja sebesar 90%. Realisasi untuk sasaran ini belum dapat dihitung karena Perangkat Daerah yang melaksanakan tidak melaporkan realisasinya sampai Triwulan II Tahun 2022 dan atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik dengan target kinerja sebesar 90%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum

Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.

- b. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan indikator Kinerja Persentase Ormas yang aktif dengan target kinerja sebesar 81,35%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah; Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

32.Sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dengan Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan (target kinerja sebesar 19,27% dan realisasi 27,13%) dan Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak (target kinerja sebesar 80% dan realisasi 50%). Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Persentase PD yang menerapkan PPRG dengan target kinerja sebesar 52,17%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi; Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi); dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi).

- b. Program Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif dengan target kinerja sebesar 75,52%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi); Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota); dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi; dan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi).
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Keluarga (Target kinerja : 5%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi; dan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi.
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Dokumen Gender dengan target kinerja sebesar 1 dokumen. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi.
- e. Program Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Kinerja Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan target kinerja sebesar 80% dan realisasi 60%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi dengan realisasi 130 orang peserta advokasi dan temu anak sudah dilaksanakan. Sub kegiatan untuk mendukung kegiatan ini melalui Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha

Kewenangan Provinsi; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi.

- f. Program Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator kinerja Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Target kinerja : 68,15%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota (sub kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi; Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi; Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi; Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (UPTD)); dan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi).

4.2 Capaian RPJMD Provinsi NTB 2019-20223 sampai tahun 2022

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, telah ditetapkan sebanyak 103 Indikator Kinerja Daerah (IKD) tersebut sampai dengan tahun 2022 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Pada tahun 2022 tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022	
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	119.41	
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.63	
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas				Point	79.84
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	85.36	
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	52.17	
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	86.86	
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	BB	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	36.97	
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (76,01 - 80,00)	
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.70	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.53	
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	72.43	
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.08	
					Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	30.99	
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan				Point	62.74
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.73	
					Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.04	
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	68.22	
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	42.93	
					Indeks Kualitas Udara	Point	87.56	
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	70.89	
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	68.70	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022		
			Neraca pengelolaan sampah			%	85.00		
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	60.00		
					Persentase Pengurangan Sampah	%	25.00		
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	74.68		
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	15,428		
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.71		
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100		
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.70		
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	78.45		
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.91		
					Rasio Elektrifikasi	%	99.88		
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	65.80		
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0		
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11,604		
				Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)			%	3.00
						Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	129.78
				Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	7.50
		Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan			Rp. Miliar	173.02		

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.19
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakhlak dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	14.05
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	20.00
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.72
			Partisipasi politik masyarakat			%	84.57
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.90
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	61.16
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	19.27
	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak		%	80			

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2022

Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022, 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja berdasarkan tabel diatas ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur pada tahun 2022. Adapun tingkat capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap Misi dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023	OPD Pelaksana
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian		
1	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.63			0.65	BPBD, Dinsos
2	Persentase Kemantapan jalan	%	85.36	0.00	0.00	86.6	Dinas PUPR
3	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	52.17	0.00	0.00	54.50	Dinas PUPR
4	Persentase konektivitas transportasi publik	%	86.86	88.57	101.97	89.14	Dishub
5	Opini BPK	Status	WTP			WTP	BPKAD
6	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	36.97	WTP	100.00	38.65	Bappeda

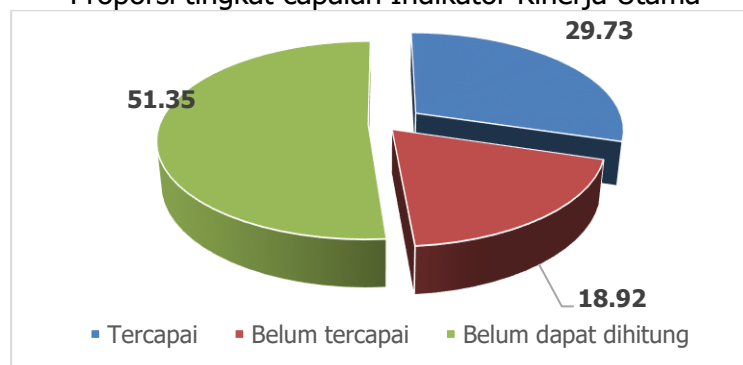
No	Indikator	Satuan	2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023	OPD Pelaksana
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian		
7	Nilai SAKIP		BB (76,01 - 80,00)	41.55	112.39	A (80,01 - 90,00)	Biro Organisasi, Inspektorat, Bappeda
8	Indeks Profesionalisme ASN		0.70	BB	100.00	0.72	BKD, BPSDM
9	Indeks Pelayanan Publik		4.53	0.00	0.00	4.55	Biro Organisasi, DMPTSP, Bappenda, Diskominfotik, Rumah Sakit
10	Angka Harapan Hidup		67.08	0.00	0.00	67.48	Dinkes, Rumah Sakit
11	Persentase Balita Stunting	%	30.99			30.49	Dinkes
12	Harapan Lama Sekolah		13.73	0.00	0.00	13.79	Dinas Dikbud
13	Rata rata Lama Sekolah		7.04	22.03	128.04	7.07	Dinas Dikbud
14	Indeks Kualitas Air		42.93	0.00	0.00	43.03	Dinas LHK
15	Indeks Kualitas Udara		87.56	0.00	0.00	87.59	Dinas LHK
16	Indeks Kualitas Air Laut		70.89			71.48	Dinas LHK
17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		68.70	0.00	0.00	69.70	Dinas LHK
18	Persentase Penanganan Sampah	%	60.00	0.00	0.00	70.00	Dinas LHK
19	Persentase Pengurangan Sampah	%	25.00	0.00	0.00	30.00	Dinas LHK
20	Nilai Realisasi Investasi		15,428	0.00	0.00	17,814	DPMPTSP
21	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.71	60.00	100.00	23.88	Distambun, Disnakeswan, Dislutkan, Dinas LHK
22	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100.00	9.34	37.36	100.00	Dinkes, Dinsos
23	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		86.70			87.20	DKP
24	Cakupan Air Minum	%	78.45	4,985	32.31	80.59	Dinas PUPR
25	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.91	0.00	0.00	82.46	Dinas PUPR, Dinkes, Dinas Perkim
26	Rasio Elektrifikasi	%	99.88	100.00	100.00	99.99	Dinas ESDM
27	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	65.80	90.40	104.27	68.95	Dinas Perkim
28	Inflasi	%	3,0 - 4,0	0.00	0.00	3,0 - 4,0	Disdag, Biro Perekonomian
29	Pengeluaran per kapita		11,603.52	80.60	99.62	11,943.70	Disdag
30	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan		129.78	99.98	100.10	137.24	Dispar

No	Indikator	Satuan	2022			Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023	OPD Pelaksana
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian		
	(Penyediaan Akomodasi & Makan Minum)						
31	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan		173.02	0.00	0.00	179.91	Disperin
32	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.19	5.04	32.00	3.17	Disnakertrans
33	Persentase penurunan konflik sosial	%	20.00	-	0.00	0.00	Bakesbangpol
34	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.72	8.80	6.78	6.07	Satpolpp
35	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.90	0.00	0.00	1.00	Bakesbangpol
36	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	19.27	3.92	77.12	20.47	DP3AP2KB
37	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80.00			100.00	DP3AP2KB

Sumber: Kemen-LHK, KemenPAN RB, BPS dan Perangkat Daerah Provinsi NTB

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja pada tahun 2022, diketahui bahwa sebanyak 11 indikator atau 29,73% telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2022, sedangkan 7 indikator atau 18,92% belum mencapai target, Sisanya sebanyak 19 indikator atau 51,35% belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Beberapa indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target diantaranya Persentase konektivitas transportasi public; Opini BPK; Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD; Nilai SAKIP; Persentase Balita Stunting; Persentase Penanganan Sampah; Persentase Pengurangan Sampah; Nilai Realisasi Investasi; Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan; Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi; Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak; Rasio Elektrifikasi; Inflasi; Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum); Tingkat Pengangguran Terbuka; Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah; Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan; Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak.

Grafik. 3. 1.
Proporsi tingkat capaian Indikator Kinerja Utama

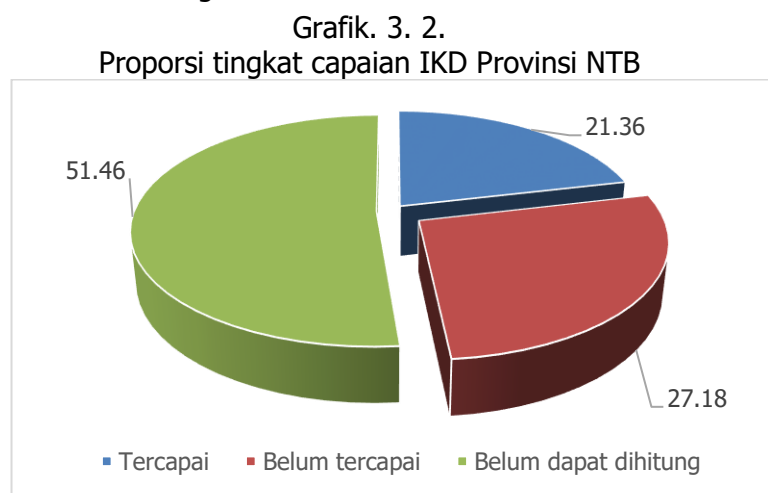


Sumber: data diolah

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Salah satu parameter keberhasilan pembangunan yang menunjukkan gambaran pencapaian pembangunan Daerah dan sebagai tolok ukur sejauh mana program-program yang digulirkan Pemerintah dapat mencapai sasaran-sasaran atau tujuan pembangunan, dapat diukur melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKD juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Capaian terhadap 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2022, dimana sebanyak 22 indikator atau 21,36 persen sudah sesuai target bahkan melampaui, 28 indikator atau 27,18 persen belum memenuhi target dan masih terdapat 53 indikator atau 51,46 persen belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.



Sumber: Perangkat Daerah, data diolah

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 103 indikator untuk mendeskripsikan ukuran kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan 5 indikator kinerja meliputi indikator Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam, Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

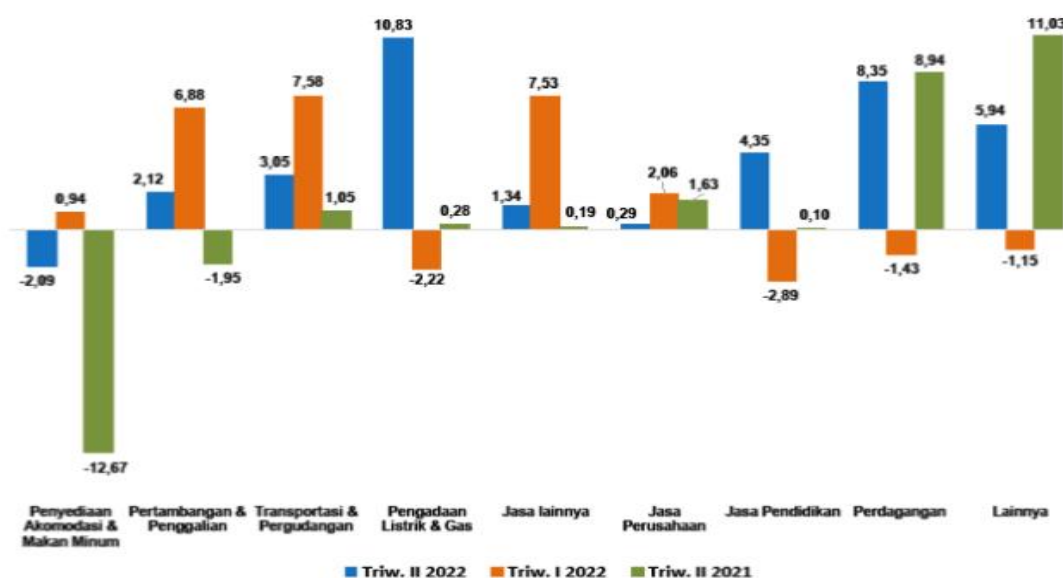
Adapun capaian indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 3.
Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	3,5-4,5	2.32	58.00
2	Inflasi	%	3,0 - 4,0	5.04	32.00
3	Tingkat Kemiskinan	%	12.77	13.68	92.87
4	Gini Ratio	Point	0.329	0.373	86.66
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	69.39		

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2022

Berdasarkan data hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Ekonomi Nusa Tenggara Barat triwulan II-2022 dibanding triwulan I-2022 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 5,04 persen. Pertumbuhan terjadi pada 14 (empat belas) lapangan usaha sedangkan 3 (tiga) lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,25 persen dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,14 persen. Selanjutnya, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh 10,83 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 8,35; dan Jasa Pendidikan tumbuh 4,35 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang terkontraksi yaitu Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 16,70 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 2,09 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,37.



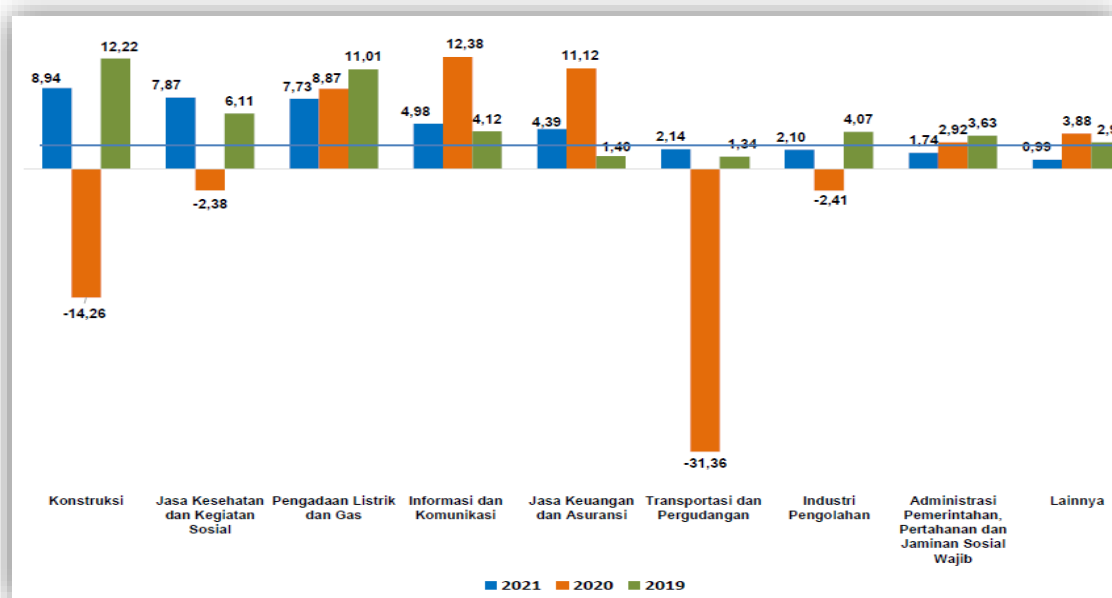
Grafik. 3. 3. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)

Sumber: BPS Provinsi NTB

Berdasarkan data hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Ekonomi NTB tahun 2021 terhadap tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 2,30 persen. Pertumbuhan ini di

antaranya didorong adanya event World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika, pada November 2021. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 8,94 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 67,60 persen. Ekonomi Nusa Tenggara Barat triwulan IV-2021 dibandingkan dengan keadaan pada triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,16 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,14 persen. Pada sektor lain yang mengalami pertumbuhan yaitu sektor transportasi dan pergudangan, tumbuh 8,11 persen karena naiknya penunpangan transportasi udara dibandingkan triwulan IV tahun 2020. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, tumbuh 7,20 persen. Karena sektor pariwisata yang mengakibatkan peningkatan pada TPK (tingkat penghunian kamar hotel), serta pengunjung restoran. Sementara itu, sektor yang mengalami kontraksi yaitu pertambangan dan penggalian sebesar 0,15 persen.

Grafik. 3. 4.
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)



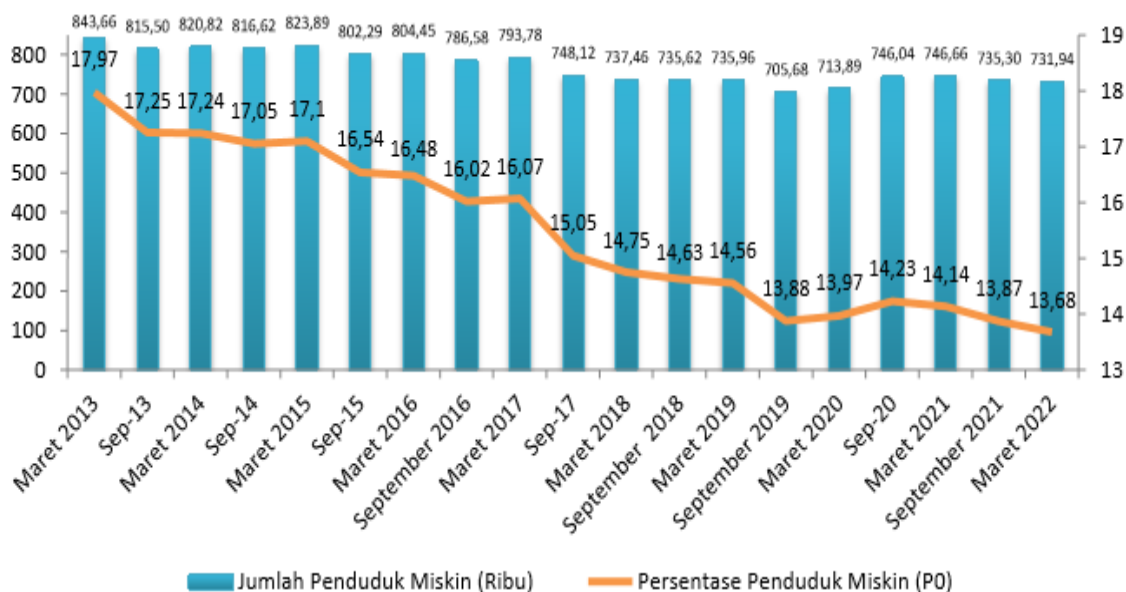
Sumber: BPS Provinsi NTB

Dari sisi pengeluaran, Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor yang tumbuh sebesar 19,71 persen. Komponen lain yang mengalami pertumbuhan adalah Komponen PKRT tumbuh sebesar 1,04 persen, Komponen PK-LNPRT tumbuh sebesar 1,23 persen, dan komponen PKP tumbuh sebesar 10,60 persen. Sedangkan beberapa komponen yang mengalami kontraksi antara lain Komponen PMTB yang mengalami kontraksi sebesar 2,30 persen. Sementara itu, Komponen Impor yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran tumbuh sebesar 7,87 persen..

Pada indikator kemiskinan mengalami penurunan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi NTB, Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada Maret 2022 mencapai 731,94 ribu orang. Dibandingkan September 2021, jumlah penduduk miskin turun 3,36 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2021, jumlah penduduk miskin turun sebanyak

14,72 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sebesar 13,68 persen, menurun 0,19 persen poin terhadap September 2021 dan turun 0,46 persen poin terhadap Maret 2021. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2021–Maret 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan turun menjadi 381,84 ribu orang, sedangkan di perdesaan naik menjadi 350,09 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 14,54 persen menjadi 14,10 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 13,12 persen pada September 2021 menjadi 13,24 persen pada Maret 2022..

Grafik. 3. 5.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di NTB

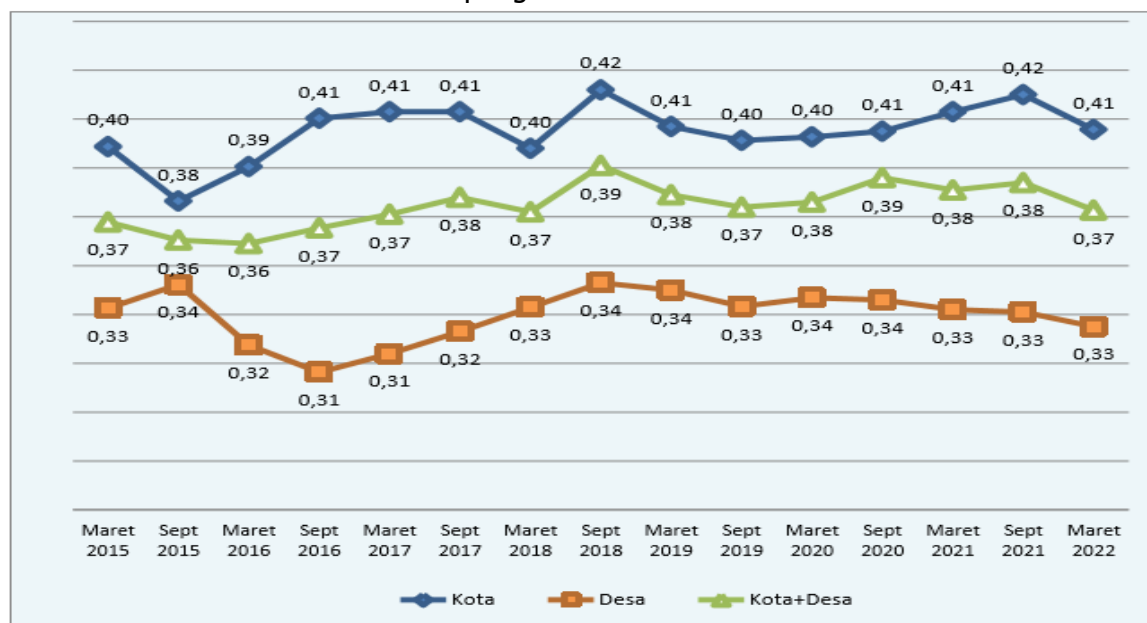


Sumber: BPS Provinsi NTB

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 2 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2021 sampai dengan Maret 2022. Garis Kemiskinan pada Maret 2022 adalah sebesar Rp459.826,- per kapita per bulan. Dibandingkan September 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,10 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2021, terjadi kenaikan sebesar 8,58 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 3 bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2022 sebesar 74,55 persen.

Pada sisi tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh Gini Ratio, Pada Maret 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di NTB adalah sebesar 0,373. Angka ini menurun 0,011 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang sebesar 0,384 dan menurun 0,008 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,381.

Grafik. 3. 6.
Ketimpangan Gini Ratio



Sumber: BPS Provinsi NTB

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2022 adalah sebesar 0,406 turun dari September 2021 yang sebesar 0,420. Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2022 adalah sebesar 0,325, lebih rendah dari September 2021 yang sebesar 0,331. Jika dilihat secara keseluruhan, sepanjang periode Maret 2015 sampai Maret 2022, Gini Ratio tertinggi adalah di daerah perkotaan sepanjang periode. Hal ini berarti bahwa ketimpangan pengeluaran di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan di Provinsi NTB sejak tahun 2015.

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada Maret 2022, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,60 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan September 2021 yang sebesar 17,59 persen dan Maret 2021 yang sebesar 17,35 persen. Jika dibedakan menurut daerah, pada Maret 2022 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 17,58 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 20,00 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan maupun daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah.

2. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing Provinsi NTB diukur menggunakan pendekatan 8 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 4.
Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Indeks Kriminalitas	Point	14.05	NA	
2	Indeks Aksesibilitas	Point	79.84	NA	
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	68.00	NA	
4	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana	%	89.69	NA	
5	Indeks Risiko Bencana	Point	119.41	NA	
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB	NA	
7	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.53	NA	

Sumber: Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2022

Terdapat 7 indikator untuk mengukur aspek daya saing daerah, yaitu Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesibilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, Indeks Resiko Bencana dan Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Pelayanan Publik. Seluruh indikator pada Aspek Daya Saing Daerah capaiannya belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan mewujudkan kondusifitas daerah, menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menyiapkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mewujudkan pelayanan publik yang paripurna.

Untuk meningkatkan daya saing daerah, juga perlu didukung oleh birokrasi lebih adaptif, cepat melayani, dan cepat mengambil keputusan dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Peningkatan kualitas birokrasi dilakukan dengan dua cara, yakni penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi birokrasi. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya juga perlu didukung oleh peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai SDM pemerintah.

3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum diukur dengan 91 indikator kinerja yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak

32 indikator, urusan pilihan sebanyak 20 indikator, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 18 indikator. Adapun capaian indikator-indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 5.
Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
C	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1.01	Pendidikan				
1	Indeks Pendidikan	Point	62.74	NA	
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.73	NA	
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.04	NA	
1.02	Kesehatan				
4	Indeks Kesehatan	Point	72.43	NA	
5	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	80.00	NA	
6	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.91	80.6	99.62
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.08	NA	
8	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	30.99	22.03	128.04
9	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	%	100	100	100.00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
10	Persentase Kemantapan jalan	%	85.36	NA	
11	Cakupan Air Minum	%	78.45	NA	
12	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	52.17	NA	
13	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	18.18	NA	
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
14	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	65.80	NA	
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
15	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.72	55	961.54
15	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100.00	100.00	100.00
16	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100.00	100.00	100.00
17	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	25.58	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
18	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.63	NA	
1.06	Sosial				
19	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	100.00	100.00	100.00
20	Persentase PMKS yang tertangani	%	5.12	2.52	49.22
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
2.01	Tenaga Kerja				
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.19	3.92	77.12
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
22	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	61.16	52.54	85.91
23	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90.49	90.5	100.01
24	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20.90	20.39	97.56
25	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	19.27	27.13	140.79
26	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80.00	50.00	62.50
2.03	Pangan				
27	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.70	90.40	104.27
2.04	Lingkungan Hidup				
28	Indeks Kualitas Air	Point	42.93	NA	
29	Indeks Kualitas Udara	Point	87.56	NA	
30	Indeks Kualitas Air Laut	Point	87.63	NA	
31	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	85.00	NA	
32	Persentase Penanganan Sampah	%	60.00	60.00	100.00
33	Persentase Pengurangan Sampah	%	25.00	9.34	37.36
2.05	Pertanahan				
34	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100.00	100.00	100.00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
35	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	rasio	0.86	0.99	114.88
35	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
36	Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan	%	31.28	6.37	20.36
37	Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri	%	88.00	94.53	107.42
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
38	Pertumbuhan Penduduk	%	1.00	1.82	18.00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
2.09	Perhubungan				
39	Persentase konektivitas transportasi publik	%	86.86	88.57	101.97
2.10	Komunikasi dan Informatika				
40	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kualifikasi	Transaksi	NA	
41	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	65	NA	
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
42	Persentase Koperasi Aktif	%	67.00	NA	
2.12	Penanaman Modal				
43	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	15,428	Rp4,985	32.31
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				
44	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	40	33	82.50
45	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	5	33.33
46	Proporsi wirausaha muda	%	68.28	NA	
2.14	Statistik				
47	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	50.00	NA	
2.15	Persandian				
48	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	III	NA	
2.16	Kebudayaan				
49	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	28.70	NA	
2.17	Perpustakaan				
50	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	100.00	50.00	50.00
51	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	35.87	34.76	96.90
2.18	Kearsipan				
52	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	83.33	73.08	87.70
3	URUSAN PILIHAN				
3.01	Kelautan dan Perikanan				
53	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4.75	4.76	100.30
54	Produksi Perikanan	Ton	1,468,104	373,560	25.45
55	Nilai Tukar Nelayan	%	>110	NA	
3.02	Pariwisata				
56	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	3.00	0.29	9.67
57	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	80.00	67.68	84.60
58	Rata-rata Lama Menginap	hari	3.25	2.03	62.46
59	Angka kunjungan wisatawan	orang	4,850,000	473,463	9.76

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
60	Persentase Geosites yang Tertata	%	37.50	NA	
61	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	129.78	90.12	69.44
3.03	Pertanian				
62	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.71	23.85	100.59
63	Nilai Tukar Petani	Point	>105	106.22	101.16
3.04	Kehutanan				
64	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	68.70	NA	
65	Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya	%	15.08	NA	
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral				
66	Rasio Elektrifikasi	%	99.88	99.98	100.10
3.06	Perdagangan				
67	Indeks Daya Beli	Point	74.68	NA	
68	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11,604	NA	
3.07	Perindustrian				
69	Pertumbuhan Industri	%	7.50	NA	
70	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	173.02	9.46	5.47
71	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	3.14	NA	
3.08	Transmigrasi				
72	Cakupan Penempatan Transmigran	%	95	NA	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	Administrasi Pemerintahan				
73	Ranking Nasional LPPD	Ranking	5	NA	
74	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	%	100.00	100.00	100.00
75	Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	%	100.00	20.05	20.05
76	Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	%	34.00	NA	
77	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	3	NA	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	Perencanaan				
78	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100.00	NA	
5.02	Keuangan				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
79	Opini BPK	Status	WTP	WTP	100.00
80	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Point	0.52	NA	
81	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	36.97	41.55	112.39
5.03	Kepegawaian				
82	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.70	NA	
5.04	Pendidikan dan Pelatihan				
83	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Point	0.27	0.12	44.44
5.05	Penelitian dan Pengembangan				
84	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	27.00	NA	
5.06	Penghubung				
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	Pengawasan				
86	Nilai SAKIP	Kategori	BB (76,01 - 80,00)	BB	100.00
7	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
7.01	Kesatuan Bangsa dan Politik				
87	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	4.67	NA	
88	Partisipasi Politik Masyarakat	%	84.57	NA	
89	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	40.00	NA	
90	Persentase penurunan konflik sosial	%	20.00	NA	
91	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.90	NA	

Sumber: BPS Provinsi NTB, OPD Penanggungjawab Indikator, 2022

Ket. NA= Not Available

Dari 91 indikator untuk mengukur aspek pelayanan umum, terdapat 41 indikator yang sudah dapat dihitung sedangkan 50 indikator lainnya belum dapat dihitung atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Indikator yang sudah dapat dihitung tersebut yaitu Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Persentase Balita Stunting, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas, Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial, Persentase PMKS yang tertangani, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks

Pembangunan Gender (IPG), Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengurangan Sampah, Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi, Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk, Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan, Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri, Pertumbuhan Penduduk, Persentase konektivitas transportasi publik, Nilai Realisasi Investasi, Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional, Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas), Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul), Persentase Arsip yang Terselamatkan, Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB, Produksi Perikanan, Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Persentase Desa Wisata yang dikembangkan, Rata-rata Lama Menginap, Angka kunjungan wisatawan, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Nilai Tukar Petani, Rasio Elektrifikasi, Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, Persentase Fasilitas Pelayanan Keagamaan, Opini BPK, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi, Nilai SAKIP.

Nilai Realisasi Investasi di Provinsi NTB merupakan realisasi antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Nilai Realisasi investasi tersebut tersebar pada 10 Kabupaten / Kota se- Provinsi NTB dengan total nilai sebesar Rp. 4.985 Milyar.

Selain Nilai Realisasi Investasi, indikator lainnya yang sudah dapat diukur yaitu Rata-rata lama menginap (RLM). Berdasarkan hasil rilis BPS, diketahui bahwa Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Bintang pada Bulan Juni 2022 sebesar 1,97 hari dan mengalami penurunan sebesar 0,06 hari dibandingkan RLM Bulan Mei 2022 yang sebesar 2,03 hari. Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Non Bintang pada Bulan Juni 2022 selama 1,41 hari, naik sebesar 0,07 hari dibandingkan dengan RLM Bulan Mei 2022 yang sebesar 1,34 hari. Jumlah tamu yang menginap di Hotel Bintang pada Bulan Juni 2022 tercatat sebanyak 68.205 orang yang terdiri dari 63.296 orang Tamu Dalam Negeri (92,80 persen) dan 4.909 orang Tamu Luar Negeri (7,20 persen). Jumlah tamu yang menginap di Hotel Non Bintang pada Bulan Juni 2022 tercatat sebanyak 52.559 orang yang terdiri dari 48.773 orang Tamu Dalam Negeri (93,28 persen) dan 3.786 orang Tamu Luar Negeri (6,72 persen).

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam RKPD Tahun 2022 telah ditetapkan Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Program Unggulan tetapi belum dijabarkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan. Disamping itu juga tidak tersedia target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan;
2. Tidak tersedia pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program perangkat daerah sehingga kesulitan untuk mengetahui pelaksanaan program prioritas dan program unggulan;
3. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 281 kegiatan dan 861 sub kegiatan. Total program Perangkat Daerah sebanyak 178 dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.976.159.420.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.560.948.808.728,00 atau 26,12 persen.
4. Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan II tahun 2022 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, rata-rata capaian kinerja sebesar 39,66 persen dengan capaian keuangan sebesar 32,99 persen. Rendahnya capaian kinerja disebabkan karena masih sedikitnya Perangkat Daerah yang menginput capaian kinerja pada form yang telah disediakan. Selain itu, rendahnya realisasi fisik dan serapan anggaran pada Triwulan II ini, disebabkan karena sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan III – IV tahun anggaran 2022.
5. Terdapat 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB Tahun 2022. Sebanyak 11 indikator atau 29,73% telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2022, sedangkan 7 indikator atau 18,92% belum mencapai target, Sisanya sebanyak 19 indikator atau 51,35% belum dapat dihitung atau masih menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Beberapa indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target diantaranya Persentase konektivitas transportasi public; Opini BPK; Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD; Nilai SAKIP; Persentase Balita Stunting; Persentase Penanganan Sampah; Persentase Pengurangan Sampah; Nilai Realisasi Investasi; Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan; Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi; Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak; Rasio Elektrifikasi; Inflasi; Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan

(Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum); Tingkat Pengangguran Terbuka; Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah; Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan; Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak.

6. Terdapat 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2022, dimana sebanyak 22 indikator atau 21,36 persen sudah sesuai target bahkan melampaui, 28 indikator atau 27,18 persen belum memenuhi target dan masih terdapat 53 indikator atau 51,46 persen belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi umum yang diberikan terhadap hasil evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Perlu dijabarkan program Prioritas dan Program Unggulan kedalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan serta menetapkan besaran target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan. Penjabaran ini perlu dilakukan pada saat dilakukan perubahan RKPD Tahun 2022;
2. Perlu dilakukan pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program perangkat daerah untuk memudahkan dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program prioritas dan program unggulan, karena program prioritas dan program unggulan secara nomenklatur berbeda dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
3. Perlu dilakukan penyesuaian indikator dan target baik indikator dan target di Program maupun indikator kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
4. Perlu peningkatan Konsolidasi internal dan koordinasi antar stakeholders agar capaian kinerja dapat terus ditingkatkan, karena beberapa indikator tidak hanya dapat dicapai dengan dukungan APBD Provinsi;
5. Terhadap target-target yang belum tercapai agar dilakukan pengawalan dan memfokuskan penganggaran sehingga pencapaian target kinerja di tahun depan dapat diakselerasi;
6. Secara umum, rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran pada Triwulan II ini, disebabkan karena sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan II – IV tahun anggaran 2022.

7. Perlu mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan secara lebih intensif dan berkala sehingga dapat mengefektifkan pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.
8. Pada awal tahun 2022 telah dilakukan 2 kali perubahan Peraturan Gubernur terkait penjabaran APBD Tahun 2022 sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja. Perubahan pertama terkait pembentukan BRIDA yang mengakibatkan adanya pengalihan anggaran dari beberapa Perangkat Daerah untuk dialihkan ke BRIDA. Perubahan kedua yaitu adanya refocusing anggaran untuk menutup defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2021 pada seluruh Perangkat Daerah.

CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu				Realisasi Kinerja	Realisasi Keu
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah														
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Point	129.02										
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana		Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0.65		0.63		0.63						
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase terbentuknya DESTANA & SMAB	%	40.09	14,445,499,395	32.78	4,749,579,691	32.78	2,947,557,900		1,177,017,848		39.93	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
		Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	92.50		67.34	-	67.34						
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Dokumen Perencanaan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang ditanggulangi	Dokumen	420	3,524,792,112		167,068,400		167,068,400		34,534,019			
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Fasilitas DESTANA & SMAB	Dokumen	30	853,307,397	2	42,447,600	2	42,447,600	1	-	50	-	
	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Dokumen Jitupasna yang disusun	Dokumen	4	354,723,830	30	48,256,000	30	48,256,000	-	7,853,000	-	16.27	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Renkon penanggulangan bencana yang disusun	Dokumen	5	319,414,293	2	76,364,800	2	76,364,800	1	26,681,019	50	34.94	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Kejadian Bencana Yang Tertangani	%	100	4,179,305,283		2,780,489,500				975,575,137			
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan Darurat Bencana	%	100	124,207,684	100	74,625,400	90	74,625,400	16	14,533,600	16	19.48	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	1,586,446,729	100	1,857,810,200	80	1,857,810,200	50	886,247,800	50	47.70	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pendistribusian Logistik	%	100	2,468,650,870	25	848,053,900	25	848,053,900	12	74,793,737	48	8.82	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dapat dikelola	%	100	129,970,171		-		-		-			
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah kerjasama yang dikelola	Kegiatan	2	70,000,000	-	-	0	-	-	-			
	Pengelolaan, Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan yang dikelola	Aplikasi	1	59,970,171	-	-	0	-	-	-			
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	7,543,347,993	100	2,524,923,366	100	810,100,000	53	251,130,000	53.05	31.00	Dinas Sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi														
	Penyediaan Permakanan	Jumlah korban bencana alam yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan	Jiwa			16000		16000	-	0	-	0	0.00	
	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang	KK			4000		4000	-	0	-	0	0.00	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah korban bencana yang tertampung di tempat pengungsian	Jiwa			600		600	90,000,000.00	600	82,334,250.00	100	91.48	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang tertangani secara khusus	Jiwa			30900		30900	324,500,000.00	16129	29,730,000.00	52.19	9.16	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah LDP (Layanan Dukungan Psikososial) yang ditingkatkan	Jiwa			900		900	395,600,000.00	460	187,650,000.00	51	47.43	
												39.19	26.63	
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan		Indeks Aksesibilitas	Point	76.02										
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar		Persentase Kemantapan jalan	%	86.60		85.36		85.36						
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Jalan Mantap	%	86.60	931,804,007,968	85.36	424,968,754,650	85.36	259,149,407,251		167,786,454,459		64.75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyelenggaraan Jalan Provinsi		Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	km			541	259,149,407,251	541	259,149,407,251		137,291,093,121		52.98	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan yang tersusun	kegiatan Lokasi km unit			2 ; 12 ; 20 ; 6	151,046,800	2 ; 12 ; 20 ; 6	151,046,800	0	27,823,400		18.42	
	Pengelolaan Leger Jalan	Panjang leger jalan provinsi yang dikelola	km			0	-	0	-	0	-			
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survey kondisi jalan / jembatan yang dilaksanakan	km unit			1484,43 ; 784	384,248,800	1484,43 ; 784	384,248,800	0	16,477,000		4.29	
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan	km			541	181,235,297,072	541	181,235,297,072	0	117,001,386,003		64.56	
	Pelebaran Jalan Menambah Lajur						20,984,253,000		20,984,253,000		7,255,997,468		34.58	
	Rekonstruksi Jalan						6,567,500,000		6,567,500,000				-	
	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	km			0	4,423,955,454	0	4,423,955,454	0			-	
	Penggantian Jembatan						20,577,067,000		20,577,067,000				-	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km			1484,43 ; 784	-	1484,43 ; 784	-	0	-			
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan provinsi yang dipelihara secara rutin	Km			79	24,372,659,607	79	24,372,659,607	0	12,972,497,150		53.23	
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi	m			70	403,631,318	70	403,631,318	0	-		-	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	m				-		-	0	-			
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan jalan/dan jembatan	Dok			2	49,748,200	2	49,748,200	0	16,912,100	0	34.00	
												0.00	27.23	
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar		Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	54.50		52.17		52.17						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Cakupan Pelayanan Areal Irigasi	%	76.28	342,401,082,017	75.37	78,749,039,047	75.37	133,470,449,350		49,861,212,327		37.36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan SDA pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Unit			10	80,464,436,834	10	80,464,436,834	0	11,807,648,353	0	14.67	
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang tersusun	Dok			1	-	1	-	0	-	0		
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						-		-					

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pembangunan sumur air tanah untuk air baku	Jumlah Sumur Air Tanah yang dibangun	Lokasi			10	9,516,618,364	10	9,516,618,364	0	10,060,000	0	0.11	
	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang di rehab	Buah			10	19,703,986,972	10	19,703,986,972	0	2,027,513,000	0	10.29	
	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Peralatan hidrologi dan kualitas air yang dikelola dan disediakan	Set			3	73,808,280	3	73,808,280	0	30,052,000	0	40.72	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Orang			100	630,550,900	100	630,550,900	0	564,384,300	0	89.51	
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	Lokasi			10	7,472,447,793	10	7,472,447,793	0	295,813,000	0	3.96	
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang dipelihara	Buah			200	34,409,024,525	200	34,409,024,525	0	8,488,981,053	0	24.67	
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara	Lokasi			95	8,658,000,000	95	8,658,000,000	0	390,845,000	0	4.51	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas areal layanan irigasi fungsional kewenangan provinsi yang dikelola	Ha			1006	53,006,012,516	1006	53,006,012,516	1,000.00	24,588,291,988	99.39	46.39	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen rencana teknis dan lingkungan hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun	Dok			5	622,926,000	5	622,926,000	0	401,761,390	0	64.50	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan	DI			7	15,500,206,200	7	15,500,206,200	0	13,323,976,500	0	85.96	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang direhab	DI			1	36,572,570,316	1	36,572,570,316	0	10,838,304,098	0	29.64	
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	Ha			1000		1000		0		0		
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya O dan P Jaringan Irigasi Permukaan	DI			7	231,510,000	7	231,510,000	0		0	-	
	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang dipelihara	Ha			0	-	0	-	0	-	0		
	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang beroperasi	DI			19	78,800,000	19	78,800,000	0	24,250,000	0	30.77	
												5.85	32.20	
Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah		Persentase konektivitas transportasi publik	%	89.14		86.86		86.86		88.57		101.97		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	81.63	14,665,159,820	80.40	4,694,778,700	80.40	7,358,836,730	0.15	1,051,131,001	0.19	14.28	Dinas Perhubungan
		Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	100		98.59		98.59		97.5		98.89		
		Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	40		35		35		0		-		
		Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	52.58		49.39		49.39		48.84		98.89		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Trayek tersedianya angkutan subsidi	Trayek	8		5	Rp 233,799,800	2	Rp 233,799,800	2	Rp -	25.00	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek tersedianya angkutan subsidi	Trayek	8		2	Rp 207,680,800	2	Rp 207,680,800	2		25.00	-	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Kab/ Kota terkendalinya angkutan umum Disabilitas	Kab/ Kota	10		2	Rp 26,119,000	2	Rp 26,119,000	2		20.00	-	
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Unit	542		350	Rp 170,534,780	195	Rp 170,534,780	195	Rp 52,082,000	35.98	30.54	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Unit	542		350	Rp 170,534,780	195	Rp 170,534,780	195	Rp 52,082,000	35.98	30.54	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen evaluasi Angkutan Umum Orang	Dokumen											
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Unit Kendaraan	881		156	Rp 40,663,900	3	Rp 40,663,900	3	Rp 50,957,500	0.34	125.31	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Dokumen	881		156	Rp 40,663,900	3	Rp 40,663,900	3	Rp 1,434,100	0.34	3.53	
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jenis	3		1	Rp 6,861,000,000	1	Rp 6,861,000,000	1	Rp 13,711,400	33.33	0.20	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Fasilitas yang terpasang	Jenis	2		1	Rp 6,861,000,000	1	Rp 6,861,000,000	1	Rp 13,711,400	50.00	0.20	
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		Jumlah Fasilitas yang terpasang	Dokumen	19		5	Rp 695,852,000	5	Rp 695,852,000	3	Rp 227,989,700	15.79	32.76	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Fasilitas Terminal	Dokumen	3		0	Rp 43,666,000	0	Rp 43,666,000	0	Rp 8,379,700	-	19.19	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dokumen	12		3	Rp 652,186,000	3	Rp 652,186,000	3	Rp 219,610,000	25.00	33.67	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas terminal type B yang terpelihara	Paket	3		0		0		0	Rp -	-		
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Dokumen manajemen rekayasa Lalu lintas dan pelanggaran angkutan	Dokumen	60		20	Rp 791,834,300	20	Rp 791,834,300	2	Rp 224,676,821	3.33	28.37	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen MRL dan DRK	Dokumen	56		18	Rp 309,080,100	18	Rp 309,080,100	2	Rp 67,281,300	3.57	21.77	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas kebijakan jalan provinsi	Jumlah Dokumen kasus pelanggaran angkutan umum berkurang	Dokumen	4		2	Rp 482,754,200	2	Rp 482,754,200		Rp 157,395,521	-	32.60	
Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	Unit	90		66	Rp 149,151,950	66	Rp 149,151,950	64	Rp 45,795,000	71.11	30.70	
		Jumlah UPUBKB yang terbina	Unit	9		9		9		1		11.11		
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit Pelaksana Penguji Kendaraan Bermotor Yang Dibina	Unit	9		6	Rp 46,400,950	6	Rp 46,400,950	1	Rp 2,805,000	11.11	6.05	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah kendaraan Angkutan Umum yang laik jalan	Unit Kendaraan	90		66	Rp 102,751,000	66	Rp 102,751,000	64	Rp 42,990,000	71.11	41.84	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	66.06	2,260,753,150	61.61	764,484,200	61.61	336,297,700		248,964,666		74.03	Dinas Perhubungan
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Fasilitasi Perizinan Angkutan Laut	Dokumen	40		35	Rp 16,812,000	1	Rp 16,812,000	1	Rp 25,925,000	2.50		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Perizinan Angkutan Laut	Dokumen	40		35	Rp 16,812,000	1	Rp 16,812,000	1	Rp 14,930,000	2.50	88.81	
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	Unit	25		21	Rp 21,825,100	8	Rp 21,825,100	8	Rp 17,691,000	32.00	81.06	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	Unit	25		21	Rp 21,825,100	8	Rp 21,825,100	8	Rp 18,773,780	32.00	86.02	
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi	Dokumen	122		110	Rp 38,268,700	50	Rp 38,268,700	50	Rp 20,243,584	40.98	52.90	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi	Dokumen	122		110	Rp 38,268,700	50	Rp 38,268,700	50	Rp 16,203,600	40.98	42.34	
Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		Jumlah data pelabuhan	Dokumen	3		1	Rp 109,934,000		Rp 109,934,000		Rp 49,887,700	-	45.38	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah data perubahan	Dokumen	3		1	Rp 109,934,000		Rp 109,934,000		Rp 5,083,250	-	4.62	
Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit	22		22	Rp 149,457,900	22	Rp 149,457,900	26	Rp 116,598,000	118.18	78.01	
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit	22		22	Rp 149,457,900	22	Rp 149,457,900	26	Rp 76,155,436	118.18	50.95	
												30.10	36.40	
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi														
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B										
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Opini BPK	Status	WTP		WTP		WTP		WTP		100.00		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	2,275,817,467,799	100	739,588,857,260	100	884,754,776,404	50	317,114,499,190	50.00	35.84	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100		100	1,092,593,901	100						
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun	Dokumen			6	2,294,621,000	6	2,294,621,000	6	642,203,910	100.00	27.99	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Tersusun	Dokumen			1	77,086,000	1	77,086,000	0	-	0.00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Tersusun	Dokumen			1	92,534,000	1	92,534,000	0	-	0.00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang di Verifikasi	Dokumen			136	26,305,000	136	26,305,000	0	-	0.00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang di Verifikasi	Dokumen			136	40,332,900	136	40,332,900	0	-	0.00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun dan diverifikasi	Dokumen			268	20,429,800	268	20,429,800	268	-	100.00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun dan diverifikasi	Dokumen			136	18,412,800	136	18,412,800	0	-	0.00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub tentang Penjabaran APBD	Dokumen			2	488,617,400	2	488,617,400	2	195,866,900	100.00	40.09	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Peubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub tentang Perubahan Penjabaran APBD	Dokumen			2	621,477,000	2	621,477,000	2	250,850,410	100.00	40.36	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi Bidang Anggaran yang Tersusun	Regulasi			1	795,453,000	1	795,453,000	1	195,486,600	100.00	24.58	
	Pembinaan Perencanaan Panganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Rapat Terselenggara	Kegiatan			2	113,973,100	2	113,973,100	2	-	100.00	-	
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten /Kota	Dokumen			31	575,036,500	31	575,036,500	15	110,034,700	48.39	19.14	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	Dokumen			10	104,518,200	10	104,518,200	4	2,700,000	40.00	2.58	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Perubahan APBD Kab/Kota	Dokumen			10	116,259,100	10	116,259,100	2	8,000,000	20.00	6.88	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Dokumen			10	117,540,600	10	117,540,600	4	43,920,600	40.00	37.37	
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil asistensi	Dokumen			10	65,514,100	10	65,514,100	10	40,414,100	100.00	61.69	
	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Regulasi Keuangan yang terlaksana	Kali			1	78,282,400	1	78,282,400	0	-	0.00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di	Kali			11	92,922,100	11	92,922,100	6	15,000,000	54.55	16.14	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			Dokumen	12		12	791,568,500	12	791,568,500	7	111,645,000	58.33	14.10	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Persen	85		85	528,639,200	85	528,639,200	45	57,110,000	52.94	10.80	
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Dokumen	1		1	556,200	1	556,200	1	-	100.00	-	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Dokumen	3,000		3000	70,504,500	3000	70,504,500	2,500	47,035,000	83.33	66.71	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Dokumen	136		136	123,990,100	136	123,990,100	60	7,500,000	44.12	6.05	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Dokumen	11		11	2,000,000	11	2,000,000	0	-	0.00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		kali	10		10	35,298,000	10	35,298,000	10	-	100.00	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Dokumen	132		132	17,041,100	132	17,041,100	0	-	0.00	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Dokumen	3		3	5,159,000	3	5,159,000	2	-	66.67	-	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPD dengan Instansi Terkait		Dokumen	3		3	765,000	3	765,000	0	-	0.00	-	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Dokumen	1		1	7,615,400	1	7,615,400	1	-	100.00	-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Tersusunnya LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	Dokumen			4	568,218,340	4	568,218,340	2	130,362,206	50.00	22.94	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Dokumen			2	82,969,200	2	82,969,200	1	23,212,806	50.00	27.98	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Dokumen BA Rekonsiliasi	Dokumen			1	17,707,600	1	17,707,600	1	-	100.00	-	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan , Triwulan , Semesteran	Dokumen			17	199,800,400	17	199,800,400	13	87,390,000	76.47	43.74	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di Konsolidasikan	Dokumen			136	151,395,800	136	151,395,800	30	17,280,000	22.06	11.41	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Dokumen			2	60,760,700	2	60,760,700	0	-	0.00	-	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Dokumen			1	21,070,240	1	21,070,240	0	-	0.00	-	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Regulasi terkait Juknit Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen			1	34,514,400	1	34,514,400	0	2,479,400	0.00	7.18	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Laporan Dana Bagi Hasil dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi	Dokumen			4	879,704,817,864	4	879,704,817,864	4	232,704,243,403	100.00	26.45	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	dokumen			1	53,334,762,864	1	53,334,762,864	1	-	100.00	-	
	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah dokumen laporan penggunaan dana darurat dan mendesak	dokumen			1	5,705,587,500	1	5,705,587,500	1	247,500,000	100.00	4.34	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Analisis Perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	dokumen			1	855,500,000	1	855,500,000	1	132,011,668	100.00	15.43	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	dokumen			1	819,808,967,500	1	819,808,967,500	1	232,324,731,735	100.00	28.34	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Jumlah Rekap dan Dokumen Data SIPD	Dokumen			2	820,514,200	2	820,514,200	2	192,802,780	100.00	23.50	
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen			2	95,797,900	2	95,797,900	2	18,671,000	100.00	19.49	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah pemeliharaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah	Kali			2	125,984,000	2	125,984,000	2	35,476,400	100.00	28.16	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah pembinaan SIPD Bidang Keuangan Daerah yang dilaksanakan	kali			4	598,732,300	4	598,732,300	4	138,655,380	100.00	23.16	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	75	5,688,570,834	70	1,849,401,028	70	2,130,621,400	40.00	1,017,548,960	57.14	47.76	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan BMD Perangkat yang diterima	laporan			31	2,130,621,400	31	2,130,621,400	25	596,993,340	80.65	28.02	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga	Dokumen			1	115,540,900	1	115,540,900	0	35,132,900	0.00	30.41	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen			2	15,988,800	2	15,988,800	0	8,970,000	0.00	56.10	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen			1	55,712,600	1	55,712,600	0	20,488,000	0.00	36.77	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen			3	8,375,000	3	8,375,000	0	-	0.00	-	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD	Dokumen			160	382,285,000	160	382,285,000	5	86,900,000	3.13	22.73	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Inventarisasi yang dilaksanakan	kegiatan			12	166,091,000	12	166,091,000	0	72,843,000	0.00	43.86	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah penanganan sengketa aset daerah	Kegiatan			5	734,785,000	5	734,785,000	3	191,277,440	60.00	26.03	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen			1	106,249,000	1	106,249,000	1	43,823,000	100.00	41.25	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Status Aset	laporan			5	31,035,000	5	31,035,000	5	14,799,000	100.00	47.68	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK Penetapan Penggunaan BMD, Jumlah Persetujuan Gubernur Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD, Jumlah SK Penghapusan BMD	surat keputusan, dokumen			34	412,440,500	34	412,440,500	24	122,760,000	70.59	29.76	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi	Dokumen			132	76,923,000	132	76,923,000	0	-	0.00	-	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Dokumen			48	19,075,000	48	19,075,000	0	-	0.00	-	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan ke Kabupaten/Kota	Dokumen			10	6,120,600	10	6,120,600	0	-	0.00	-	
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	90	3,807,331,659	85	1,281,660,820	85	1,644,319,300	73.96	1,005,032,440	87.01	61.12	INSPEKTORAT
		Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	48.89		44.44	2,517,297,403	44.44						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Penyelenggaraan Pengawasan Internal				219	7,483,510,862	72	2,497,495,000	46	1,125,422,300	20	574,273,040	43.5	51.03	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			111	3,948,527,733	36	1,354,202,500	9	757,604,800	7	447,915,440	77.8	59.12	
	Reviu Laporan Keuangan			48	1,500,242,475	16	486,659,500	17	175,619,500	4	58,050,000	23.5	33.05	
	Kerjasama Pengawasan Internal			3	531,814,635	1	175,713,000	1	40,870,000	0	19,020,000	0.0	46.54	
	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP			57	Rp 1,502,926,019	19	Rp 480,920,000	19	Rp 151,328,000	9	Rp 49,287,600	47.4	32.57	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				75	3,801,763,436	25	1,254,980,200	14	331,836,000	7	175,911,400	50.0	53.01	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			12	2,304,405,639	4	750,638,200	4	193,308,000	2	137,520,000	50.0	71.14	
	Pengawasan Dengan Tujuan tertentu			63	1,497,357,797	21	504,342,000	10	138,528,000	5	38,391,400	50.0	27.71	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	8	1,402,134,356	6.55	472,000,744	6.55	838,480,000		506,477,615		60.40	INSPEKTORAT
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	97	5,541,790,927	96	1,805,509,500	82	526,775,000	100	194,036,504	104.17	36.83	
Kegiatan 1 : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				48	1,402,134,355	16	419,823,000	12	158,085,000	5	12,600,000	41.7	7.97	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			9	Rp 106,329,975	3	Rp 37,333,000	0	Rp -	0	Rp -			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			39	1,295,804,380	13	419,823,000	12	158,085,000	5	12,600,000	41.7	7.97	
Kegiatan 2 : Pendampingan dan Asistensi				33	5,541,790,927	11	1,805,509,500	16	526,775,000	6	194,036,504	37.5	36.83	
	Sub Kegiatan : Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah							8	Rp 210,585,000	2	Rp 143,456,504	25.0	68.12	
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			33	5,541,790,927	11	Rp 1,805,509,500	8	Rp 316,190,000	4	Rp 50,580,000	50.0	16.00	
												51.40	22.72	
Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	38.65		36.97	106,029,503,746	36.97	106,029,503,746	41.55	45,665,771,774.00	112.39	43.07	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Derajat Desentralisasi Fiskal	%	38.44	1,667,730,000	36.76	554,780,000	36.76	509,772,700	41.55	25,580,000	113.03	5.02	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Daerah	%			1.35	80,925,000	1.35	80,925,000	-9.14	5,800,000	(677.0)	7.17	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Target pendapatan asli daerah dan perubahan target yang ditetapkan	Milyar Rp			2,571.64	80,925,000	2571.64	80,925,000	986.97	5,800,000	38.38	7.17	
Koordinasi dan Pengelolaan Pembendaharaan Daerah		Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	Persen			52.22	428,847,700	52.22	428,847,700	57.19	19,780,000	109.52	4.61	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Penerimaan Pendapatan Transfer (termasuk Dana Perimbangan)	Milyar Rp			2,819.43	428,847,700	2819.43	428,847,700	1,358.43	19,780,000	48.18	4.61	
		Jumlah Penerimaan dana Transfer Lainnya	Milyar Rp			8.01		8.01		34.75		433.74		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	54.03	46,183,810,000	52.03	15,363,280,000	52.03	11,103,419,560	50.41	4,337,530,000	96.89	39.06	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%			31.66	11,372,169,560	31.66	11,372,169,560	28.80	3,532,722,000	90.96	31.06	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Target pendapatan pajak daerah yang ditetapkan	Milyar Rp			1,726.24	1,480,070,000	1726.24	1,480,070,000	731.71	8,990,000	42.39	0.61	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung		
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Perjanjian Kerjasama (PKS) pengembangan layanan kesamsatan yang ditindaklanjuti	MoU			5	810,844,100	5	810,844,100	2	172,550,000	40.00	21.28	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perorangan dan badan	Persen			63.64	276,330,000	63.64	276,330,000	44.96	61,331,500	70.65	22.20	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tingkat Keandalan perangkat keras dan sistem jaringan komunikasi yang direduksi	Persen			98.75	428,154,560	98.75	428,154,560	99.38	34,082,000	100.64	7.96	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data Obyek Pajak Daerah (DU & TMDU PKB) yang menyelesaikan kewajiban pajaknya	Obyek			914,382	204,964,000	914382	204,964,000	399,275	44,160,000	43.67	21.55	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah record data yang disinkronkan dalam database	Obyek			1,700,000	159,255,000	1700000	159,255,000	440,002	24,975,000	25.88	15.68	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor	Obyek			98,581	1,113,057,000	98581	1,113,057,000	40,727	408,550,000	41.31	36.71	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Angka partisipasi Wajib Pajak yang menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan bermotornya	Persen			64.20	370,014,000	64.2	370,014,000	43.67	119,796,000	68.01	32.38	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah WP Penunggak Pajak yang menyelesaikan kewajiban pajaknya	Obyek			178,229	21,450,000	178229	21,450,000	56,795	-	31.87		
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah WP penerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2T) yang menyelesaikan kewajiban PKBnya	Obyek			1,650	555,939,000	1650	555,939,000	1,083	210,220,500	65.64	37.81	
		Jumlah WP penerima Surat Teguran PKB dan Penagihan Pajak Daerah yang melunasi tunggakan PKBnya	Obyek			64,200		64200		44,363		69.10		
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kasus keberatan pajak daerah yang ditindak lanjuti	Kasus			3	22,955,000	3	22,955,000	0	-	0.00		
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	WP Terjaring Operasi Sadar PKB yang menyelesaikan kewajiban/ tunggakan PKBnya	Obyek			27,169	5,746,044,000	27169	5,746,044,000	5,160	2,367,439,000	18.99	41.20	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah penerimaan Dana Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, dan penerimaan Pendapatan Lain-lain	Milyar Rp			490.10	183,092,900	490.1	183,092,900	281.20	80,628,000	57.38	44.04	
												42.24	21.12	
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP	Kategori	A (80,01 - 90,00)		BB (76,01 - 80,00)		BB (76,01 - 80,00)		BB		100.00		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	14,444,339,884	100	4,779,893,285	100	2,126,322,500		1,242,957,562		58.46	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan & pendanaan pembangunan daerah	Dokumen			10	2,884,502,945	10	1,503,132,500	6	1,028,219,600	60.00	68.41	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	dokumen			3	169,232,066	3	100,296,600	1	9,338,000	33.33	9.31	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	dokumen			2	1,317,960,224	2	239,740,000	1	102,514,000	50.00	42.76	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara			1	77,242,013	1	23,570,000	1	14,330,000	100.00	60.80	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara			1	169,355,018	1	129,730,000	1	120,050,000	100.00	92.54	
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang	Berita Acara			1	699,279,911	1	805,677,600	1	743,057,600	100.00	92.23	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen			2	451,433,713	2	204,118,300	1	38,930,000	50.00	19.07	
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Analisis Hasil Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen			5	998,464,752	5	378,290,000	2	73,125,500	40.00	19.33	
	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dok			3	476,419,653	3	154,290,000	1	30,875,500	33.33	20.01	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang			50	215,794,185	50	87,350,000	20	17,500,000	40.00	20.03	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	orang			400	306,250,915	400	136,650,000	180	24,750,000	45.00	18.11	
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen			19	896,925,588	19	244,900,000	8	25,316,062	42.11	10.34	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan			2	241,451,953	2	45,700,000	1	5,458,200	50.00	11.94	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	kerja sama			1	90,322,917	1	16,800,000	-	-	0.00	-	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan			14	361,924,493	14	138,160,000	6	19,857,862	42.86	14.37	
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	dokumen			2	203,226,225	2	44,240,000	1	-	50.00	-	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	37,833,084,161	100	12,519,651,738	100	7,842,652,400	50	3,036,317,263	50.00	38.72	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dokumen			3	2,063,190,506	3	1,350,821,400	1	496,764,300	33.33	36.77	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			2	73,069,546	2	31,791,000	1	5,440,000	50.00	17.11	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan			2	23,941,783	2	9,310,800	1	4,140,000	50.00	44.46	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan			2	68,475,949	2	77,567,200	1	24,140,000	50.00	31.12	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	laporan			1	27,198,488	1	15,058,500		2,900,000	0.00	19.26	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			4	1,274,821,603	4	849,636,000	2	403,282,700	50.00	47.47	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	laporan			4	93,810,059	4	16,810,000	2	4,980,000	50.00	29.63	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	laporan			4	267,553,980	4	142,662,900	2	46,971,600	50.00	32.92	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	dokumen			2	234,319,098	2	207,985,000		4,910,000	0.00	2.36	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen			3	6,569,718,285	3	4,826,435,900	1	1,648,995,000	33.33	34.17	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			5	505,176,335	5	47,963,600	2	17,670,000	40.00	36.84	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	laporan			4	246,613,673	4	43,203,900	2	12,950,000	50.00	29.97	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	laporan			4	371,576,174	4	156,634,200	2	48,660,000	50.00	31.07	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	laporan			3	1,113,909,855	3	944,444,800		265,089,000	0.00	28.07	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			2	494,348,615	2	106,375,000	1	11,870,000	50.00	11.16	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laporan			2	141,129,558	2	23,200,000	1	3,480,000	50.00	15.00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laporan			2	1,129,036,463	2	1,170,474,400	1	169,750,000	50.00	14.50	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	laporan			2	2,567,927,612	2	2,334,140,000		1,119,526,000	0.00	47.96	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen			3	3,886,742,947	3	1,665,395,100	1	531,120,187	33.33	31.89	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			4	1,663,810,023	4	447,568,500	2	360,641,400	50.00	80.58	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	laporan			4	285,548,568	4	30,960,000	2	7,650,000	50.00	24.71	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	laporan			4	359,838,933	4	168,720,000	2	600,000	50.00	0.36	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	laporan			2	331,613,021	2	166,550,000		-	0.00	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			2	462,713,352	2	490,170,000	1	33,541,602	50.00	6.84	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	laporan			2	231,102,586	2	24,363,000	1	2,640,000	50.00	10.84	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung					
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian						
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu								
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	laporan			2		242,439,580		2		125,563,600		1		30,250,785	50.00	24.09	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	laporan			1		309,676,884		1		211,500,000				95,796,400	0.00	45.29	
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN		Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya	%	100	2,916,865,961	91.11		981,904,708	91.11		1,644,319,300				1,005,032,440		61.12	INSPEKTORAT	
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal				280	2,916,865,961	90		956,954,500	61		187,061,000		3		69,840,000	4.9	37.34		
	Sub Kegiatan 1 : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			186	523,703,634	62		176,281,000	56		60,720,000		0		-	0.0	-		
	Sub Kegiatan 2 : Reviu Laporan Kinerja			24	878,584,679	8		295,771,500	5		125,471,000		3		69,840,000	60.0	55.66		
	Sub Kegiatan 3 : Pengawasan Umum dan teknis Kabupaten/Kota			70	Rp 1,514,577,648	20	Rp	484,902,000	0	Rp	870,000		0	Rp	-		-		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	26,66	2,529,078,823	22,22		851,362,983	22,22		838,480,000				506,477,615		60.40	INSPEKTORAT	
Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi				328	2,529,078,824	121		888,225,400	74		153,620,000		73		78,075,000	98.6	50.82		
	Sub Kegiatan 1 : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah			318	Rp 1,512,459,395	118	Rp	553,621,700	72	Rp	80,000,000		72	Rp	56,475,000	100.0	70.59		
	Sub Kegiatan 2 : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi			4	Rp 327,678,240	1	Rp	109,362,000	1	Rp	48,035,000		0	Rp	-	0.0	-		
	Sub Kegiatan 3 : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas			6	688,941,189	2		225,241,700	1		25,585,000		1		21,600,000	100.0	84.42		
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%		3,842,393,557			1,282,219,090			1,431,270,550				615,535,507		43.01	Biro Organisasi	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	9,485,045,504	100		3,165,190,197	100		577,674,500	100		522,923,739	100.00	90.52	Biro Pemerintahan		
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas pemerintahan	dok	9	2,778,249,878				3		112,733,900		3		104,796,700	100	92.96		
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	dok	3	794,553,356				1		24,900,000		0		21,640,000	0	86.91		
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	dok	3	720,804,546				1		61,304,700		0		59,776,700	0	97.51		
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	dok	3	1,262,891,976				1		26,529,200		0		23,380,000	0	88.13		
Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah		jumlah dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah	dok	12	4,928,610,306				4		349,022,800		4		314,579,098	100	90.13		
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	dok	3	1,933,929,071				1		58,100,000		0		55,457,998	0	95.45		
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	dok	3	652,721,357				1		40,313,000		0		27,853,000	0	69.09		
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	dok	6	2,341,959,878				2		250,609,800		2		231,268,100	100	92.28		
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah		jumlah dokumen laporan fasilitasi kerjasama daerah	dok	3	1,778,175,320				1		115,917,800		1		66,877,941	100	57.69		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	kerjasama	40	763,762,649			10	57,584,100	5	22,673,571	50	39.37	
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	kerjasama	40	473,361,562			10	31,489,800	5	20,139,800	50	63.96	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	kerjasama	40	541,051,109			10	26,843,900	5	24,064,570	50	89.65	
												45.02	36.92	
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN		Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.72		0.70		0.70						
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Nilai Penerapan Sistem Merit	point	373	21,515,000,000	347.5	7,150,000,000	347.5	1,385,355,900	287	573,866,770	82.59	41.42	Badan Kepegawaian Daerah
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informas	point	102		81		81		81		100.00		
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah usulan Formasi CPNS/PPPK	formasi	4500	15,282,886	1500	5,321,251	1500				0.00		
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi CPNS/PPPK	formasi	1200	112,747,576	400	39,256,862	400				0.00		
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS/P3K terseleksi	orang	1200	1,904,365,497	400	663,068,924	400	417,700,000	2000	121,860,770	500.00	29.17	
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Seleksi CPNS/PPPK	Kab/kota	10	136,493,030	10	47,524,641	10				0.00		
	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	jumlah koordinasi perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	kegiatan	3	20,365,626	1	7,090,978	1				0.00		
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT	SK	735	264,809,478	245	92,202,330	245	13,650,000	200	6,150,000	81.63	45.05	
	Evaluasi Pemberhentian ASN	jumlah dokumen analisis zero growth kebutuhan ASN	Dokumen	3	105,727,934	1	36,812,738	1				0.00		
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan Fasilitasi KORPRI	Kegiatan	12	-	4	-	4	95,802,000	1	76,650,000	25.00	80.01	
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Aplikasi Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Asplikasi	3	18,849,036	1	6,562,926	1				0.00		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang tersedia didalam SIMPEG/SIMADU	Pgawai	14143	777,966,944	14143	270,875,368	14143	104,995,000	4000	13,350,000	28.28	12.71	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Tata Naskah yang diakuisisi	Pegawai	13950	231,093,533	13950	80,462,989	13950				0.00		
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang telah terdokumentasi secara Elektronik	Pegawai	13950	111,360,980	13950	38,774,072	13950				0.00		
Mutasi dan Promosi ASN		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Point	32.5	3,492,141,693	20	1,215,906,631	20	406,275,000	20	197,500,000	100.00	48.61	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT	SK	690	365,757,991	230	127,350,951	230	30,335,000	120	14,937,000	52.17	49.24	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah keputusan kenaikan pangkat / gaji berkala	SK	9000	1,037,953,669	3000	361,398,494	3000	86,100,000	1500	36,337,000	50.00	42.20	
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam Jab. Struktural	SK	990	2,088,430,033	330	727,157,186	330	289,840,000	230	146,226,000	69.70	50.45	
Pengembangan Kompetensi ASN		Nilai Aspek Pengembangan karir, Perlindungan dan pelayanan	point	118.5	1,415,601,711	39	492,889,365	39	168,825,000		66,977,000	0.00	39.67	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang diberikan Konseling	Pegawai	90	157,725,279	30	54,917,363	30				0.00		
	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang telah Terpetakan Kompetensinya	orang	1200	166,131,516	400	57,844,277	400				0.00		
	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah SPT, Surat Rekomendasi, Surat Ijin Mengikuti Diklat dan Sertifikasi	pegawai	300	16,465,825	100	5,733,131	100	23,170,000	413	10,000,000	413.00	43.16	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal	orang	240	111,581,969	80	38,851,017	80				0.00		
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	jumlah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	kerjasama	30	269,562,902	10	93,857,394	10				0.00		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Hasil Pemetaan Talenta	Pegawai	900	144,465,956	300	50,300,683	300				0.00		
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Jafung dan Uji Kompetensi	orang	60	92,884,590	20	32,340,895	20	20,240,000	10	9,190,000	50.00	45.41	
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	jumlah kegiatan sosialisasi jabatan fungsional	Kegiatan	3	47,781,226	1	16,636,641	1	22,980,000	1	9,945,000	100.00	43.28	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan / pemberhentian dalam Jab. Fungsional	SK	1320	200,189,778	440	69,702,807	440	44,110,000	230	13,322,000	52.27	30.20	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	jumlah dokumen penilaian DUPAK/PAK	DUPAK/PAK	120	121,717,118	40	42,379,910	40	58,325,000	20	24,520,000	50.00	42.04	
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengembangan karir jabatan Fungsional	Dokumen	6	87,095,552	2	30,325,247	2				0.00		
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	point	120	5,519,388,471	97.5	1,921,757,671	97.5	188,619,000		33,609,000	0.00	17.82	
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kebijakan tentang Evaluasi Kinerja Aparatur	Peraturan	9	42,616,157	3	14,838,249	3				0.00		
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang Berkinerja Baik	pegawai	12893	420,896,842	12893	146,549,397	12893				0.00		
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah dokumen evaluasi kinerja Aparatur	Dokumen	12	166,530,163	12	57,983,079	12	129,202,000	6	2,005,000	50.00	1.55	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Penghargaan Pegawai teladan	Orang	72	97,070,376	24	33,798,317	24	23,482,000	12	11,100,000	50.00	47.27	
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Satya Lencana Karya Satya	orang	600	160,593,800	200	55,916,135	200				0.00		
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	jumlah dokumen Laporan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	DOKumen	3	72,085,986	1	25,096,028	1				0.00		
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembinaan disiplin ASN	OPD	46	243,672,558	46	84,842,800	46	35,935,000	32	20,504,000	69.57	57.06	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin	SK	90	51,161,053	30	17,813,442	30				0.00		
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pemberian Izin Kawin Cerai PNS	SK	60	14,160,609	20	4,930,492	20				0.00		
	Evaluasi Disiplin ASN	jumlah Laporan Disiplin ASN	Dokumen	36	87,823,515	12	30,578,712	12				0.00		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0.10	51,655,240,040	0.09	16,960,960,998	0.094	2,779,213,763	0	1,295,638,858	0	46.62	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0.04		0.04		0.036		0		0		
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0.15		0.14		0.140		0.007		5		
		Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0.62		0.59		0.586		0		0		
Pengembangan Kompetensi Tekhnis		Jumlah Kompetensi Tekhnis ASN	orang	630	3,017,260,627	90	353,666,460	60	274,962,960	107	48,345,280	178	17.58	
		Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis	dok	9		3		3		3		100		
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dok	3	248,451,557	1	90,278,700	1	90,278,700	1	28,021,400	100	31.04	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dok	3	188,076,443	1	17,028,600	1	17,028,600	1	2,653,600	100	15.58	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	orang	630	2,178,461,048	90	217,832,400	60	139,128,900	107	-	178	-	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	dok	3	402,271,578	1	28,526,760	1	28,526,760	1	17,670,280	100	61.94	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN	orang	3.464	48,637,979,414	358	3,480,781,100	238	2,504,250,803	236	1,024,341,078	99	40.90	
		Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	orang	560		120		120		-		0		
		Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN	dok	72		24		21		17		81		
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	dok	3	132,057,743	1	25,000,000	1	15,000,000	0	-	0	-	
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	dok	6	392,098,238	2	46,055,100	2	46,055,100	1	4,928,300	50	10.70	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	orang	560	671,037,778	120	90,789,800	120	70,789,800	0	10,583,100	0	14.95	
	:Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	laporan	9	1,542,322,946	3	505,154,900	3	485,154,900	1	168,107,200	33	34.65	
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	dok	30	164,865,900	10	62,431,400	10	45,587,538	10	27,621,338	100	60.59	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	dok	12	188,076,443	4	25,000,000	4	15,000,000	4	3,240,000	100	21.60	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	orang	3,864	45,427,613,780	358	2,671,673,600	238	1,786,673,600	236	785,778,340	99	43.98	
	Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	dok	12	119,906,585	4	54,676,300	1	39,989,865	1	24,082,800	100	60.22	
												53.54	35.92	
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Indeks Pelayanan Publik	Point	4.55		4.53		4.53						
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%	98,90	880,122,000	98,80	290,696,000	98,80	50,429,000		21,578,500		42.79	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Persentase penyelenggaraan pendaftaran kependudukan	%	100		100	23,917,510	100	50,429,000		21,578,500		42.79	
	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Berat Dokumen/barang yang dikirim	Kg	500	28,496,111	500	23,917,510	500	50,429,000	214	21,578,500	42.80	42.79	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	654,257,000	100	216,094,000	100	22,444,700		1,540,200		6.86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Jenis Dokumen Catatan Sipil dan pendukungnya	Dokumen	1	85,820,600	1	72,031,408	1	22,444,700		1,540,200	0	6.86	
	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	jumlah peserta Rakor di bidang pencatatan sipi	Orang	40	85,820,600	40	72,031,408	40	22,444,700	0.07	1,540,200	0.18	6.86	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase pengelolaan informasi data administrasi kependudukan yang baik di tingkat kab/kota	%	100	3,155,081,000	100	1,042,092,000	100	214,764,300		7,060,900		3.29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	kali	4	182,010,364	4	152,765,919	4	163,975,400		-	0	-	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Berat Dokumen/Barang yang dikirim	Kg	1,250	12,562,083	1,250	10,543,675	1250	150,000,000		-	0.00	-	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jenis Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jenis	3	169,448,281	3	142,222,244	3	13,975,400		-	0.00	-	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	%	100	195,198,365	100	163,834,944	100	50,788,900		7,060,900	0	13.90	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Frekuensi perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tahun	1	195,198,365	1	163,834,944	1	50,788,900	0.14	7,060,900	14.00	13.90	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingk hutan dan pesisir	%	25	266,644,000	20	100,000,000	20	250,000,000	0.17	48,436,200	0.85	19.37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi	Kali	3	119,143,303	3	56,804,086	3	250,000,000	1	42,446,200	33.33	16.98	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	FGD Pengembangan Kerjasama Potensi Unggulan Desa	Kabupaten	4	31,689,519	4	5,000,000	4	84,164,300	1	15,414,300	25.00	18.31	
	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	BIMTEK Kerjasama Desa Provinsi NTB	Orang	40	31,689,519	40	5,000,000	40	65,835,700	40	1,000,000	100.00	1.52	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	FGD Pengembangan Kawasan Perdesaan	Kabupaten	4	55,764,265	4	46,804,086	4	100,000,000	1	26,031,900	25.00		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik Sesuai Standart KIP (%)	%	80	16,947,033,421	70	5,599,748,172	70	6,437,616,350		2,652,748,082		41.21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik (%)	%	85	6,702,957,548	80	5,599,748,172	80	6,437,616,350			-		
	Monitoring Opini dan opini Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Opini dan Aspirasi	Dokumen	2	361,052,338	2	301,628,372	2	262,911,000			-		
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi yang diproduksi dan disebar melalui media publik	Informasi	806	1,587,444,652	701	1,326,174,338	701	3,696,765,350	540		77.03		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh perangkat Daerah	Informasi	690	114,738,050	690	95,853,835	690	-			-		
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Lembaga dan Pers yang Terlibat dalam penyebarluasan Informasi	Lembaga	5	36,081,131	5	30,142,701	5	-			-		
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Aparatur yang Terlatih dan terfasilitasi	Orang	40	109,720,279	40	91,661,916	40	-			-		
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Sengketa Informasi yang terselesaikan	Kasus	2	1,551,207,649	4	1,295,901,419	4	807,940,000	9		225.00		
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitaan Komunitas	Jumlah Kelompok/Komunitas yang diberdayakan dalam Penyebarluasan Informasi	Komunitas	15	2,509,787,788	15	2,096,713,201	15	1,670,000,000			-		
	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik	Unit	10	432,925,661	10	361,672,390	10	-			-		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Layanan Berbasis TIK	%	65	6,229,379,686	55	2,058,351,845	55	782,200,000		7,189,000		0.92	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Kualifikasi/Level Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (Kualifikasi/Level)	%	Terintegrasi	2,463,868,840	Terstandarisasi	2,058,351,844	Terstandarisasi	782,200,000			-		
	Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan e-Government	Dokumen	2	634,750,115	2	530,279,473	2	10,000,000			-		
	Pengelolaan Pusat DataPemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pusat Data	OPD	46	1,185,635,464	43	990,497,101	43	772,200,000	43		100.00		
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Simpul Jaringan Perangkat Daerah yang Terkoneksi	OPD	30	539,633,718	23	450,817,852	23	-	18		78.26		
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Oemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Aplikasi	3	103,849,543	2	86,757,418	2	-			-		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	30	1,530,744,809	25	505,798,581	25	121,940,300		70,866,400		58.12	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Persentase Data yang Tervalidasi	%	65	605,446,229	50	505,798,580	50	121,940,300	23		45.47		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Penolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Jenis Data yang tervalidasi	Jenis	550	54,019,082	530	45,128,326	530	17,320,300			-		
	Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang Meningkatkan Pemahaman	Orang	55	377,189,970	55	315,109,984	55	10,300,000			-		
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata yang terbangun	Jenis	20	26,548,709	15	22,179,176	12	11,040,000			-		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam Penyusunan	OPD	46	31,506,296	46	26,320,818	46	32,150,000			-		
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi Statistik	OPD	7	116,182,172	6	97,060,276	6	51,130,000	1		16.67		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	50	1,492,430,577	40	493,138,545	40	167,695,000		137,903,410		82.23	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah Provinsi		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	%	50	387,276,530	40	387,276,530	40	74,000,000					
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	Dokumen	1	47,577,621	1	47,577,621	1	48,000,000					
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber	Orang	6	219,127,137	6	219,127,137	6	9,650,000					
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	Insiden	14	93,443,123	16	93,443,123	16	9,470,000	6		37.50		
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	OPD	46	27,128,649	30	27,128,649	30	6,880,000	9		30.00		
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi		Persentase Pemanfaatan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah (%)	%	100	105,862,015	65	105,862,015	65	93,695,000					
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan komunikasi sandi	OPD	46	105,862,015	65	105,862,015	65	93,695,000	74		113.33		
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	90	300,351,716	85	100,214,713	85	37,264,900		-		-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokjumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan	Dokumen	2	300,351,716	2	100,214,713	1	37,264,900	0	3,193,000	0	8.57	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen PTKD Makro yang di hasilkan	Dokumen	1	244,705,400	1	75,000,000	1	37,264,900	0	3,193,000	0	8.57	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang di hasilkan	Dokumen	1	55,646,316	1	25,214,713	0	-	0	-	0		
		Persentase Penyerapan Angkatan Kerja	%	96.83		96.81	2,447,808,479	96.81	2,163,989,620	96.08	303,415,700	99.25		
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase Pengembangan Minat dan Budaya Baca	%	100	3,405,712,853	100	1,135,237,618	100	15,977,763,850	50	2,953,906,450	50.00	18.49	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Perpustakaan	225	2,902,773,128			75	255,073,650	35	45,391,250	47	17.80	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah kunjungan pemustaka	Kunjungan	192,000	446,258,335			75,000	75,301,300		41,214,400	0	54.73	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dibina	Perpustakaan	30	1,978,709,037			10	765,000	5	-	50	-	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti bimtek	Orang	450	235,018,332			150	19,944,000		-	0	-	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Pengadaan Bahan Pustaka	Judul	10,500	107,296,587			4,500	157,876,250	2,250	4,176,850	50	2.65	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang di data	Kab/ Kota	30	135,490,837			10	1,187,100	10	-	100	-	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Kegiatan	26	742,069,583			8	15,722,690,200	4	2,908,515,200	50	18.50	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta lomba dan pameran buku	Orang	3,000	239,129,863			1000	245,955,700	1000	75,750,000	100	30.80	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan	Gedung	1	239,129,863			1	15,448,592,000	1	2,832,765,200	100	18.34	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dikembangkan	Perpustakaan	48	263,809,857			12	28,142,500	12	-	100	-	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	624,349,821	100	208,116,607	100	68,807,000	50	10,486,000	50.00	15.24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam	Judul	1,550	170,945,815			500	4,463,600	250	1,350,100	50	30.25	
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Pengelolaan Koleksi Deposit yang tersedia	Judul	1,550	170,945,815			500	4,463,600	250	1,350,100	50	30.25	
	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi	Eksemplar	2,250	224,357,011			750	5,233,100	350	2,653,100	47	50.70	
	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah yang dilyankan	Judul	1,650	126,867,151			550	1,435,100	270	735,100	49	51.22	
	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang tersedia di deposit	Judul	690	97,489,860			230	3,798,000	115	1,918,000	50	50.50	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah	Naskah	30	229,046,988			10	59,110,300	1	6,482,800	10	10.97	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	Naskah	30	102,483,180			10	12,789,900	1	1,916,400	10	14.98	
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang didayagunakan dan dilyankan secara daring/Online	Naskah	30	126,563,808			10	46,320,400	1	4,566,400	10	9.86	
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang	43,000	-	41,000	-	41,000	556,750,000	3,711	331,494,000	9.05	59.54	Badan Penghubung Daerah
	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Terlaksananya pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya					25,000,000		25,000,000		25,000,000		100.00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					531,750,000		531,750,000		346,494,000		65.16	
												33.53	23.60	
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah														
	Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan	Point	71.20										
	Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.48		67.08		67.08						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	%	85	490,192,636,948	85	163,526,294,113	85	218,372,720,455		53,968,945,293		24.71	Dinas Kesehatan
		Persentase balita Wasting	%	85		11.41		11.41		6.78		140.58		
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	80		97					0.00			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	%	100		75		75		62.7		83.60		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB (%)	%	100		100		100		100		100		
		Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80 %	%	100		90				100		66.67		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%	100		100						0.00		
		Persentase Penyelesaian Data dan Informasi Kesehatan Daerah	%	3	3,651,104,864	100	1,391,035,404	100	24,670,153,700	100	13,361,634,900	100.00	54.16	
		Persentase Puskesmas Yang di Bina Mampu melaksanakan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Keluarga (KIA, PKPR, PKRET, Lansia) sesuai Standar	%	92.9	-	87		80		40		0.00		
		Persentase Kabupate n/ Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	%	40	-	30		65		70		107.69		
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	%	100	-	100		100						
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100	-	100		100						
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Sarana , prasarana dan alat kesehatan yang disediakan (4 paket)	Paket	4	4,187,371,186	4	9,902,224,743		9,902,224,743		25,287,600	0.000	0.26	
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah lokal Pengembangan Rumah Sakit	Lokal	3	3,600,000,000		597,969,743		597,969,743		-			
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi yang di distribusikan ke Kab / Kota	Jenis	120	95,840,033		171,624,000		171,624,000		25,287,600		14.73	
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Jenis Obat dan perbekalan kesehatan buffer stock provinsi yang diadakan	Jenis	20	491,531,153		9,132,631,000		9,132,631,000		-		-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kab / Kota yang mendapat pembinaan, pendampingan dan Money / investigasi kegiatan UKP Rujukan,UKM danUKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab/Kota	10	75,626,672,761	10	131,621,931,045		131,621,931,045	10	39,187,808,669	100	29.77	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	27707	258,312,957	27707	6,117,261,412		6,117,261,412		1,073,144,500		17.54	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Orang	4200	218,638,724	4200	1,059,008,000		1,059,008,000		140,330,000		13.25	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas	50	741,853,974	40	557,980,000		557,980,000	10	305,176,000	25.00	54.69	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan PKPR dan PKRET	Puskesmas	50	982,254,586	40	54,000,000		54,000,000	10	53,890,000	25.00	99.80	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Santun Lansia	Puskesmas	40	1,187,775,766	35	35,000,000		35,000,000	-	-	0.00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Surveillans Gizi Terstandar (kab/kota)	Kab/Kota	10	10,098,612,892	10	16,291,570,588		16,291,570,588		157,439,000	0.00	0.97	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	Kab/Kota	4	612,401,193	3	246,406,000		246,406,000		152,696,600	0.00	61.97	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KK Dengan Akses Jamban Sehat	%	97	3,956,744,171	94	5,717,276,000		5,717,276,000		64,276,000		1.12	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Posyandu yang diaktifkan	Posyandu	383	643,702,954	377	574,537,324		574,537,324		38,256,200	0.00	6.66	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	Kab/Kota	10	912,043,506	9	43,040,000		43,040,000	6	8,040,000	66.67	18.68	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	4996	46,687,447	4996	-		-	2043	-	40.89		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	Puskesmas	171	242,040,536	151	-		-	123	-	81.46		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan NAPZA	Puskesmas	129	144,117,959	109	-		-	70	-	64.22		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Kelompok Penerima Hibah	Kelompok	11	3,501,558,504	11	1,800,000,000		1,800,000,000		-	0	-	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam rangka program jaminan kesehatan nasional	Kab/Kota	10	46,614,847,827	10	98,745,239,721		98,745,239,721		37,194,560,369		37.67	
	Pengelolaan Surveillans Kesehatan	Jumlah Analisis Faktor Resiko KLB yang dihasilkan	Analisis	10	248,408,703	10	21,000,000		21,000,000		-		-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan SPM Kab/Kota	Dokumen	10	107,068,430	10	101,612,000	10	101,612,000	7	-	70	-	
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	10	373,293,715	10	73,000,000		73,000,000		-	0	-	
	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	1	64,059,520	1	35,000,000		35,000,000		-	0	-	
	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	investigasi	10	347,319,534	10	80,000,000		80,000,000		-	0	-	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Layanan Rumah Sakit	Layanan	1	4,000,000,000	1	-		-		-			
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kab./Kota yang mempunyai PSC	Kab/Kota	10	98,425,389	10	35,000,000		35,000,000	7	-	70	-	
	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah RS yang melaksanakan SISRUITE	RS	45	93,716,689	43	35,000,000		35,000,000	21		48.84	-	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan/Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Lab Rujukan/nasional	Pengambilan	20	9,011,763	20 Kali	-		-					
	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Tim Gerak Cepat (TGC) yang dibina	Tim	10	123,776,022	10						0		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah (Dokumen)	Dokumen	1	409,886,957	1	350,287,289	1	350,287,289	1	41,160,000	100	11.75	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah (Dokumen)	Dokumen	1	370,687,096	1	316,787,289		316,787,289	1	19,821,000	100	6.26	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan (Paket)	Paket	1	39,199,861	1	33,500,000		33,500,000	1	-	100	-	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit (RS)	RS	45	256,153,891	45	218,907,800		218,907,800		14,361,200	0	6.56	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit (RS)	RS	45	111,439,939	45	95,236,000		95,236,000		14,361,200	0	15.08	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Kabupaten / Kota yang di bina rangka akreditasi / reakreditasi FKTP dan FKTL (Kab/Kota)	Kab/Kota	10	144,713,952	10	123,671,800		123,671,800		-	0	-	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen			10	214,810,400		214,810,400		37,220,000	0	17.33	
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan (Dokumen)	Dokumen			10	214,810,400		214,810,400		1,080,000	0	0.50	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit	RS	45	256,153,891	45						0		
	Peningkatan Tata Kelola Rs	Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit (RS)	RS	45	111,439,939	45						0		
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Kabupaten / Kota yang di bina rangka akreditasi / reakreditasi FKTP dan FKTL	Kab/Kota	10	144,713,952	10	36,619,800		36,619,800	7	14,361,200	70	39.22	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	3	3,651,104,864	2.5	1,391,035,404	2.5	24,670,153,700	0.27	13,361,634,900	10.80	54.16	Dinas Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah dokumen rencana pemenuhan minimal 9 Tenaga Kesehatan di pusk Provinsi NTB (dokumen)	Dokumen	11	199,772,218	11	49,143,700	-	49,143,700	11	28,284,900	100	57.56	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen rencana pemenuhan minimal 9 Tenaga Kesehatan di pusk Provinsi NTB (dokumen)	Dokumen	11	49,337,098	11	29,983,700	-	29,983,700	11	16,288,100	100	54.32	
	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen rencana distribusi dan pemerataan minimal 9 Tenaga Kesehatan di Pusk Provinsi NTB (Dokumen)	Dokumen	11	150,435,120	11	19,160,000	-	19,160,000	11	11,996,800	100	62.61	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	Orang	500	1,191,609,218	500	60,710,000	-	60,710,000	104	1,450,000	20.8	2.39	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	Orang	500	1,072,747,376	500	25,710,000	-	25,710,000	104	1,450,000	20.8	5.64	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia (Dokumen)	Dokumen	1	118,861,842	1	35,000,000	-	35,000,000	-	-	0	-	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	95	239,953,724	90	100,000,000	90	30,500,000		-		-	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		Jumlah Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK yang dibina dan diawasi	Sarana	18	90,816,566	18	27,118,100	-	27,118,100	-	-	0	-	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK yang dibina dan diawasi (Sarana)	Sarana	18	90,816,566	18	27,118,100	-	27,118,100	-	-	0	-	
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dibina dan diawasi (Sarana)	Sarana	3	16,955,958	3	5,063,100	-	5,063,100	-	-	0	-	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dibina dan diawasi (Sarana)	Sarana	3	16,955,958	3	5,063,100	-	5,063,100	-	-	0	-	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase SPM yang mencapai target	%	90	163,139,610,602	85	54,518,919,382	85	519,845,818,280		111,262,737,022		21.40	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase SPM yang mencapai target	%	76.19	29,809,896,151	75	10,339,417,902	75	5,920,366,684	77.27	1,160,727,077	103.03	19.61	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
		Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80	-	80	-	80		80.00		100.00		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan	%	93	10,267,241,647	91	5,402,537,684	91	5,402,537,684	24.14	885,805,342	27	16.40	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah unit alkes		96	1,616,215,772	36	1,400,937,684	36	1,400,937,684	-	-	0	-	
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jenis		13	5,610,281,704	13	4,001,600,000	13	4,001,600,000	13	885,805,342	100	22.14	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase masyarakat yang terlayani	%	100	1,259,522,597	100	420,366,700	100	420,366,700	74.53	170,290,726	75	40.51	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Berpotensi Bencana	Jumlah orang yang terlayani		4363	161,031,598	540	50,429,200	540	50,429,200	-	-	0	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani		36020	292,606,158	35460	86,575,000	35460	86,575,000	27,427.00	12,650,000	77	14.61	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah orang yang terlayani		350	114,887,422	310	27,375,000	310	27,375,000	-	-	0	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah orang yang terlayani		80	670,243,441	50	248,675,000	50	248,675,000	74	157,640,726	148	63.39	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah orang yang terlayani		550	20,753,975	540	7,312,500	540	7,312,500	-	-	0	-	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		persentase capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80	465,001,430	80	97,462,300	80	97,462,300	-	-	0	-	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen elemen akreditasi yang terpenuhi		2	465,001,430	2	97,462,300	2	97,462,300	-	-	0	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase SPM yang mencapai target	%	80.00	144,479,341,067	78.00	48,764,835,901	78.00	9,688,668,868		1,226,798,514		12.66	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/kedokteran yang tersedia	unit	200	84,197,172,000	54	4,003,083,990	54	4,003,083,990	42.00	-	78.00		
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis obat dan BMHP yang tersedia	jenis	12	5,013,649,000	12	3,784,479,878	12	3,784,479,878	12.00	552,591,195	100.00	14.60	
	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah gedung yang terpelihara	unit	5	700,000,000	5	648,305,000	5	648,305,000	2.00	295,805,000	40.00	45.63	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah masyarakat miskin, terlarut dan masalah sosial lainnya yang tertangani	Orang	105	209,410,000	40	172,800,000	40	172,800,000	0.00	-	0.00		
												40.59	16.78	
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat		Persentase Balita Stunting	%	30.49		30.99		30.99		22.03		128.04		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase balita Wasting	%	10.41	-	11.41	163,526,294,113	11.41	218,372,720,455	6.78	53,968,945,293	59.42	24.71	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas	%	80	5,059,563,209	70	1,844,102,816	70	350,000,000	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
												59.42	12.36	
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing		Indeks Pendidikan	Point	61.68										
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.79		13.73		13.73						
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.07		7.04		7.04						
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	100	1,486,214,496,782	99.95	496,806,046,231	99.95	534,406,156,710		4,433,496,235		0.83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	95.28		94.38		94.38				NA		
		Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	98.02		97.57		97.57				NA		
		Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70,6		70		70				NA		
		Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1		1		1				NA		
		Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	18		1:18		1:18				NA		
		Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	1:10		1:12		1:12				NA		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	1,986,884,736	100	696,067,714	100	116,294,000		110,409,000		94.94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian	Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		Persentase sekolah yang melakukan penetapan kurikulum	%	-	-	100		100				NA		
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah peserta bimtek penyusunan silabus muatan lokal SMK	Orang	-	-			100	76,348,000			100		
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah peserta workshop kurikulum SMK	Orang	-	-			100	39,946,000	100		100		
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	208,215,004,195	100	69,288,275,305	100	70,355,384,280		47,249,492,600		67.16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100		99.58		99.58						
		Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	100		100		100						
		Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	100		60		60						
		Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		80		6		6						
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi		Persentase ketersediaan data hasil pemetaan pendidik	%	100		100		100		50		50		
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah data analisis	Dokumen					6	70,065,327,500	3		50		
		Jumlah data analisis	Dokumen					1		1		100		
		JJM	OJ					1580178						
		Jumlah Guru Non PNS Yayasan	Orang					5000		NA		NA		
		Jumlah operator dapodik yang mengikuti Bimtek Opertaor Dapodik	Orang					280		245		87.5		
		Jumlah Tenaga Administrasi (TU) non PNS SMA,	Orang					3150				0		
		Jumlah DUPAK yang diterbitkan	DUPAK					150		120		80		
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Kepsek dan TU yang dievakin							290,056,780					
		Jumlah SK Mutasi yang diterbitkan												
		Jumlah peserta peningkatan kompetensi guru pembina GAB	Orang					160		120		75		
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	6.5	194,889,101	100	65,788,824	100	48,631,600		18,188,600		37.40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	100	831,855,187	35	309,938,698	35	-		-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	11,296,717,332	100	3,711,881,596	100	3,219,669,110	100	510,890,600	100.00	15.87	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		100	-	100		100		100.00		
Kegiatan 1 : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan KewenanganProvinsi		Terlaksananya Pelatihan Kecakapan Pemuda	Orang	160		160	3,189,669,110	160	3,189,669,110	160	2,009,608,977	100	63.00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sub kegiatan 1 : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tk. Provinsi yang terseleksi	Orang	15		15	79,715,200	15	79,715,200	5	32,555,200	33.33	40.84	
	Sub kegiatan 2 : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Dilatih	Orang	100		100	43,257,300	100	43,257,300	0	-	0	-	
	Sub kegiatan 3 : Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	400		100	190,004,910	100	190,004,910	48	28,382,000	12	14.94	
	Sub kegiatan 4 :Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan	Unit	2		2	907,622,400	2	907,622,400	0	26,284,900	0	2.90	
	Sub kegiatan 5 : Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi	Lembaga	20		51	1,943,500,000	51	1,943,500,000	29	1,656,343,000	145	85.22	
	Sub kegiatan 6 : Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda	Orang	60		20	25,569,300	20	25,569,300	20	-	33.33	-	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Presentase Pembinaan Atlet Berprestasi	%	100	31,488,202,013	100	10,438,816,493	100	12,463,530,440	100	7,137,979,300	100.00	57.27	Dinas Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang MenjadiKewenangan Daerah Provinsi		Presentase Sarana Prasarana Olahraga yang Terstandar	%	45		40	4,487,899,000	40	4,487,899,000	33	1,650,564,490	82.5	36.78	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana Prasarana Oahraga yang Dibangun	Unit	2		2	4,487,899,000	2	4,487,899,000	2	44,750,200	100	1.00	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		Jumlah Medali Yang Diperoleh	Medali	45		40	4,424,419,000	40	1,734,281,650	33	13,389,933,500	82.5	772.07	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Event Pemassalan Olahraga	Event	5		5	74,419,000	5	74,419,000	2	12,787,200	40	17.18	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan SingleEvent	Jumlah Peserta Kejuaraan Tk. Nasional dan Internasional	Orang	150		150	4,350,000,000	150	4,350,000,000	150	2,000,000,000	100	45.98	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Jumlah Cabor Yang Dibina	Cabor	3		3	86,712,440	3	86,712,440	3	5,554,500	100	6.41	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlit yang Dibina	Orang	12		12	86,712,440	12	86,712,440	12	555,500	100	0.64	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Dibina	Lembaga	10		32	3,044,500,000	32			19,795,110,000	0		
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan Penerima yang Difasilitasi	Lembaga	10		16	3,044,500,000	32	3,044,500,000	32	3,044,500,000	100	100.00	
												70.40	69.54	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan														
Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	64.56										
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung		Indeks Kualitas Air	Point	43.03		42.93		42.93						
		Indeks Kualitas Udara	Point	87.59		87.56		87.56						
		Indeks Kualitas Air Laut	Point	87.66		87.63		87.63						
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan	%	100	1,024,902,302.60	100.00	337,210,647.80	100.00	181,282,000	100.00	57,298,116	100.00	31.61	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Dokumen RPPLH, IKPLHD, dan IKLH yang disusun	Dokumen	7	602,571,166.34	2	198,256,373.15	2	83,592,000	2	23,772,000	100.00	28.44	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun	Dokumen	1	445,639,676.49	1	146,623,188.98	1	48,540,000	1	10,200,000	100.00	21.01	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH yang tersusun	Dokumen	6	156,931,489.85	2	51,633,184.18	2	35,052,000	2	13,572,000	100.00	38.72	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah KLHS yang disusun dan divalidasi	Dokumen	29	422,331,136.26	7	138,954,274.65	7	97,690,000	7	39,526,116	100.00	40.46	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Kawasan Strategis dan dokumen KLHS kab/kota yang divalidasi	Dokumen	18	218,812,769.16	6	71,993,199.21	6	64,350,000	5	16,300,000	83.33	25.33	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun/divalidasi	Dokumen	24	133,665,362.66	8	43,978,224.48	8	31,600,000	1	23,226,116	12.50	73.50	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun/dilaksanakan	Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun/dilaksanakan	Dokumen	3	69,853,004.43	8	22,982,850.97	8	1,740,000	0	-	-	-	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase usaha/kegiatan yang melakukan pengendalian pencemaran	%	100	2,835,284,286	100	932,857,745	100	998,863,882	0.00	409,455,871	-	40.99	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	2,181,040,532.41	10	717,600,193.65	10	891,694,682	0	301,664,640	-	33.83	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel	846	1,257,588,598.00	282	1,329,483,501.53	282	891,694,682	120	301,664,640	42.55	33.83	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel	846	2,181,040,532.41	282	717,600,193.65	282	95,216,600	120	47,330,000	42.55	49.71	
		Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	unit usaha	30	437,488,380.00	30	208,327,800	30	109,569,800	13	40,037,000	43.33	36.54	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kelompok masyarakat yang memenuhi syarat program kampung iklim	kelompok	20	200,000,000.00	10	100,000,000	10	127,478,200	16	105,950,000	160.00	83.11	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Parameter yang mampu diuji di Balai Laboratorium Lingkungan	parameter	25	1,859,729,564.48	10	611,883,307.88	10	559,430,082	90	108,347,640	900.00	19.37	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	lokasi	3.00	922,203,753.58	3	342,857,551.29	3	107,169,200	0	65,027,000	-	60.68	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah dokumen publikasi hasil pemantauan kualitas lingkungan (air sungai, air laut, udara)	dokumen	3.00	454,243,753.58	1	115,257,551	1	107,169,200	1	65,027,000	100.00	60.68	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase taman kehati yang terkelola	%	100.00	232,926,464	100	100,000,000	100	100,654,200	0	24,347,200	-	24.19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Jumlah lokasi pengelolaan taman kehati	lokasi	1.00	128,583,400.00	1	50,000,000.00	1	100,654,200	0	39,647,200	-	39.39	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	jumlah dokumen siteplan kehati yang ditetapkan	dokumen	1.00	128,583,400.00	1	50,000,000.00	1	100,654,200	0	39,647,200	-	39.39	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase Unit Usaha Penghasil Limbah B3 yang tertib aturan	%	100	232,426,464	90	100,000,000	90	13,114,000	0.00	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3	unit usaha	30	232,426,464.11	30	100,000,000.00	30	13,114,000	0	-	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3	unit usaha	30	232,426,464.11	30	100,000,000.00	30	13,114,000	0	-	-	-	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil pengawasan ketaatan ijin lingkungan	%	100	605,251,864	100	199,138,369	100	1,127,912,900	100.00	27,610,629	100.00	2.45	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah usaha/kegiatan pemegang izin lingkungan yang dibina dan diawasi	unit usaha	60	605,251,863.75	50	199,138,369.13	25	1,127,912,900	3	35,020,129	12.00	3.10	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha/ kegiatan yang difasilitasi perijinan lingkungannya	usaha/kegiatan	30	304,909,970.89	25	100,320,673.05	25	1,082,030,400	24	22,893,129	96.00	2.12	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diawasi	usaha/kegiatan	30	300,341,892.86	25	98,817,696.08	25	45,882,500	3	12,127,000	12.00	26.43	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwijaya tingkat nasional	%	30	632,449,873	10	208,086,986	10	597,673,600	-	46,210,000	-	7.73	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah sekolah yg mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	sekolah	30	632,449,873.25	10	208,086,986.36	10	597,673,600	-	62,794,200.00	-	10.51	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yg mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	sekolah	30	632,449,873.25	10	208,086,986.36	10	597,673,600	-	62,794,200	-	10.51	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok				-							Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pengaduan yang terselesaikan	%	100	641,333,479	100	211,009,847	100	50,003,900	100	15,230,950	100.00	30.46	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	Pengaduan	60	641,333,478.89	20	211,009,846.82	20	50,003,900	-	31,753,000	-	63.50	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang tertangani	Pengaduan	45	319,536,688.77	15	105,133,117.12	15	26,380,100	-	23,932,500	-	90.72	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup yang difasilitasi	pengaduan/kasus	15	321,796,790.12	5	105,876,729.70	5	23,623,800	-	7,820,500	-	33.10	
												64.83	31.22	
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	69.70		69								
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	41	61,710,986,449	41	20,303,985,721	41	45,979,645,559	41.00	4,089,038,773	100.00	8.89	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	-	10	-	10		8.94		89.37		
Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	103.82	1,238,270,457.41	34.00	407,412,474.38	34.00	109,789,900	-	82,797,800	-	75.41	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	103.82	1,238,270,457.41	34.00	407,412,474.38	34.00	109,789,900	-	82,797,800	-	75.41	
Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun	%	100	925,545,561.16	100	304,520,555.23	100	114,841,900	70.00	45,485,000	70.00	39.61	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun	dokumen	27	925,545,561.16	10	304,520,555.23	10	114,841,900	7	45,485,000.00	70.00	39.61	
Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen	3	4,616,641,548.59	1	1,599,952,787.26	1	6,008,356,200	1	336,639,100	100.00	5.60	
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan produksi yang tersusun	Dokumen	3	548,256,117.70	1	180,385,779.35	1	99,995,500	1	38,229,500	100.00	38.23	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Pemegang Izin Usaha dan Kerjasama di HP yang dinilai	Unit	5	219,652,367.17	5	83,053,595.91	5	33,611,000	5	16,660,000.00	100.00	49.57	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung yang dilaksanakan	kegiatan	6	105,800,954.21	2	34,810,350.43	2	10,144,000	2	4,844,000.00	100.00	47.75	
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja KPHP yang dilaksanakan	kegiatan	3	159,370,240.10	1	52,435,575.34	1	50,089,400	1	17,833,900	100.00	35.60	
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja KPHL yang dilaksanakan	kegiatan	3	138,485,027.18	1	45,563,977.76	-	-	-	-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan	unit	15	2,967,996,322.23	5	976,522,308.47	5	5,814,516,300	5	259,071,700	100.00	4.46	
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	41	17,207,045,793.56	41	5,661,416,745.85	41	4,452,911,319	41.00	1,488,404,991	100.00	33.43	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	112,500	4,624,324,801.33	112,500	1,521,483,128.63	112,500	985,949,100	112,500	678,419,300	100.00	68.81	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	211,500	6,947,952,881.86	211,500	2,285,997,100.64	211,500	2,152,077,300	211,500	593,834,993	100.00	27.59	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah kasus Tipihut yang ditangani	kasus	33	1,375,552,817.64	11	452,580,753.84	11	292,408,900	-	29,198,900	-	9.99	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan	kegiatan	3	1,823,717,677.03	5	600,034,771.82	5	755,385,400	5	129,216,400	100.00	17.11	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani	titik	417	2,435,497,615.71	139	801,320,990.92	30	267,090,619	2	57,735,398	6.67	21.62	
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	Unit	24	6,991,212,643.40	12	2,313,291,363.37	12	377,689,580	12	60,637,500	100.00	16.05	
	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	Unit	12	5,933,545,861.44	12	1,952,239,582.86	12	214,454,300	12	57,582,000.00	100.00	26.85	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah IUIPHHBK yang difasilitasi	ijin usaha	10	88,746,168.00	5	42,260,080.00	5	42,260,080	2	1,720,000.00	40.00	4.07	
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luasan HHBK yang dibudidayakan	ha	102.80	968,920,613.96	33.0	318,791,700.51	33.0	120,975,200	-	1,335,500	-	1.10	
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	Industri	11	458,873,190.02	11	150,977,244.63	11	148,804,960	4	32,208,564	36.36	21.64	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	industri	11	458,873,190.02	11	150,977,244.63	11	148,804,960	4	32,208,564	36.36	21.64	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	8,607	30,912,499,242.85	2,869	10,170,748,829.83	2,869	34,767,251,700	2,869	2,212,032,948	100.00	6.36	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen RTnRL yang disusun	dokumen	3	206,346,546.23	1	67,891,595.47	-	-	-	-	-	-	
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	3,268.50	25,035,362,413.64	1,090	8,237,068,797.72	1,090	31,268,910,200	-	2,111,876,498	-	6.75	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	821,835	5,186,703,821.32	274,000	1,706,515,587.98	274,000	3,417,205,900	-	72,745,200	-	2.13	
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Lokasi RHL yang dibina dan dimonitoring	KPH/Tahura	16	484,086,461.67	16	159,272,848.66	16	81,135,600	-	27,411,250	-	33.78	
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30,503	2,843,299,456	30,503.30	935,494,875	30,503.30	316,123,200	30503.3	96,350,200	100.00	30.48	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Taman Hutan Raya yang dikelola	unit	1	1,927,987,905.79	1	634,341,487.00	1	117,125,000	1	117,125,000	100.00	100.00	
	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	luas kawasan TAHURA yang diamankan	ha	3155	585,814,156.74	3155	192,743,026.13	3155	102,125,000	3155	17,300,000	100.00	16.94	
	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Jumlah TSL endemik yang terfasilitasi pengawetannya	jenis	1	321,310,967.94	1	105,716,885.76	1	5,800,000	1	2,500,000	100.00	43.10	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Jumlah kawasan ekosistem wilayah TAHURA yang dipulihkan	ha	366	128,524,387.17	122	42,286,754.31	122	9,200,000	0	-	-	-	
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Sarpras objek wisata yang dibangun	unit	3	715,617,361.57	1	235,450,533.64	1	-	1	-	100.00		
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah KTH mitra konservasi Tahura yang terbentuk	kelompok	6	144,589,935.57	2	47,572,598.59	2	-	2	-	100.00		
	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah dokumen rencana pengelolaan TAHURA yang tersusun	Dokumen	12	32,131,096.79	4	10,571,688.58	4	-	4	-	100.00		
	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	penangkar	24.00	345,259,559.62	24	113,596,388.13	24	-	24	-	100.00		
	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	penangkar	24.00	345,259,559.62	24	113,596,388.13	-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang dikelola	kelompok	8.00	570,051,990.16	8	187,556,999.72	8	198,998,200	8	198,998,200	100.00	100.00	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat pada KEE yang ditingkatkan kapasitasnya	kelompok	16.00	195,869,623.76	16	64,444,506.12	16	44,378,200	16	13,418,200	100.00	30.24	
	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah KEE dan cagar biosfer yang difasilitasi pengembangannya	kelompok/lembaga	8.00	374,182,366.40	8	123,112,493.60	8	154,620,000	8	35,932,000	100.00	23.24	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	15.93	2,125,242,316	5.49	699,241,612	5.49	836,486,800	-	694,425,400	-	83.02	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok	29	2,921,881,515.56	20	1,078,593,611.76	20	836,486,800	-	379,972,400	-	45.42	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	67	137,521,094.28	67	45,246,827.11	67	23,500,000	67	2,800,000	100.00	11.91	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelasnya dari Blue ke Gold/Madya	kelompok	37	197,927,556.25	15	65,121,601.63	15	48,000,000	-	14,370,000	-	29.94	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	kelompok	90	2,464,695,865.03	30	910,255,183.02	30	764,986,800	2	362,802,400	6.67	47.43	
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	32	14,296,328,273	32	4,703,740,157	32	15,312,368,800	-	1,700,532,216	-	11.11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS	32	82,983,248,577	32	33,205,711,287	32	15,312,368,800	-	15,312,368,800.00	-	100.00	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	dokumen	3	328,328,399.48	1	108,025,742.55	-	-	-	-	-	-	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah lembaga pengelolaan DAS yang dikembangkan	lembaga	6	255,442,219.51	6	84,044,924.18	6	81,717,000	1	33,509,500	16.67	41.01	
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	Unit	741	27,077,312,239.95	247	10,876,499,762.19	247	15,230,651,800	-	1,679,913,820	-	11.03	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	90.31	3,017,590,900	18.18	892,236,000	18.18	344,000,000		52,553,884	0	15.28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi		Jumlah PERDA RTR yang telah ditetapkan	Dok			1	-	1	-	0	-	0		
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen persetujuan substansi RTR provinsi NTB yang disetujui	Dok			0	-	0	-	0	-	0		
	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah PERDA RTR yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Dok			0	-	0	-	0	-	0		
Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		Jumlah dokumen materi teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun	Dok			1	-	1	-		-	0		
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang	Orang			0	-	0	-	0	-	0		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen materi teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun	Dok			0	-	0	-	0	-	0		
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen ranperda RTR Kabupaten/kota yang dievaluasi	Dok			1	-	1	-	0	-	0		
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah peserta Sosialisasi Penataan ruang	Orang			500	-	500	-	0	-	0		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		Dok			1	344,000,000	1	344,000,000		52,553,884	0	15.28	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan	Dok			1	344,000,000	1	344,000,000	0	52,553,884	0	15.28	
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah kawasan yang tersedia informasi/database pemanfaatan ruangnya	Dok			1	-	1	-	0	-	0		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			Dok			1	-	1	-		-	0		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Pengakuan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelanggaran Penataan Ruang yang tertangani	Dok			1	-	1	-	0	-	0		
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus pelanggaran penataan ruang	Kasus			1	-	1	-	0	-	0		
Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan		Neraca pengelolaan sampah (%)	%	41.71				85.00				44.36	30.20	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan		Persentase Penanganan Sampah	%	70.00		60.00		60.00		60.00		100.00		
		Persentase Pengurangan Sampah	%	30.00		25.00		25.00		9.34		37.36		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengelolaan sampah	%	100	15,916,448,484	85	5,299,032,825	85	14,443,372,000	85	7,982,696,541	100.00	55.27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Persentase penanganan sampah	%	70	3,148,514,551.19	60	4,200,871,889.62	60	14,443,372,000	39.68	7,043,291,896	66.13	48.76	
	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang beroperasi dengan baik	unit	30	3,148,514,551.19	1	3,658,105,011.99	1	7,961,853,000	1	6,624,989,464	100.00	83.21	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah industri pengolahan sampah dan limbah B3 yang beroperasi	unit	100	3,148,514,551.19	1	118,294,340.81	1	2,097,259,600	1	418,302,432	100.00	19.95	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang operasional	Unit	70	3,148,514,551.19	1	145,189,668.00	1	437,035,400	1	-	100.00	-	
	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kerjasama Pengolahan Sampah	kerjasama	30	3,148,514,551.19	5	279,282,868.81	-	-	-	-	-	-	
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Persentase penanganan sampah	%	70	3,148,514,551.19	60	1,098,160,935.50	60	3,947,224,000	60	669,062,245	100.00	16.95	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Persentase Pengurangan Sampah	%	30	3,148,514,551.19	25	1,098,160,935.50	25	3,947,224,000	9.34	669,062,245	37.36	16.95	
												75.44	34.44	
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi														
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas		Indeks Daya Beli (Point)	%	72.03										
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan		Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	68201.79	14,101,520,368	15428.00	11,601,520,368	15428.00	10,478,111,485	4,985	4,324,541,032	32.31	41.27	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan investor	%	10	1,099,303,769	5	596,026,769	5	521,277,800		62,123,100		11.92	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI		Jumlah dokumen	Dokumen	2	311,507,601	2	256,281,711	5	653,029,400		44,308,600		6.79	
	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan	Dokumen	1	146,948,355	1	120,896,491	1	340,520,000	1	44,308,600	100.00	13.01	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Jumlah dokumen	Dokumen	1	164,559,246	1	135,385,220	1	312,509,400		-		-	
PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI		Jumlah dokumen	Dokumen	2	412,956,380	2	339,745,058	1	98,376,460		17,814,500		18.11	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah dokumen evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal	Dokumen	1	101,227,743	1	83,281,497	1	46,803,120	1	17,814,500	100.00	38.06	
	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	Jumlah peta potensi	Peta	1	311,728,636	1	256,463,561	0	51,573,340	-	-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Calon investor yang berinvestasi	%	80	2,628,846,723	60.00	863,871,915	60.00	202,880,000		202,668,900		99.90	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Promosi	Dokumen	2	1,050,026,808	2	863,871,915	1	665,537,840		202,668,900		30.45	
	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen	Dokumen	1	507,278,116	1	417,344,885	1	420,262,900	1	202,668,900	100.00	48.22	
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen laporan event	Dokumen	1	542,748,692	1	446,527,030	0	245,274,940	-	-	0.00	-	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan	%	93	1,953,548,364	90	641,960,427	90	20,000,000	89	19,736,500	98.89	98.68	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/ kota		Jumlah Layanan Perizinan kewenangan Provinsi lintas Kab/Kota	Izin	4	120,058,076	4	98,773,478	4	95,707,800	4	9,736,500	100.00	10.17	
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah penerbitan izin penanaman modal (NIB) yang ruang lingkupnya lintas kab/kota	Izin	4	120,058,076	4	98,773,478	4	95,707,800	4	9,736,500	100.00	10.17	
Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi		Jumlah Dokumen Layanan Perizinan kewenangan daerah provinsi	Dokumen	3	660,237,761	3	543,186,949	2	225,848,000		10,000,000		4.43	
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik	Jumlah permohonan dan penerbitan izin dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi	Izin dan non izin	3,500	402,744,090	3000	331,343,262	3000	116,920,600	1,292	-	43.07	-	
	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen	Dokumen	1	174,858,775	2	143,858,789	0	70,242,600	-	-		-	
	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah dokumen pengaduan	Dokumen	2	82,634,896	2	67,984,898	1	38,684,800	1	10,000,000	50.00	25.85	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan yang taat LKPM	%	60	2,702,918,671	55	888,212,883	55	676,208,000	13	152,720,000	23.45	22.58	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan yang menyampaikn LKPM	Perusahaan	500	1,079,612,988	500	888,212,883	500	676,208,000	13	152,720,000	23.55	22.58	
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dipantau	Dokumen	4	171,888,232	4	141,414,881	0	215,203,500	-	-		-	
	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dibina	Perusahaan	5	541,270,764	5	445,311,117	310	359,724,500	63	123,530,000	22.58	34.34	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang diawasi	Dokumen	20	366,453,992	20	301,486,886	14	101,280,000	14	29,190,000	28.82	28.82	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian				
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu						
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Cakupan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi	%	100	428,183,869	100	140,706,575	100							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPSTP	Dokumen	2	171,027,294	2	140,706,575	1	49,457,600	-	-	0.00	-		
	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPSTP secara OSS	Dokumen	2	171,027,294	2	140,706,575	1	49,457,600	-	-	0.00	-		
												52.69	20.96		
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.88		23.71		23.71							
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pertumbuhan Populasi Ternak	%	10	135,417,101,158	9.5	44,798,298,458	9.5	35,016,783,572		7,128,818,947		20.36		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		Distributor Obat Hewan Yang Diawasi	toko/depo	20	63,125,609	15	61,261,783	10	28,127,000	10	11,508,000	100	40.91		
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Sampel Obat Hewan yang diambil	sampel	10	36,586,113	10	35,505,884	10	12,455,000	9	6,436,000	90	51.67		
	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Laporan yang dihasilkan	laporan	1	26,539,495	1	25,755,899	1	15,672,000	1	5,072,000	100	32.36		
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Bibit Ternak yang Diadakan	ekor	1000	39,526,600,117	1000	38,765,003,041	14259	31,501,995,212		2,498,556,082	0	7.93		
		Jumlah Alat Pengolah Pakan yang Diadakan	unit	45	1,500,000,000	10	1,000,000,000	10	205,600,000	10		100	-		
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak sapi/kerbau/kambing/unggas yang diadakan	ekor	1000	37,579,815,152	1,000	37,573,722,504	14259	31,501,995,212		2,479,396,082	0	7.87		
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Kelompok pakan	kelompok	30	1,946,784,965	25	1,191,280,537	25	205,600,000	25	19,160,000	100	9.32		
		Jumlah alat pengolah pakan yang diadakan	unit	15	1,500,000,000	10	1,000,000,000	10		10		100			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Cakupan Produksi Hasil Ternak Yang Dipasarkan	%	10	135,417,101,158	9.5	44,798,298,458	9.5	35,016,783,572		7,128,818,947		20.36		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Penataan Prasarana Pertanian		Unit pelayanan yang terpelihara	unit	9	206,477,480	6	200,381,096		-		-	-			
	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Jumlah gedung RSH dipelihara	unit	1	206,477,480	1	200,381,096		-		-	-			
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang dikembangkan	lokasi	2	304,792,377	2	295,977,115	2	65,980,000		-	0	-		
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak	laporan	1	149,092,137	1	144,874,027	1	37,180,000		-	0	-		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Frekwensi pengawasan	kali	12	155,700,241	12	151,103,088	12	28,800,000		-	0		
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	%	< 1	8,463,555,546	< 1	2,799,889,261	< 1	1,824,179,599		450,670,600		24.71	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		PHMS yang dikendalikan	penyakit	5	688,098,844	5	665,179,413	5	345,956,450	5	115,581,000	100	33.41	
	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Vaksin Anthrax, SE dan AI yang diadakan	dosis/ jenis	30000	211,067,826	30,000	203,968,289	15000	162,822,000		37,852,000	0	23.25	
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pemetaan yang dihasilkan	laporan	1	216,182,805	1	208,932,245	1	54,156,500		22,683,600	0	41.89	
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Penyediaan obat-obatan dan peralatan pelayanan	jenis/ekor	20	260,848,214	15	252,278,879	15	128,977,950	9	55,045,400	60	42.68	
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Jumlah Unit Usaha Produk Peternakan/RPH/RPU/TPH diawasi	unit	61	531,226,609	61	512,938,934	73	113,155,000	73	54,923,000	100	48.54	
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan Hasil penilaian resiko keamanan produk hewan	laporan	1	191,801,772	1	185,271,079	1	58,508,000		24,788,000	0	42.37	
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Frekwensi Pengawasan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	kali	4	178,840,198	4	172,692,204	10	29,497,000	10	8,080,000	100	27.39	
	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Frekwensi pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan lintas provinsi	kali	12	160,584,639	12	154,975,652	12	25,150,000	12	22,055,000	100	87.69	
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah RPH dan Kelompok Pengolah Hasil Peternakan yang Tersertifikasi		5	724,045,979	5	700,932,804	5	519,373,100	5	83,446,000	100	16.07	
	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah RPH/ Unit Usaha Produk Ternak Ber NKV (unit)	unit	5	218,156,134	5	210,847,311	5	19,832,100		7,800,000	0	39.33	
	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah UMKM Ber NKV/ Bersertifikat (unit)	unit	15	505,889,844	10	490,085,493	5	499,541,000		75,666,000	0	15.15	
Kesejahteraan Hewan		Jumlah Pematangan Betina Produktif yang Dikendalikan Di RPH	persen	1	437,273,131	1	422,627,115	1	63,548,300		42,001,000	0	66.09	
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah peserta bimtek NKV	orang	50	217,242,515	50	209,960,667	50	31,667,300	30	15,440,000	60	48.76	
	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah RPH Diawasi	unit	61	220,030,616	61	212,666,447	73	31,881,000	73	26,561,000	100	83.31	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	100	1,278,805,431	100	423,050,759	100	257,724,100		81,456,425		31.61	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah produk hasil peternakan yang dipamerkan	kegiatan	10	260,536,230	10	252,843,726	10	193,633,000		40,817,825	0	21.08	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah produk hasil peternakan yang dipamerkan	kegiatan	10	260,536,230	10	252,843,726	2	193,633,000	1	40,817,825	50	21.08	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah Kelompok Berbasis Korporasi	korporasi	3	175,485,402	3	170,207,032	3	64,091,100		16,620,000	0	25.93	
	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	jumlah koorporasi tersosialisasi	korporasi	3	93,430,599	3	90,574,952	3	27,391,600	3	6,780,000	100	24.75	
	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi yang dibina	lembaga	5	44,498,718	3	43,184,864	3	18,210,000	3	9,840,000	100	54.04	
	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi yang dievaluasi	dokumen	5	37,556,085	3	36,447,217	3	18,489,500	3	-	100	-	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Fasilitas Sarana Pertanian	%	2.05	64,204,913,319	1.99	19,956,291,589	1.99	22,079,029,111		5,362,325,421		24.29	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				75	14,375,159,070			100	5,997,010,955	6	110,414,400	6.00	1.84	
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian pra panen yang diadakan/ diserahkan ke kelompok tani		75	14,375,159,070			335	5,997,010,955	6	110,414,400	1.79	1.84	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				4048	49,305,227,080			100	15,459,878,056	-	1,694,206,721	-	10.96	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Luasan bantuan benih hortikultura		148	7,006,789,800			9	976,914,591	-	241,100,000	-	24.68	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Luas bantuan benih tanaman pangan		2,370	6,620,607,880			23	107,391,727	-	24,890,000	-	23.18	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Luas bantuan pengembangan tanaman perkebunan		1,530	35,677,829,400			620	14,375,571,738	-	1,428,216,721	-	9.94	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Persentase ketersediaan benih tanaman	%	498	6,620,607,880			1	503,129,400	-	259,197,200	-	51.52	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Benih Bermutu Tanaman Pangan		498	6,620,607,880			96.0	503,129,400	-	259,197,200	-	51.52	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Persentase ketersediaan benih tanaman	%	444,885	71,355,658,800			2	117,407,700	-	16,472,000	-	14.03	
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikasi benih perkebunan yang terbit		273	35,677,829,400			1	73,291,700	-	11,072,000	-	15.11	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah benih /bibit sumber perkebunan		444,612	35,677,829,400			91	44,116,000	-	5,400,000	-	12.24	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Persentase ketersediaan benih tanaman	%	5,793	35,677,829,400			1	1,603,000	-	-	-	-	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah kebun benih yang direhabilitasi		5,793	35,677,829,400			1	1,603,000	-	-	-	-	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	%	96.79	267,360,989,055	65.56	79,975,449,202	65.56						Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	10	-	2	-	2	110,675,623,679		28,005,475,000		25.30	
Penataan Prasarana Pertanian				708	210,857,059,574			270	110,675,623,679	-	16,457,485,000	-	14.87	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani Yang Dibuat/dibangun		553	111,490,096,051			221	67,608,689,737	-	12,233,210,000	-	18.09	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Yang Dibuat/dibangun		153	35,937,090,995			48	13,540,623,323	-	4,220,095,000	-	31.17	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Unit prasarana pertanian lainnya yang diadakan		2	63,429,872,528			1	29,526,310,619	-	4,180,000	-	0.01	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96.5	1,229,042,136	96	434,192,818	96	42,385,000		42,385,000		100.00	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengendalian dan Penganggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luasan Pengendalian OPT (Perkebunan)		1995	802,442,000			1	42,385,000	-	42,385,000	-	100.00	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luasan Pengendalian OPT (Perkebunan)		1995	802,442,000			1	42,385,000	-	42,385,000	-	100.00	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	100	18,894,573,000	70	6,731,344,000	70	5,394,665,500		1,929,101,754		35.76	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Persentase BPP yang meningkat klasifikasi kelas BPP nya	%	607	7,854,246,000			1	560,000,000	-	127,500,000	-	22.77	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah siswa SMKP Pertanian Mtrm yang difasilitasi		607	7,854,246,000			5	560,000,000	-	127,500,000	-	22.77	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Persentase BPP yang meningkat klasifikasi kelas BPP nya	%	360	7,854,246,000			1	785,016,500	-	169,875,000	-	21.64	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah siswa SMKP Pertanian Bima yang difasilitasi		360	7,854,246,000			5	785,016,500	-	169,875,000	-	21.64	
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian (ASN/THL dan Swadaya/Swasta) Yang ditingkatkan kapasitasnya		640	2,546,319,100			730	2,400,000,000	78	519,459,540	10.68	21.64	
	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh ASN/THL yang ditingkatkan kapasitasnya		490	1,785,504,100			420	1,490,000,000	43	299,940,160	10.24	20.13	
	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah penyuluh Swadaya/Swasta yang ditingkatkan kapasitasnya		150	760,815,000			310	910,000,000	35	219,519,380	11.29	24.12	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Persentase BPP yang meningkat klasifikasi kelas BPP nya	%	130	13,947,245,700			20	1,649,649,000	-	132,776,820	-	8.05	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang di bina		115	7,854,246,000			1	737,386,900	-	132,776,820	-	18.01	
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti		15	6,092,999,700			60	912,262,100	-	-	-	-	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	-	10	-	10	45,979,645,559		4,089,038,773		8.89	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Cakupan wilayah laut, pesisir dan PPK yang terkelola secara berkelanjutan	%	4.51	15,330,163,046	4.51	4,909,615,839	4.51	6,600,444,500	4.51	1,398,581,216	100.00	21.19	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas ruang laut dan pesisir yang terkelola	Ha	183,881.43	500,000,000	126,311	429,130,000	126311	2,632,921,500	126,311		100.00		
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar miyak dan gas bumi yg sudah berizin	unit	15.00	60,156,999	12.00	54,514,221	12	13,173,000					
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir yang mandiri	Orang	15	3,338,340,368	10	3,025,201,219	10	3,954,350,000					
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	256,572	11,895,178,174	249,099	8,708,211,521	249,099	11,712,137,504	234,423	2,683,714,900	94.11	22.91	Dinas Kelautan dan Perikanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung		
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Produksi Perikanan Tangkap Non pelabuhan	Ton	234,572	2,178,957,843	227,099	1,667,548,153	227099	2,140,814,404					
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Persentase Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang memiliki izin usaha perikanan tangkap	%	35	380,000,000	30	350,000,000	30		100			333.33	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Persentase Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	%	100.00	55,000,000	75.00	25,000,000	75						
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terdaftar	Kapal	500.00	265,000,000	500.00	220,000,000	500						
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM (Unit)	Unit	1.00	600,000,000	1.00	740,000,000	1	9,568,803,100					
	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terbit	Izin	50.00	77,000,000	50.00	70,000,000	50	2,520,000					
	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Jumlah Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang terdaftar	Unit	220.00	119,724,941	200.00	108,494,640	200						
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terdaftar	Unit	550.00	275,000,000	500.00	250,000,000	500	-					
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (termasuk budidaya lobster, KRPL/P2L)		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1,243,385	32,728,577,394	1,219,005	3,795,727,604	1,219,005	7,922,216,100		1,276,899,975		16.12	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang memiliki izin	Dokumen	5	100,000,000	5	50,000,000	5						
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut yang tersedia	Unit	15.00	3,594,515,654	15.00	1,668,769,576	15	7,922,216,100					
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut BPPBLP LABUAN LALAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut yang tersedia	Unit	3.00	497,919,483	3.00	451,214,213	3	2,285,412,000					
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut BPBPP SEKOTONG	Produksi benih ikan laut di wilayah pulau lombok	Ekor	250,000	1,628,498,337	200,000	1,475,743,815	650000	1,679,138,000					
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	99.93	8,942,779,585	99.92	1,962,524,606	99.92	3,124,980,000		1,329,947,330		42.56	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil (INDUK)	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	99.93	106,793,114	99.92	151,147,779	99.92	3,124,980,000	99.91			99.99	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Produksi olahan hasil perikanan	Ton	215700	2,897,006,721	214373	1,352,738,477	214373	105,212,040		14,205,000		13.50	Dinas Kelautan dan Perikanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi penerbitannya	izin	5	120,301,967	5	109,017,540	5						
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Produksi olahan hasil perikanan dari pelaku usaha yang menerapkan GMP	Ton	21.570	547,427,611	21,437	1,007,699,745	21437	92,727,040					
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah stok ikan yang tersedia dan tersalurkan sebagai bahan baku industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Ton	384,270	60,222,089	365,971	54,573,206	365971	12,485,000					
												37.35	27.15	
Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin		Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%	100.00		100.00		100.00		100		100.00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	-	85	163,526,294,113	85	218,372,720,455		53,968,945,293		24.71	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	2,356,150,635	100	788,655,091	100	465,862,650	45	179,960,321	45	38.63	Dinas Sosial
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		Jumlah PMB,KPO dan KTK yang dipulangkan ke daerah asal	Jiwa					400	-	179	-	45	0.00	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Orang PMB,KPO dan KTK yang diberikan Fasilitas Pemulangan ke Daerah Asal	Jiwa					400	465,862,650.00	179	164,075,321.00	45	35.22	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	4.5	53,397,902,044	3.5	17,873,444,354	3.5	13,249,261,500	0.13	5,576,207,246	3.71	42.09	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		Jumah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani	Jiwa					500		400				
	Penyediaan Permakanan	Jumah disabilitas mental yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dasar dalam Panti	Jiwa					100	1,281,000,000.00	100	531,987,000.00	100.00	41.53	
	Penyediaan Sandang	Jumah disabilitas mental yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang dasar dalam Panti	Jiwa					100	70,000,000.00	100	164,075,321.00	100.00	234.39	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumah disabilitas mental yang diberikan kebutuhan pengasramaan dalam Panti	Jiwa					0	-	0	-	0.00	0.00	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumah penyandang disabilitas yang diberikan kebutuhan alat bantu/ aksesabilitas	Jiwa					400	589,250,000.00	400	569,409,375.00	100.00	96.63	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumah disabilitas mental yang diberikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dalam Panti	Jiwa					100	109,875,000.00	100	46,386,850.00	100.00	42.22	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumah disabilitas mental yang diberikan bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial dalam Panti	Jiwa					100	46,560,000.00	100	20,400,000.00	100.00	43.81	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
						Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah disabilitas mental yang diberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Panti	Jiwa					100	25,564,000.00	100	2,874,000.00	100.00	11.24	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Laporan	Laporan					0	-	0	-	0.00	0.00	
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumlah anak terlantar yang tertangani	Jiwa					5,245		245		0.00		
	Pengasuhan	Jumlah anak terlantar yang diberikan pemenuhan pengasuhan dalam Panti	Jiwa					245	90,000,000.00	140	42,500,000.00	57.14	47.22	
	Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dasar dalam Panti	Jiwa					245	1,698,010,000.00	140	855,859,000.00	57.14	50.40	
	Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang dasar dalam Panti	Jiwa					245	170,500,000.00	140	99,950,000.00	57.14	58.62	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah anak terlantar yang diberikan kebutuhan pengasramaan dalam Panti	Jiwa					245	85,259,500.00	140	56,554,000.00	57.14	66.33	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang diberikan kebutuhan perbekalan kesehatan dalam Panti	Jiwa					245	82,316,750.00	140	21,045,000.00	57.14	25.57	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang diberikan bimbingan fisik, mental dan sosial dalam Panti	Jiwa					245	725,748,600.00	140	541,124,572.00	57.14	74.56	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak terlantar yang diberikan layanan pendidikan dasar dalam Panti	Jiwa					245	274,820,000.00	140	109,145,000.00	57.14	39.72	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak terlantar yang diberikan kebutuhan reunifikasi dalam Panti	Jiwa					245	35,000,000.00	140	21,050,000.00	57.14	60.14	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan penanganan korban tindak kekerasan anak	Jiwa					5000	3,632,953,110.00	105	100,128,000.00	2.10	2.76	
		Jumlah laporan	Laporan					3	113,000,000.00	1	20,000,000.00	33.33	17.70	
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		Jumlah lanjut ar yang tertangani	Orang									0.00		
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Lansia terlantar yang di berikan pemenuhan kebutuhan permakanan dalam Panti	Orang					130	1,723,120,000.00	130	612,228,300.00	100.00	35.53	
	Penyediaan Sandang	Kapasitas Lansia terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuahan sandang dalam Panti	Orang					130	87,297,000.00	130	87,297,000.00	100.00	100.00	
	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Jumlah LANSIA terlantar yang mendapatkan kebutuhan pengasramaan dalam panti	Orang					130	160,616,900.00	130	132,797,900.00	100.00	82.68	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah ketersediaan alat bantu bagi Lansia dalam panti	Orang					130	-	0	-	0.00	0.00	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Lansia yang mendapatkan fasilitas kesehatan dalam panti	Orang					130	162,465,380.00	130	52,659,950.00	100.00	32.41	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Lansia Terlantar yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial dapan Panti	Orang					130	133,500,000.00	130	46,030,000.00	100.00	34.48	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Lansia Terlantar yang di berikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Panti	Orang					130	10,800,000.00	50	3,900,000.00	38.46	36.11	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Lansia terlantar dalam panti pemerintah yang mendapatkan reunifikasi	Orang					130	27,500,000.00	50	7,860,000.00	38.46	28.58	
	Pemulsaan	Jumlah Lansia terlantar dalam panti pemerintah yang dapat layanan pemulsaan	Orang					25	39,450,000.00	5	8,495,000.00	20.00	21.53	
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti										0.00		
	Penyediaan Permakanan	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dalam Panti	Orang					75	475,125,000.00	75	396,312,250.00	100.00	83.41	
	Penyediaan Sandang	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang dalam Panti	Orang					75	34,650,000.00	75	30,250,000.00	100.00	87.30	
	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan asrama dalam Panti	Orang					75	8,406,700.00	75	3,768,200.00	100.00	44.82	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan Kesehatan dalam Panti	Orang					75	3,591,560.00	75	3,591,560.00	100.00	100.00	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan Bimbingan dalam Panti	Orang					75	67,500,000.00	75	51,300,000.00	100.00	76.00	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumah Gepeng yang diberikan bimbingan aktivitas sehari-hari dalam Panti	Orang					75	-	0	-	0.00	0.00	
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumah Gepeng yang diberikan Bimbingan keterampilan dasar dalam Panti	Orang					75	380,837,500.00	75	370,837,500.00	100.00	97.37	
	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dalam Panti	Orang					75	-	0	-	0.00	0.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Laporan	Laporan					1	15,000,000.00	0	-	0.00	0.00	
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti										0.00		
	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di penuhi kebutuhan permakanan di dalam panti	Orang					35	321,383,900.00	25	184,975,000.00	71.43	57.56	
	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di penuhi kebutuhan sandang di dalam panti	Orang					35	52,000,000.00	25	45,250,000.00	71.43	87.02	
	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di penuhi kebutuhan sarana prasaran asrama/wisma di dalam panti	Orang					35	9,400,000.00	0	-	0.00	0.00	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di penuhi kebutuhan kesehatan di dalam panti	Orang					35	46,456,600.00	25	18,749,500.00	71.43	40.36	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang diberikan bimbingan dalam panti	Orang					35	44,089,000.00	25	18,064,500.00	71.43	40.97	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan bimbingan aktivitas sehari-hari dalam panti	Orang					35	3,715,000.00	0	-	0.00	0.00	
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang diberikan bimbingan keterampilan dasar dalam panti	Orang					35	362,500,000.00	25	209,685,000.00	71.43	57.84	
	Pemulangan ke Daerah Asal	Volume bagi PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang teridentifikasi dan dipulangkan ke daerah asal	Orang					35	50,000,000.00	25	22,615,000.00	71.43	45.23	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang di berikan pemberdayaan diluar HIV AIDS dan NAPZA	Orang					50	-	0	-	0.00	0.00	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	37,283,915,612	100	12,479,741,066	100	7,379,566,000	45.00	2,319,200,750	45.00	31.43	Dinas Sosial
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal														
	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah rekomendasi pengangkatan anak antar WNI	Rekomendasi					10	-	0	-	0	0.00	
	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah rekomendasi pengangkatan anak oleh orang tua tunggal	Rekomendasi					3	-	0	-	0	0.00	
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM penerima bantuan keluarga cakupan provinsi terfasilitasi	KPM					100	-	0	-	0	0.00	
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK Fakir Miskin yang tertangani melalui bantuan sosial kelompok	KK					2000	4,208,580,000.00	575	2,318,709,750.00	29	55.09	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KK Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	KK					1200	3,170,986,000.00	230	279,680,000.00	19	8.82	
												50.00	41.75	
Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan		Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	87.20	43,679,831,329	86.70	14,468,336,276	86.70	11,184,035,581	90.40	4,348,327,550	104.27	38.88	
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%	86.62	770,871,786	79.62	300,963,367	79.62	-	79.62	-	100.00		Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya	Persen	9	770,871,786	3	300,963,367	0	-	0	-	-	-	
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun	Unit	6	594,908,418	2	215,000,000	0	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang dibangun	Unit	1	45,000,000				-	-	-	-	-	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang dibangun	Unit	2	130,963,367	1	85,963,367	0	-	-	-	-	-	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Persentase Ketersediaan informasi Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100	11,466,150,864	100	3,778,523,930	100	1,950,143,300	100	502,114,850	100.00	25.75	Dinas Ketahanan Pangan
		Tingkat ketersediaan energi	KKal/kapita/tahun	8294.57	303,393,880	8041.19	100,158,000	8041.19	29,660,000	4779.47	15,458,700	59.44	52.12	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
		Persentase Ketersediaan informasi Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100.00	770,949,100	100.00	278,000,000	100.00	117,832,600	100.00	27,827,750	100.00	23.62	
		Persentase stok cadangan pangan pemerintah	%	22.69	1,018,510,000	17.70	405,000,000	6.00	162,814,300	6.00	141,118,250	33.89	86.67	
		Tingkat konsumsi energi	KKal/kapita/hari	2,640.80	9,373,297,884	2,563.50	2,995,365,930	2,563.50	1,639,836,400	2,442.00	266,352,900	95.26	16.24	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Tingkat akurasi data laporan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Persen	100	303,393,880	100	100,158,000	100	29,660,000	100	15,458,700	100.00	52.12	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Jenis Laporan Analisis Ketersediaan Pangan	Dokumen	2	303,393,880	2	100,158,000	2	29,660,000	1	15,458,700	50.00	52.12	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Tingkat akurasi data laporan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan (Persen)	Persen	100.00	770,949,100	100.00	278,000,000	100.00	117,832,600	100.00	27,827,750	100.00	23.62	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Stok Cadangan Masyarakat (CPM)	Ton	25	230,000,000	10	100,000,000	3	26,015,000	0	565,000	-	2.17	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Laporan Analisis Distribusi Pangan	Dokumen	6	265,000,600	2	90,000,000	2	20,229,500	2	14,721,250	100.00	72.77	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah LDPM/PUPM/Pasar Mintra Tani yang dibina	Unit	3	275,948,500	1	88,000,000	1	71,588,100	1	12,541,500	100.00	17.52	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Kadar air maksimal Cadangan Pangan Pemerintah (Persen)	Persen	14.00	1,018,510,000	14.00	405,000,000	14.00	162,814,300	14.00	141,118,250	100.00	86.67	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi	Ton	151	1,018,510,000	30	405,000,000	30	162,814,300	10	141,118,250	33.33	86.67	
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Rasio konsumsi sayur dan buah terhadap konsumsi ideal	%	90	9,373,297,884	90	2,995,365,930	90	1,639,836,400	96.9	266,352,900	107.67	16.24	
	Promosi Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Event Promosi yang diikuti	Event	3	242,509,084	1	75,427,930	1	37,000,000	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BSA)	Jumlah KRPL/P2L yang dikembangkan	KRPL/P2L	144	9,130,788,800	40	2,919,938,000	24	1,602,836,400	24	266,352,900	60.00	16.62	
		Jumlah orang yang menerima informasi Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Orang	3600	-	1200	-	1200	-	1100	-	91.67		
Program Penanganan Kerawanan Pangan		Prevalensi Ketidakkupuan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	3.77	1,141,837,902	5.77	358,435,000	5.77	465,253,000	2.97	377,530,500	51.47	81.15	Dinas Ketahanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi	Persen	12	1,268,451,063	12	485,048,161	12	465,253,000	10	222,135,500	83.33	47.75	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Kelompok/sekolah yang ditumbuhkan dalam rangka penanganan kerawanan pangan	Kelompok/ Sekolah	8	540,951,063	3	235,048,161	2	-	-	-	-		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KK Penerima Bantuan Penanganan Kerawanan Pangan	Orang	1500	727,500,000	500	250,000,000	2750	465,253,000	2750	222,135,500	550.00	47.75	
Program Pengawasan Keamanan Pangan		Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	90.00	1,857,153,698	85.00	679,047,614	85.00	190,702,080	100	108,274,900	117.65	56.78	Dinas Ketahanan Pangan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1) Tingkat akurasi informasi pangan segar berbasis data pengawasan	Persen	100	495,420,000	100	120,000,000	100	42,285,100	100	19,814,000	100.00	46.86	
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Petugas, Pelaku Usaha serta Masyarakat yang memahami Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Orang	150	495,420,000	50	120,000,000	50	42,285,100	100	19,814,000	200.00	46.86	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2) Tingkat akurasi pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persen	80	828,192,667	80	316,179,691	80	77,898,780	80	28,620,500	100.00	36.74	
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang disertifikasi dan diawasi	Sertifikat	195	828,192,667	65	316,179,691	65	77,898,780	0	28,620,500	-	36.74	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2) Tingkat akurasi pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persen	80	533,541,031	80	242,867,923	80	70,518,200	80	40,010,400	100.00	56.74	
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Frekwensi Bimwas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Kali	100	252,737,289	4	115,046,036	4	44,418,200	3	30,330,400	75.00	68.28	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji	Komoditi	100	280,803,742	20	127,821,888	20	26,100,000	8	9,680,000	40.00	37.09	
												80.84	44.21	
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Cakupan Air Minum	%	80.59		78.45		78.45						
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Cakupan air minum	%	80.59	10,224,348,000	78.45	3,337,898,000	78.45	3,389,577,709		596,436,709		17.60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan	SR			240	3,389,577,710	240	3,389,577,710		197,010,000	1.25	5.81	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis SPAM yang tersusun	Dok			4	218,260,001	4	218,260,001	0		0	-	
	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah/KK terlayani SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun	SR			240	3,171,317,709	240	3,171,317,709	0	197,010,000	0	6.21	
												0.42	7.41	
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	82.46		80.91		80.91						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100	-	97.00	163,526,294,113	97.00	218,372,720,455		53,968,945,293	-	24.71	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	253391.4	587,290,665,869	84,488	163,032,669,005	84,488	294,902,299,364		65,634,840,724		22.26	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Luasan Prasarana dalam kondisi baik	Ha											
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			%	100	587,290,665,869	100	163,032,669,005	100	294,902,299,364	-	44,188,406,024			
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tersedianya Perencanaan penyediaan PSU Permukiman	dok	3	1,029,079,161	1	285,673,742	1	200,000,000	-	69,226,400			
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Tersedianya Penyediaan Prasarana, Srana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang fungsi permukiman	paket	2931	586,261,586,708	814	162,746,995,263		294,702,299,364	-	44,119,179,624			
													23.49	
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Rasio Elektrifikasi	%	99.99	18,005,408,000	99.88	255,882,935	99.88	255,882,935	99.98	39,221,000	100.10	15.33	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		Prosentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	%	5.57	1,991,688,898	5.64	643,295,009	5.64	130,469,100		55,844,442		42.80	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PENATAUSAHAAN IZIN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN SAMPAI DENGAN (SEPULUH RIBU) TON PER TAHUN		Persentase kelompok tani dan pengusaha yang lulus bimtek perizinan niaga BBN sebagai bahan bakar lain dengan nilai diatas 70	%	100	214,456,006	100	35,172,800	100	35,172,800	0.0	10,906,242	0	31.01	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi	6	131,729,920	2	21,264,000	2	21,264,000	0.0	7,806,242	0	36.71	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Izin	Izin	6	82,726,086	2	13,908,800	2	13,908,800	0.0	3,100,000	0	22.29	
PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI DI WILAYAH PROVINSI		Persentase masyarakat yang lulus sosialisasi konservasi energi dengan nilai diatas 75	%	80	1,667,873,204	80	95,296,300	80	95,296,300	0.0	28,889,700	0	30.32	
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	356,100,249	1	27,697,600	1	27,697,600	0.0	4,380,000	0	15.81	
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Orang	Orang	300	268,073,492	75	40,819,100	75	40,819,100	0.0	14,710,000	0	36.04	
	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun	Unit	46	1,043,699,463	0.0	26,779,600	0	26,779,600	0.0	9,799,700	0	36.59	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	%	99.99	5,546,102,425	99.88	1,791,333,986	99.88	255,882,935		47,957,000		18.74	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PENATAUSAHAAN IZIN USAH PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NON BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK SERTA PENYEWAAN JARINGAN KEPADA PENYEDIA TENAGA LISTRIK DALAM DAERAH PROVINSI		Jumlah Izin	Izin		285,942,199	82	60,996,700	82	60,996,700	0.0	9,301,000	0	15.25	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pertek	Pertek	90	178,715,304	50	27,917,600	50	27,917,600	0.0	4,341,000	0	15.55	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin	Izin	90	107,226,895	32	33,079,100	32	33,079,100	0.0	4,960,000	0	14.99	
PENATAUSAHAAN IZIN OPERASI YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI		Jumlah izin operasi ketenagalistrikan yang dikendalikan	Izin	90	285,885,367	0	-	0	-	0.0	-	0		
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	Rekomendasi	90	178,694,216	0	-	0	-	0.0	-	0		
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	Izin	90	107,191,152	0	-	0	-	0.0	-	0		
PENGANGGARAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PEDESAAN		Jumlah Rumah Tangga Sasaran	RTS	2,900	4,807,801,220	100	194,886,235	100	194,886,235	0.0	29,920,000	0	15.35	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	268,073,492	0	-	0	-	0.0	-	0		
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang dibangun	RTS	2,900	4,539,727,728	100	194,886,235	100	194,886,235	0.0	29,920,000	0	15.35	
												0.00	24.77	
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	68.95		65.80		65.80						
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	7,063,959,946	100	2,526,185,090	100	454,660,300		120,114,200		26.42	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Rumah tangga menempati hunian layak	%	98.91	-	98.86		98.86						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			%	100	1,227,471,539	100	438,963,460	100	181,270,600	-	49,704,000	-	27.42	
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Terdatanya tingkat kerusakan rumah akibat bencana	dok	3	620,411,785	1	221,869,180	1	48,508,000	-	14,204,000	-	29.28	
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Terdatanya dan terverifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program provinsi	%	100	607,059,754	100	217,094,280	100	132,762,600	-	35,500,000	-	26.74	
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			%	100	997,844,228	100	356,845,060	100	25,472,300	-	1,350,000	-	5.30	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	ok	210	425,158,412	70	152,043,450	70	25,472,300	-	1,350,000	-	5.30	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		%	100	4,838,644,180	100	1,730,376,570	100	247,917,400	-	40,280,000	-	16.25	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	unit	169	4,838,644,180	60	1,730,376,570	60	247,917,400	-	40,280,000	-	16.25	
												0.00	19.12	
Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Inflasi	%	3,0 - 4,0		3,0 - 4,0		3,0 - 4,0		5.04		32.00		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Cakupan Pengawasan Legalitas/Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%	80	874,409,856	70	289,831,387	70	326,118,500		120,498,800		36.95	Dinas Perdagangan
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)		Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-MB diterbitkan Bagi Distributor	Pertimbangan Teknis	7	90,000,000	6	88,621,300	6	78,621,300	0	0.00	0	0	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	7	90,000,000	6	88,621,300	6	78,621,300	0	0.00	0	0	
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-Bahan Berbahaya (B2) diterbitkan Bagi Distributor	Pertimbangan Teknis	6	93,000,000	6	90,408,400	6	80,408,400	4	13,347,794.40	67	16.6	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	6	93,000,000	6	90,408,400	6	80,408,400	-	13,347,794.40	0	16.6	
Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Terkendali	Usaha	7	186,000,000	6	194,088,800	6	167,088,800	6	57,378,293.92	100	34.34	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	6	93,000,000	6	92,924,600	6	82,924,600	6	28,476,307.64	100	34.34	
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Laporan	6	93,000,000	6	101,164,200	6	84,164,200	3	37,208,992.82	50	44.21	
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase SKA yang diterbitkan	%	100	50,000,000	-	-	-	-		0.00			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	175	50,000,000	-	-	-	-		0.00			
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	5,179,316,326	4	1,716,733,208	4	299,496,600	4.46	35,440,000	111.50	11.83	Dinas Perdagangan
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Komoditi Bapokting Terjamin Ketersediaan Stock dan Harga di Tingkat Provinsi	Komoditi	32	80,000,000	32	69,986,300	32	69,986,300	32	12,716,510.71	100	18.17	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	8	40,000,000	7	38,007,900	7	38,007,900	3	9,178,907.85	43	24.15	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	8	40,000,000	7	31,978,400	7	31,978,400	3	3,540,008.88	43	11.07	
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		Jumlah Komoditi Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi	Komoditi	32	250,000,000	32	229,510,300	32	229,510,300	32	22,721,519.70	100	9.9	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	12	100,000,000	12	86,010,300	12	86,010,300	6	6,356,161.17	50	7.39	
	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	12	150,000,000	11	143,500,000	11	143,500,000	5	16,359,000.00	45	11.4	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		Jumlah Kabupaten/Kota Terawasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Kab/Kota	10	100,000,000	-	-	-	-	-	0.00		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	4	100,000,000	-	-	-	-	-	0.00			
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	7	4,070,555,572	5	1,349,224,006	5	778,894,800	(39)	266,520,900	(780.00)	34.22	Dinas Perdagangan
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		Jumlah UKM Berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	UKM	6	1,800,000,000	5	1,709,758,500	5	778,894,800	3	225,957,381.48	60	29.01	
	Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	12	850,000,000	10	811,117,500	10	203,517,500	0	0.00	0	0	
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	40	200,000,000	38	183,156,100	30	183,156,100	30	26,740,790.60	100	14.6	
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	12	300,000,000	11	323,263,700	9	-	0	0.00	0	0	
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	12	250,000,000	11	231,971,800	9	231,971,800	9	199,495,748.00	100	86	
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	10	200,000,000	10	160,249,400	10	160,249,400	0	0.00	0	0	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	90	3,914,544,303	85	1,297,512,601	85	2,263,843,900	90	1,023,708,600	105.88	45.22	Dinas Perdagangan
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus Sengketa Konsumen yang ditangani diseluruh di Kab/Kota	Kasus	55	2,280,000,000	50	2,047,103,300	50	2,034,906,600	25	1,002,598,481.82	50	49.27	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	55	90,000,000	50	107,275,600	50	105,078,900	25	28,802,126.49	50	27.41	
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	4	290,000,000	4	83,312,300	4	83,312,300	0	0.00	0	0	
	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Terjalin Kerjasama	LPKSM	4	1,900,000,000	3	1,856,515,400	3	1,846,515,400	3	973,667,570.42	100	52.73	
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Toko Retail di Kab/Kota yang dilakukan Pengawasan Barang Beredar / Jasa	Toko / Retail	60	180,000,000	50	224,159,700	50	190,909,700	0	0.00	0	0	
	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus	55	90,000,000	50	93,036,800	50	93,036,800	0	0.00	0	0	
	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	4	90,000,000	5	131,122,900	5	97,872,900	0	0.00	0	0	
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Komoditi Teruji	Komoditi	10	90,000,000	8	76,001,400	8	38,027,600	0	0.00	0	0	
	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi	10	90,000,000	10	76,001,400	5	38,027,600	0	0.00	0	0	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	37,550,068,505	100	12,446,324,087	100	2,781,218,500	20	492,884,200	20.00	17.72	Dinas Perdagangan
Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri		Jumlah Produk Dalam Negeri Terpromosi	Produk	30	5,894,639,381	40	2,753,046,900	40	1,644,546,900	40	99,988,451.52	100	6.08	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri terutama Produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	UMKM	200	5,894,639,381	175	2,753,046,900	175	1,644,546,900	110	99,988,451.52	63	6.08	
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Jenis Produk Dalam Negeri Terpasarkan	Jenis Produk	14	2,000,000,000	12	1,083,699,900	12	931,099,900	12	341,434,333.33	100	36.67	
	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri terutama Produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	200	2,000,000,000	175	1,083,699,900	175	931,099,900	110	341,434,333.33	63	36.67	
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UKM Terakomodir di Retail	UKM	30	370,000,000	25	258,805,600	25 UKM	205,571,700	0	0.00		0	
	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	4	175,000,000	3	166,310,600	3	130,154,200	0	0.00	0	0	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	12	95,000,000	12	92,495,000	12	75,417,500	0	0.00	0	0	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	175	100,000,000	-	-	-	-	-	0.00		-	
												24.76	22.07	
Sasaran 7: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup		Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp0.00	11943.70		11603.52		11603.52						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	4,833,875,000	100	490,000,000	100	5,766,070,650	10	2,917,339,850	10.00	50.59	Dinas Perdagangan
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		Jumlah Kab/Kota Tersedia Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Kab/Kota	10	8,680,000,000	10	7,188,888,300	10	5,766,070,650	10	2,836,906,759.80	100	49.2	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	1300	8,500,000,000	1200	7,012,582,500	1200	5,704,955,850	10	2,806,838,278.20	1	49.2	
	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang	175	180,000,000	150	176,305,800	150	61,114,800	0	0.00	0	0	
												27.71	49.66	
Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan		Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%	-0.08										
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata		Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Miliar	137.24	35,356,295,970	129.78	15,985,161,431	129.78	18,864,953,859	9	8,537,061,687	6.78	45.25	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Peningkatan Persentase Destinasi Pariwisata Yang Minimal Dikembangkan	%	100	16,580,012,830	85.86	5,503,206,408	85.86	3,102,255,128	67.68	50,406,780	78.84	1.62	Dinas Pariwisata
		Persentase Geosite yang tertata	%	50	-	50	-	50						
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Kawasan Pariwisata Yang Dikembangkan	Kawasan	11	2,000,408,500	11	92,741,600	3	100,000,000	2.00	99,418,000	66.67	99.42	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	2	325,955,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Pariwisata	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	1	378,843,500	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Pariwisata Yang Minimal Berkembang	Kawasan	1	750,075,000	11	92,741,600	3	100,000,000	2.00	99,418,000	66.67	99.42	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang tersedia dan Terpelihara Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit	4	545,535,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Daya tarik Destinasi Pariwisata Rintisan Yang Minimal Berkembang	%	14.14	2,500,000,000	85.86	-	85.86	2,670,518,628	-	270,032,728	0	10.11	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Pariwisata Yang Minimal Berkembang	Destinasi	17	1,959,749,800	11 KSPD	2,558,536,000	20	2,670,518,628	0	270,032,728	0	10.11	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang tersedia dan Terpelihara Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Yang Tersedia dan terpelihara	Unit	3	540,250,200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten, Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Daya Tarik Destinasi Pariwisata Yang Minimal Berkembang	Desa Wisata	30	1,040,011,000	85.86	73,885,800	85	151,740,000	2.00	0	2.35	-	
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata Yang Terbina	Desa Wisata	3 Laporan	651,583,000	2000 Tempat Usaha	73,885,800	85	151,740,000	2.00	0	2.35	-	
	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	98	388,428,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program Pemasaran Pariwisata		Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang		7,391,905,747	2,000,000	2,446,751,761	2,000,000	2,020,205,000	473,463	1,430,948,758	23.67	70.83	Dinas Pariwisata
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%		5,036,461,400	20	1,650,413,900	30	2,020,205,000	-0.50	1,430,948,758	-1.67	70.83	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Media Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Media	5	1,341,839,200	3	1,049,149,000	24	1,216,500,000	12	912,000,000	50.00	74.97	
	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Event Pariwisata Yang Terlaksana	Event	13	2,756,400,000	50	300,634,900	20	700,510,000	6	498,949,958	30	71.23	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Data Publikasi Pariwisata	Publikasi	4	300,005,000	12	150,135,000	12	5,195,000	6	-	50	-	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kemitraan Pemasaran Pariwisata Yang Terjalin	Perjanjian	5	638,217,200	15	150,495,000	15	98,000,000	1	19,998,800	6.67	20.41	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Persentase HaKI Yang Telah Memberikan Kontribusi Dalam Pertambahan Nilai Ekonomi Kreatif	%		606,633,173	35.21	209,889,754	35.21	203,930,000	0	151,598,000	0	74.34	Dinas Pariwisata
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Prosentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	%	10	5,270,345,000	12	780,300,000	10	203,830,000	7.33	153,336,880	73.3	75.23	
	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota kreatif Yang Tersedia	Unit	1	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perluasan Pasar Produktif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dipasarkan didalam dan luar negeri	Produk	14	2,143,212,500	10	386,600,000	10	101,740,000	10	101,383,000	100	99.65	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruangan Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Ruang Kreasi dan Jumlah Orang Kreatif yang Terbina	Pelaku Ekraf	6	1,200,000,000	10	261,600,000	12	51,740,000	12	51,613,880	100	99.76	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian		
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha kreatif Sepanjang Rantai Produksi Dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha kreatif Sepanjang Rantai Produksi Dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Laporan	1	277,132,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah usaha kreatif bagi pemula yang terdata	Per Sub Sektor	3	1,500,000,000	12	132,100,000	10	50,450,000	2	340,000	20	0.67		
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Meningkatnya Pemngelolaan kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif	%	5	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase SDM Penunjang Layanan Pariwisata Yang Memenuhi Standar	%		3,506,228,054	70	1,160,576,170	70	30,800,000	0	-	0	-	Dinas Pariwisata	
Pelaksanaan Peningkatan Kapastias Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Dilatih	Orang	5	2,500,000,000	50	101,100,000	60	30,800,000	0	-	0	-		
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	120	1,035,093,720	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pokdarwis yang di Latih	Pokdarwis	240	253,661,760	30	49,600,000	30	15,400,000	0	-	0	-		
	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM pariwisata bidang Homestay dan Pemandu wisata yang dilatih	Orang	480	242,380,800	50	51,500,000	30	15,400,000	0	-	0	-		
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang Yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	50	634,431,860	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	20	266,651,860	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	67,780,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
												30.40	43.93		
Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul		Pertumbuhan Industri (%)	%	4.57											
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri		Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	179.91		173.02	11,781,814,100	173.02	11,781,814,100		1,391,694,931		11.81		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	102,322,211,223	100	35,280,281,729	100	9,820,515,900	10.74	1,314,556,831	10.74	13.39	Dinas Perindustrian	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	IKM			100	8,415,615,800	100	8,415,615,800	20	1,000,810,000	20.00	11.89	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen			1	201,500,000	1	201,500,000	1	74,939,400	100.00	37.19	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan industri	IKM			40	405,803,000	40	405,803,000	40	258,640,000	100.00	63.74	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM Tembakau yang mendapatkan pelatihan pengembangan industri	IKM			100	2,465,028,200	100	2,465,028,200	0	-	0.00	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang terlatih industri kerajinan dan permesinan	IKM			80	319,554,800	80	319,554,800	20	42,889,200	25.00	13.42	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mendapat sarana dan prasarana industri	IKM			200	4,993,819,800	200	4,993,819,800	10	624,341,400	12.50	12.50	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen laporan evaluasi kineja daerah yang tersusun	dokumen			1	29,910,000	1	29,910,000	0	-	0.00	-	
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	IKM			200	1,404,900,100	200	1,404,900,100	20	53,944,931	3.84	3.84	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah sarana dan prasarana Industri Rumah Kemas	jenis			20	504,920,100	20	504,920,100	20	30,050,000	5.95	5.95	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan Kemas Industri	IKM			200	899,980,000	200	899,980,000	20	23,894,931	2.66	2.66	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase IKM yang Meningkatkan dari Kecil ke Menengah	%	3.55	3,018,338,892	140	1,040,710,958	140	1,497,415,200	1.42	359,854,000	1.01	24.03	Dinas Perindustrian
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		Jumlah perizinan dan perluasan usaha industri NTB yang terfasilitasi	IKM			140	1,497,415,200	140	1,497,415,200	20	284,854,000	19.02	19.02	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi perizinan industri	IKM			140	852,455,200	140	852,455,200	20	18,254,000	2.14	2.14	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah masterplan kawasan industri halal NTB yang tersusun	dokumen			2	644,960,000	2	644,960,000	2	266,600,000	100.00	41.34	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	2,043,024,494	1	704,426,525	1	463,883,000	0.11	151,986,000	11.20	32.76	Dinas Perindustrian
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%			1	463,883,000	1	463,883,000	11.23	52,086,000	11.23	11.23	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen data industri yang tersusun	dokumen			1	258,733,000	1	258,733,000	0	-	0.00	-	
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Ikm yang mendapat sertifikat pelatihan industri kreatif	IKM			80	140,000,000	80	140,000,000	40	52,086,000	50.00	37.20	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah IKM yang di pantau dan dievaluasi	IKM			100	65,150,000	100	65,150,000	0	-	0.00	-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	6.71	4,806,536,363	6.35	1,597,038,675	6.35	2,746,780,000		28,873,800	-	1.05	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	56.75	7,967,004,066	53.53	2,647,148,104	53.53	2,476,651,600		533,101,610	-	21.53	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah SDM pengelola koperasi dan pelaku UKM yang dilatih	orang											
		Jumlah SDM pengelola koperasi dan pelaku UKM yang dibina	orang											
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	11,296,717,332	100	3,711,881,596	100	3,219,669,110	100	510,890,600	100.00	15.87	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		Terlaksananya Pelatihan Kecakapan Pemuda	Orang	160		160		160	43,257,300			0	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Dilatih	Orang	100		100		100	43,257,300	0	-	0	-	
												25.97	14.83	
Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.17	79,821,458,869	3.19	26,193,022,352	3.19	29,803,581,890	3.92	10,457,149,862	77.12	35.09	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	18	3,481,991,780	17	1,232,588,784	17	1,395,528,520	7.27	286,609,000	42.76	20.54	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	orang	300	3,241,733,400	430	1,142,686,994	446	1,319,699,200	32	159,216,000	7.17	12.06	
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BID. LATTAS]	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	Orang	750	1,092,070,448	300	390,000,000	300	28,892,000	0	13,682,000	0.00	47.36	
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BLK]	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	orang	384	2,044,288,965	128	700,000,000	128	740,807,400	32	127,694,000	25.00	17.24	
	Sub kegiatan Koordinasi Lintas lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah dokumen hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dan pemagangan	Dokumen	6	105,373,987	2	52,686,994	18	549,999,800	0	17,840,000	0.00	3.24	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	lembaga LPK	100	147,454,000	40	58,000,000	40	16,636,840	30	13,960,000	75.00	83.91	
	Sub Kegiatan Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS].	Jumlah LPK yang di Akreditasi	lembaga LPK	100	147,454,000	40	58,000,000	40	16,636,840	30	13,960,000	75.00	83.91	
Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)	OT	55	92,804,380	20	31,901,790	20	59,192,480	0	-	0.00	0.00	
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja [BLK]	jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)	OT	55	92,804,380	20	31,901,790	20	59,192,480	0	-	0.00	0.00	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	57.48	3,391,251,944	51.09	1,115,004,981	51.09	731,196,200	7.27	83,119,700	14.23	11.37	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota		jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL		480	910,699,800	160	303,566,600	160	20,186,500	0	4,660,000	0.00	23.08	
	Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal) [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.	Orang	480	910,699,800	160	303,566,600	160	20,186,500	0	4,660,000	0.00	23.08	
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang	5,250	388,974,000	1,750	129,658,000	1750	13,222,000	0	13,126,000	0.00	99.27	
	Sub Kegiatan Job Fair /Buruh Kerja [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang	5,250	388,974,000	1,750	129,658,000	1750	13,222,000	0	13,126,000	0.00	99.27	
Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi		Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	orang	26,438	1,995,499,514	23,310	649,780,382	23370	691,099,000	470	55,995,000	2.01	8.10	
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) /pekerja migran Indonesia	Jumlah PMI bermaslah yang ditangani	orang	5,250	618,360,000	1,750	206,120,000	1750	369,116,000	475	16,605,000	27.14	4.50	
	Penyediaan Layanan terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah PMI ke luar negeri yang dilayani di LTSA	orang	70,500	1,033,252,214	21,500	329,031,282	21500	9,703,200	215	4,620,000	1.00	47.61	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari kerja, PMI Purna Yang Diberdayakan	orang	260	343,887,300	60	114,629,100	120	312,279,800	0	34,770,000	0.00	11.13	
Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu)Daerah Provinsi		Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	orang	95	96,078,630	75	32,000,000	60	6,688,700	60	6,688,700	100.00	100.00	
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi [BID. PENEMPATAN]	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	orang	95	96,078,630	75	32,000,000	60	6,688,700	60	6,688,700	100.00	100.00	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perusahaan	%	23	1,025,630,908	22	337,215,751	22	887,964,800	12.00	78,926,300	54.55	8.89	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan	270	743,997,600	90.00	242,999,200	90	137,507,400	38	56,097,300	42.22	40.80	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi [BID. HI]	Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	Perusahaan	270	447,631,500	90	144,210,500	90	36,997,000	30	29,704,300	33.33	80.29	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi [BID. HI]	Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan Yang Diberdayakan Melalui Perjanjian Kerjasama Tripartit	Lembaga	11	296,366,100	11	98,788,700	11	100,510,400	8	26,393,000	72.73	26.26	
	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK)	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Dokumen	11	281,633,308	11	94,216,552	11	750,457,400	6	22,829,000	54.55	3.04	
	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan UMK [BID. HI]	Jumlah jenis dokumen upah minimum yang ditetapkan	Dokumen	11	281,633,308	11	94,216,552	11	750,457,400	6	22,829,000	54.55	3.04	
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		Porsentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	23	3,466,483,656	22	1,139,740,311	22	703,208,860	18.58	128,030,800	84.46	18.21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan	3,175	3,466,483,656	1,055	1,139,740,312	1055	703,208,860	444	131,160,800	42.09	18.65	
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya	Perusahaan	225	269,601,295	75	88,641,833	75	17,088,500	12	9,860,000	16.00	57.70	
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	260	232,905,050	85	76,576,526	85	10,771,000	28	10,335,000	32.94	95.95	
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	Jumlah Perusahaan Yang Diperiksa Pelaksanaan Norma Kerjanya Di Pulau Lombok	Perusahaan	315	320,895,558	105	105,506,802	105	43,275,000	40	23,780,000	38.10	54.95	
	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya	Perusahaan	195	319,634,697	65	105,092,245	65	21,010,100	28	12,135,800	43.08	57.76	
	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	90	219,346,694	30	72,118,693	30	18,873,200	15	10,370,000	50.00	54.95	
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma K3-nya	Perusahaan	255	350,935,019	85	115,383,434	85	47,870,000	85	47,420,000	100.00	99.06	
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	335	231,512,223	110	76,118,580	110	12,856,100	36	5,760,000	32.73	44.80	
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Lombok	Perusahaan	1,500	1,521,653,120	500	500,302,199	500	531,464,960	200	11,500,000	40.00	2.16	
												35.02	40.62	
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan														
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani		Indeks Kriminalitas	Point	12.71										
Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat		Persentase penurunan konflik sosial	%	0.00	5,552,000,000	20.00	4,056,566,599.06	20.00	6,950,450,400		1,911,742,000		27.51	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase pembinaan ideologi wawasan dan Karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	1,526,591,849	10	506,635,309	10	166,196,000		156,341,400		94.07	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen	1	562,456,540.81	1	506,635,308.62	1	450,000,000.00		156,341,400	0.00	34.74	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	1	-	1	-	1	-		-	0.00		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	1	383,444,004.09	1	379,783,595.42	1	272,475,000.00		60,340,200	0.00	22.15	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	1	146,337,288.67	1	126,851,713.20	1	177,525,000.00		96,001,200	0.00	54.08	
PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik (Termasuk Bale Mediasi)		Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	11.43	11,105,209,927	10.53	3,685,524,366	10.53	5,410,590,400		1,772,330,600		32.76	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	1	3,191,596,560.53	1	2,785,524,366.40	1	6,102,590,400.00		1,562,330,600	0.00		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	1	855,085,701.90	1	680,901,494.82	1	3,850,000,000.00		-			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	1	303,454,831.72	1	273,338,331.35	1	679,670,000.00		480,792,000		70.74	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	1	125,732,088.37	1	113,253,755.22	1	50,660,000		25,140,000		49.62	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	1	1,907,323,938.74	1	1,718,030,785.02	1	1,522,260,400.00		1,056,398,600		69.40	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	292,643,073,798	100	97,655,935,112	100	62,642,899,700	20.05	5,836,597,900	20.05	9.32	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual	Kali	2375	100,348,573,728	793	28,473,459,260	793	28,203,523,060	20.05	5,080,028,100	0.84	18.01	
	Sub Kegiatan 1 : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Kali	2370	89,954,926,705	790	27,112,768,160	790	26,810,731,960	156	4,081,008,100	6.58	15.22	
	Sub Kegiatan 2 : Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Kelembagaan Bina Spiritual Yang Terfasilitasi	Lembaga	5	10,393,647,022	3	1,360,691,100	3	1,392,791,100	3	999,020,000	60.00	71.73	
	Kegiatan 2 : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar	Dokumen	27	190,236,028,124	5	33,627,332,440	5	36,075,237,440	0	73,777,200	0.00	0.20	
	Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	12	186,708,519,065	2	32,577,200,000	2	34,713,965,000	0	38,080,300	0.00	0.11	
	Sub Kegiatan 2 : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	10	3,025,514,118	2	134,154,240	2	164,154,240	0	33,393,800	0.00	20.34	
	Sub Kegiatan 3 : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	5	501,994,941	1	915,978,200	1	1,197,118,200	0	2,303,100	0.00	0.19	
Kegiatan 3: Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Dokumen	3	2,058,471,946	3	542,108,000	3	723,506,100	0	24,854,800	0.00	3.44	
	Sub Kegiatan 1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Dokumen	1	855,856,277	1	446,483,000	1	572,051,700	0	8,575,000	0.00	1.50	
	Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	1	424,296,999	1	71,659,300	1	97,339,200	0	11,288,400	0.00	11.60	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sub Kegiatan 3 : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	1	778,318,670	1	23,965,700	1	54,115,200	0	4,991,400	0.00	9.22	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Lembaga Adat Aktif	%	70	24,519,090,462	65	8,086,485,113	65	3,386,242,700		1,000,278,162		29.54	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Bumdes Berprestasi	%	37	-	27	-	27		53.44		197.93		
		Persentase Pokja Posyandu aktif	%	100	-	80	-	80						
		Persentase Posyantek yang aktif	%	64.96	-	56.41	-	56.41						
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten / Kota	%	70	9,389,913,516	60	7,924,383,032	60	3,386,242,700	0.28	937,354,892	0.47	27.68	
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Peserta Bimtek Pengelola Lembaga Adat	Orang	30	961,311,217	30	850,000,000	30	94,400,000	30	4,799,800	100.00	5.08	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Kali	3	416,990,000	3	350,000,000	3	700,000,000	1	92,310,192	33.33	13.19	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan pemerintahan Desa	Kali	3	6,290,659,154	3	5,279,909,939	3	920,000,000	2	128,903,800	66.67	14.01	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kali	4	284,961,117	4	239,175,100	2	121,999,900	1	7,098,300	50.00	5.82	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		Jumlah Peserta Bimtek Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Orang	45	244,592,028	45	205,297,993	30	49,842,800	30	29,242,800	100.00	58.67	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Hibah uang yang diserahkan	Tahun	1	1,191,400,000	1	1,000,000,000	1	1,500,000,000	0.5	675,000,000	50.00	45.00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	81.82	6,405,431,759	72.73	2,173,198,075	72.73	107,435,800		42,121,400		39.21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									590,000,000					
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Lembaga penerima hibah Uang / Barang	Lembaga					12	590,000,000			NA		
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	1,426,928,736	100	508,873,145	100	105,697,700		18,137,493		17.16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten / Kota									107,435,800					
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah peserta peningkatan SDM dan Pentas seni budaya ke luar daerah	Orang					100	107,435,800					
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Cakupan pembinaan sejarah	%	100	719,796,541	100	272,477,237	100	149,999,800		-		-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi									105,697,700					
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah peserta pembinaan SDM lembaga sejarah	Orang					500	105,697,700			100		
												30.23	27.22	
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah		Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	6.07		5.72		5.72		55		961.54		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100.00	11,445,268,038	100.00	3,932,903,666	100.00	3,409,602,000	100	1,028,016,948	100.00	30.15	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100.00	-	100.00	-	100.00		100		100.00		
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus	15	407,322,754	16	139,967,115	16	139,967,115	3	-	18.75	-	
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama	3	199,508,733	1	68,556,597	1	68,556,597	0	-	-	-	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia	Kali	36	207,814,021	12	71,410,518	12	71,410,518	0	-	-	-	
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus	16	3,577,534,823	17	1,229,337,729	17	1,229,337,729	3	144,008,238	17.65	11.71	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	Kali	36	2,740,669,153	12	941,768,050	12	941,768,050	3	138,404,038	25	14.70	
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur	Kali	36	37,665,904	12	12,943,023	12	12,943,023			-	-	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	Kasus	16	799,199,765	17	274,626,656	17	274,626,656	3	5,604,200	17.65	2.04	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang	131	658,247,230	43	226,191,553	43	226,191,553	0	-	-	-	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor	Orang	120	458,447,988	40	157,535,129	40	157,535,129	0	-	-	-	
		Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS	Orang	11		3		3		0		-		
	Pemberkasan Administrasi Pendidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Berkas Pendidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Berkas	5	199,799,242	2	68,656,424	2	68,656,424	0	-	-	-	
		Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	Kali	5		2		2		0		-		
		Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jenis	12		4		4		0		-		
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus	15	3,557,030,543	16	1,222,291,903	16	1,222,291,903	3	585,373,320	18.75	47.89	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibumtran	Kali	36	245,315,689	12	84,297,106	12	84,297,106	0	522,993,320	-	620.42	
		Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawasan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota	Kabupaten/ Kota	10	1,654,344,341	10	568,477,462	10	568,477,462	10		100	-	
		Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Sekolah	30	124,664,836	10	42,838,210	10	42,838,210	0		-	-	
		Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat	Kegiatan	30	376,930,770	10	129,523,608	10	129,523,608	0		-	-	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum	Kasus	15	1,008,191,008	16	346,441,700	16	346,441,700	0	62,380,000	-	18.01	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Rakor Tibum yang dilaksanakan	Kali	6	147,583,899	2	50,713,817	2	50,713,817	0	-	-	-	
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus	16	274,902,079	17	94,463,790	17	94,463,790	3	-	17.65	-	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah sosialisasi perda/pergub kepada masyarakat	Kali	30	274,902,079	10	94,463,790	10	94,463,790	0	-	-	-	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA (Termasuk Desa Bersinar)		Persentase Desa bersinar	%	86.21	2,436,780,947	68.96	808,702,907	68.96	274,075,000		111,774,000	-	40.78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen	1	848,629,511.12	1	764,406,924.04	1	397,455,000.00		111,774,000		28.12	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	1	354,342,992.45	1	323,025,158.28	1	193,195,000.00		6,265,000		3.24	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	1	-	1	-	1	-		-			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	1	253,260,060.03	1	224,276,077.77	1	128,750,000.00		70,029,000		54.39	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	1	241,026,358.63	1	217,105,687.99	1	75,510,000.00		35,480,000			
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi yang berkualitas	%	100	5,727,596,770	100	1,911,317,467	100	524,756,300	100	404,939,415	100.00	77.17	Biro Hukum
		Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang berkualitas	%	100		100		100		100		100.00		
		Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Pertama	%	100		100		100		6		6.00		
		Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Banding	%	100		100		100		1		1.00		
		Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Kasasi	%	100		100		100		3		3.00		
		Persentase Perkara Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan melalui mediasi	%	100		100		100		1		1.00		
		Persentase Produk Hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat di JDIH, Media Sosial yang berkualitas	%	100		100		100		48		48.00		
Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan		Persentase fasilitasi dan evaluasi Produk Hukum Daerah, MoU dan Perjanjian Kerjasama	%	100	3,900,653,457.15	100	384,747,300.00	100	384,747,300.00	100	194,539,917.00	100.00	50.56	
	Sub kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang terbentuk	Perda	50	937,240,588.17	10	119,000,000	10	119,000,000	1	77,923,352	10.00	65.48	
			Perkada	150		30		30		47		156.67		
	Sub kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang terbentuk	Kept. Gub	3500	468,619,122.53	700	60,584,200	700	60,584,200	193	31,950,000	27.57	52.74	
	Sub kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Terdokumentasi dan tersosialisasi kepada masyarakat	Produk Hukum/Perda/P erkada	200	1,222,824,591.97	40	109,571,000	40	109,571,000	48	48,640,000	120.00	44.39	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
		Jumlah MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	Naskah	125		25		25		70		280.00		
	Sub kegiatan : Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab./Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi dan terevaluasi	Perda	250	1,271,969,154.48	50	95,592,100	50	95,592,100	21	36,026,565	42.00	37.69	
			Perbup/Perwal	500		100		100		30		30.00		
Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum		Persentase kasus-kasus hukum yang terfasilitasi	%	100	1,826,943,312.55	100	140,009,000	100	140,009,000	60	72,178,000	60.00	51.55	
	Sub kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah penanganan masalah hukum (Litigasi)	Perkara	20	904,765,524.92	4	99,760,000	4	99,760,000	10	55,050,000	250.00	55.18	
	Sub kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Non Litigasi dan HAM	Jumlah Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	Perkara	20	922,177,787.63	4	40,249,000	4	40,249,000	0	17,128,000	-	42.56	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Rencana Aksi HAM (RANHAM)	Dokumen	15		3		3		1				
												40.71	40.87	
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani		Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%	82.80										
Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	1.00	4,602,682,612	0.90	6,639,046,284.28	0.90	4,770,357,600		668,580,000		14.02	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Politik	%	100	43,528,305,431	90	5,153,432,345	90	3,962,758,200		1,635,201,600		41.26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	1	33,671,239,085.96	1	5,103,432,344.89	1	4,166,297,600.00		668,580,000	-	16.05	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	1	33,148,535,456.60	1	4,636,078,243.00	1	3,766,614,600		450,000,000	-	11.95	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	1	279,641,097.96	1	251,888,001.45	1	248,078,000.00		116,875,000	-	47.11	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	1	278,062,531.40	1	250,446,100.39	1	151,605,000.00		101,705,000	-	67.09	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang Aktif	%	83.01	1,631,097,489	81.35	541,317,956	81.35	501,620,000		81,296,000		16.21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	1	1,600,137,061.11	1	1,535,613,939.39	1	604,060,000.00		81,296,000		13.46	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen	1	1,368,000,489.35	1	1,326,515,857.77	1	410,000,000.00		-		-	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen	1	172,786,649.34	1	155,638,366.81	1	121,900,000.00		29,160,000		23.92	
												-	26.34	
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	55.81										
Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	20.47		19.27		19.27		27.13		140.79		
		Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	100.00		80.00		80.00		50		62.50		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	65.28	6,231,111,760	52.17	2,021,592,521	52.17	581,314,100		48,899,200		8.41	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		Jumlah perencana PPRG	orang	132	6,125,756,012	43.7	1,987,411,370	66	166,737,000	-	19,060,000	0	11.43	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perencana PPRG pada Dinas PP Kabupaten Kota di NTB	orang	90	5,664,674,236	30	1,837,820,182	20	93,471,000		490,000	0	0.52	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perencana PPRG PD Di provinsi NTB	orang	135	461,081,837	45	149,591,188	46	73,266,000		18,570,000	0	25.35	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		Proporsi kader perempuan di partai politik	orang	116	105,355,914	38.2	652,087,700	36	652,087,700	-	33,209,200	0	5.09	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kader Parpol Ikut FGD	orang	80	105,355,892	25	34,181,151	36	652,087,700		33,209,200	0	5.09	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	83.07	2,837,249,127	75.52	920,503,730	75.52	165,865,200		33,778,260		20.36	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	Kasus	711	285,696,859	237	113,641,700	237	113,641,700	-	9,188,260	0	8.09	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jml Peserta yang mendapatkan sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	Kasus	237	111,895,897	237	92,689,988	237	113,641,700	0	9,188,260	0	8.09	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah SDM penyedia layanan yang di latih/bintek	Orang	40	1,590,842,512	15	190,332,000	15	190,332,000	0	7,470,000	0	3.92	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM penyedia layanan yang di latih/bintek	Orang	90	1,238,611,826	30	401,849,362	30	101,349,400	0	490,000	0	0.48	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan Penyintas/Korban yang menerima Kebutuhan spesifik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.	Orang	1500	352,231,722	500	114,276,075	500	88,982,600	0	6,980,000	0	7.84	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Index Ketahanan Keluarga	%	15	1,340,778,150	5	434,995,741	5	144,200,000		26,806,000		18.59	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga	Desa	9	1,340,778,156	3	226,417,200	5	226,417,200	5	83,320,000	166.67	36.80	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Motekar Terlatih	Orang	180	926,871,535	60	300,709,792	60	80,413,200	50	14,860,000	83.33	18.48	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian	Tingkat Capaian	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Puspaga Kewenangan Provinsi	Persen	100	413,906,835	100	134,285,950	50	146,004,000	0	68,460,000	0	46.89	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Dokumen Gender	Dokumen	1	200,537,840	1	75,000,000	1	20,817,600	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		Buku Gender dan Anak	Dokumen	5	200,537,960	60	37,994,600			-	0			
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Buku Gender dan Anak	Dokumen	5	200,537,960	60	75,000,000	1	37,994,600	0	-	0		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	42.00	1,490,733,752	80.00	512,037,084	80.00	125,300,000	60	76,018,991	75.00	60.67	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		Jml Peserta Advokasi dan Temu Anak	orang	240	1,490,733,932	200	385,272,800			130	35,548,991	65		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jml Peserta Advokasi dan Edukasi Pembentukan Forum Anak	Orang	100	292,754,857	100	242,506,159	100	209,738,800	100	35,548,991	100	16.95	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi (Temu Forum Anak Tk. Provinsi)	Orang	100	325,379,312	100	269,530,924	100	175,534,000	30	-	30	-	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		2,123,868,384		727,588,084		277,555,400		45,376,215		16.35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kotan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	10			78,550,000	8	74,007,300	-	18,386,000		24.84	
	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	Jml Kab/Kota Layak Anak	Persen	10				8	74,007,300		18,386,000		24.84	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			300		100	69,555,000				-	0		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		Target di Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian		Tingkat Capaian
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	Berita	240	432,470,345		146,444,494		69,555,000		-			
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (UPTD)		Orang	300	122,860,293			100	146,444,494					
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kemampuan aktivis perlindungan anak dari kekerasan	Orang	1428	1,568,537,949	472	233,448,900	472	531,143,590	0	2,250,000	0	0.42	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kemampuan aktivis PATBM dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan sebanyak 36 orang	Orang	228	1,169,139,168	72					-	0		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pemahaman Penyalahgunaan Napza dan PMS sebanyak 300 anak	Orang	1200	399,399,869	400	74,007,300 159,441,600			0	2,250,000	0		39